HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pendiri:
P.K. OJONG (1920-1980)
JAKOB OETAMA (1931-2020)

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

16 Halaman+Kompas.id
Nomor 103 Tahun Ke-61

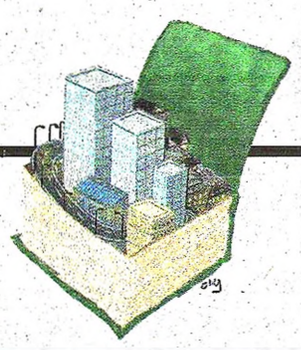
Harga Langganan (Belum Termasuk Ongkos Kirim)
Rp 250.000/bulan (Jawa)
Rp 265.000/bulan (Luar Jawa)

Harga Eceran
Rp 12.000 (Jawa)
Rp 12.500 (Luar Jawa)

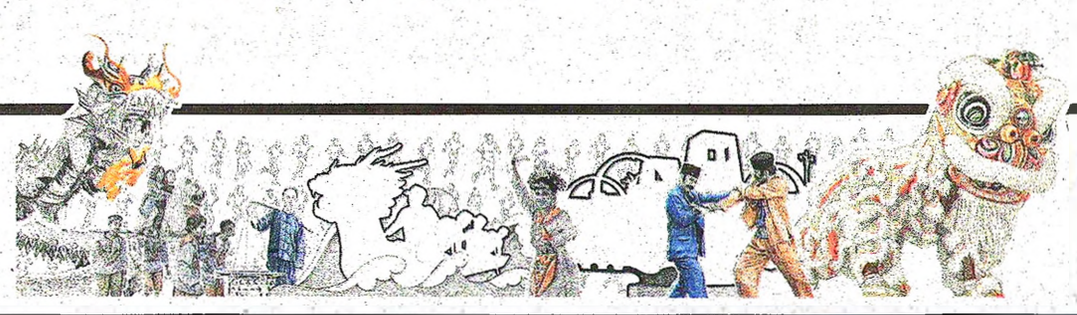
Layanan Pelanggan
(021) 25676000
0812 900 50800

E-mail sekred@kompas.id
Redaksi (021) 5347710, 08118608059
Iklan (021) 80626688-99

KHUSUS PELANGGAN KORAN
Dapatkan hak Anda sebagai pelanggan koran sekarang juga
0812 900 50800



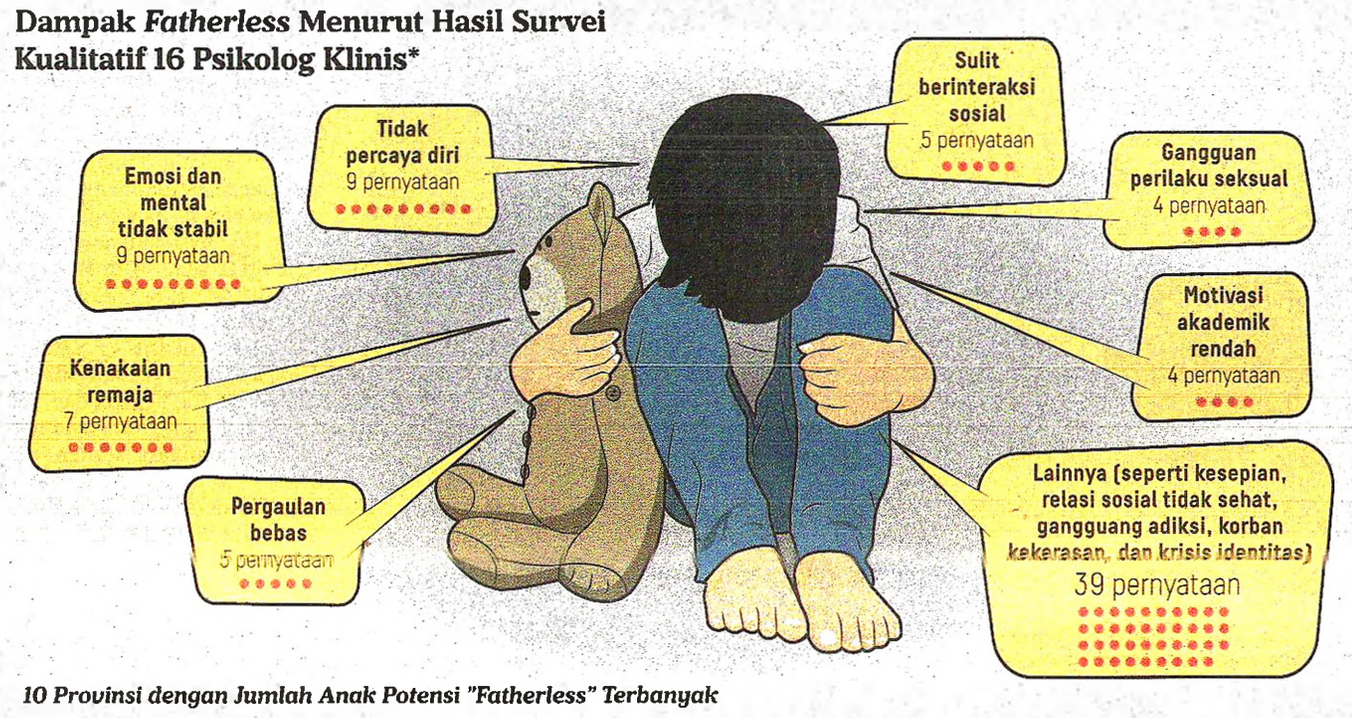
UU Perkotaan
Indonesia butuh landasan legal yang jelas dan kuat untuk membangun kotanya.
OPINI/HLM 7



LARI
DAN NIKMATI PESONA BUDAYA
DI KOTA TANGERANG!
tangerang10k tangerang10k.com
TANGERANG 10K

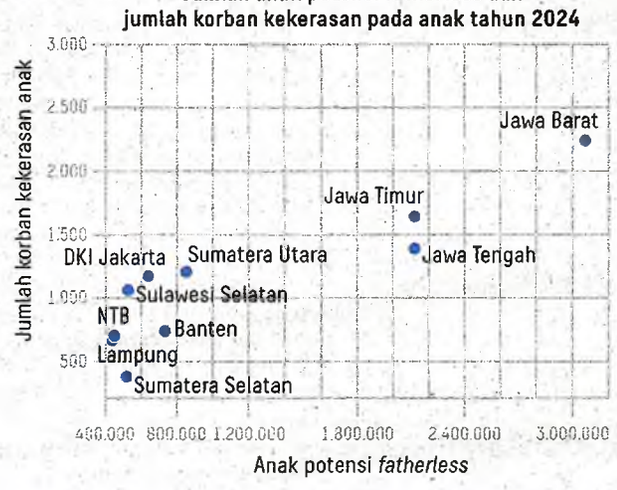
KAMIS, 9 OKTOBER 2025 www.kompas.id Harian Kompas @hariankompas

Dampak *Fatherless* Menurut Hasil Survei Kualitatif 16 Psikolog Klinis*

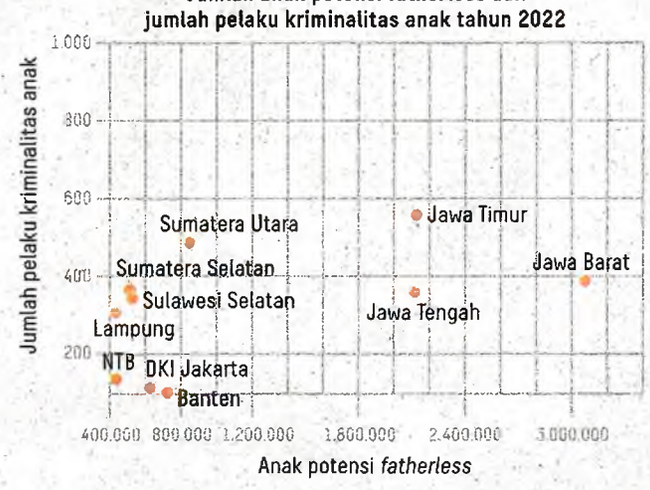


10 Provinsi dengan Jumlah Anak Potensi "Fatherless" Terbanyak

Jumlah anak potensi *fatherless* dan jumlah korban kekerasan pada anak tahun 2024



Jumlah anak potensi *fatherless* dan jumlah pelaku kriminalitas anak tahun 2022



*Survei kualitatif dengan 16 responden psikolog klinis di 16 kota di Indonesia diselenggarakan *Kompas* pada Juli-Agustus 2025 melalui wawancara daring. Setiap psikolog diminta menjawab singkat lima dampak *fatherless*. Kota-kota sampel yakni Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Jakarta Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Tabanan, Lombok, Pontianak, Samarinda, Toraja, Kendari, Ambon, dan Sorong.

Sumber: Data mikro Susenas BPS Maret 2024, hasil survei kualitatif 16 psikolog klinis, dan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diolah *Kompas*/XNA/PUT/JUD/FRD

INFOGRAFIK: ISMAWADI

PERLINDUNGAN ANAK

Kehadiran Ayah Kurangi Potensi Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran ayah dalam perkembangan anak bisa mengurangi risiko anak menjadi korban kekerasan. *Kompas* memperkirakan, jika sosok ayah hadir di kehidupan 100.000 anak di setiap provinsi, berpotensi mengurangi 81 anak menjadi korban kekerasan.

Temuan ini berasal dari hasil analisis Tim Jurnalisme Data *Kompas* menggunakan persamaan regresi linier antara jumlah anak berpotensi *fatherless* dan jumlah korban kekerasan anak di 38 provinsi. Korelasi di antara dua data tersebut cukup kuat, mencapai 0,89 poin.

Artinya semakin banyak anak kehilangan sosok ayah di suatu provinsi bisa memengaruhi anak menjadi korban kekerasan.

Sebagai perbandingan, jumlah korban kekerasan anak paling tinggi tahun 2024, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada di Jawa Barat, yakni sebanyak 2.259 anak. Setelah itu Jawa Timur (1.646 anak), Jawa Tengah (1.397 anak), dan Sumatera Utara (1.199 anak).

Sementara jumlah anak berpotensi *fatherless* paling banyak di Jawa Barat, yakni 3,1 juta anak. Lalu disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 2,1 juta anak, dan Sumatera Utara (844.085 anak).

Total jumlah anak berpotensi *fatherless* dari hasil olahan Data Mikro Susenas Badan Pusat Statistik Maret 2024 mencapai 15,9 juta anak, setara 20,1 persen dari total 79,4 juta anak usia kurang dari 18 tahun. Angka tersebut terdiri dari anak tanpa kehadiran ayah di rumah sebanyak 4,4 juta anak dan anak dengan ayah bekerja lebih dari 60 jam per minggu, yakni 11,5 juta anak.

Psikolog di Toraja, Sulawesi Selatan, Iindarda S Panggalo, membenarkan hal itu. "Dari sisi psikologis, bisa jadi ada korelasinya. Anak yang tumbuh tanpa figur ayah bisa bertumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri dan kadang-kadang banyak menjadi korban," ujar Iindarda, Kamis (2/10/2025).

Korban kekerasan

Anak *fatherless* terkadang tidak terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan dan harga diri mereka juga cenderung rendah. Kondisi ini disebabkan tidak ada figur ayah yang harusnya dapat melindungi.

Faizah (29), warga Jakarta, menjadi korban kekerasan ayah kandung saat tinggal bersama ayahnya di Bandung, beberapa tahun yang lalu. Hingga saat ini, Faizah masih menyimpan trauma disiksa ayahnya.

"Aku punya trauma yang sampai sekarang belum seluruhnya pulih. Dulu, ayahku *nyalain* lampu tiba-tiba, membangunkan aku, terus habis itu

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Mengubah Ketiadaan Ayah Jadi Kekuatan

Pengasuhan yang seharusnya melibatkan ayah dan ibu tak selalu terjadi. Kehilangan sosok ayah dalam hidup justru dapat menjadi faktor penyemangat bagi mereka.

Fajar Ramadhan/ Albertus Krisna/ M Puteri Rosalina

Ketiadaan sosok ayah di usia belia tidak serta-merta membuat anak jatuh dalam keterpurukan. Alih-alih meratapi keadaan, kemandirian justru mendorong anak-anak tanpa pengasuhan langsung ayah mencapai puncak kesuksesan.

Hal ini, antara lain, dialami oleh Aulia (22), yang sejak lahir tumbuh tanpa sosok ayah yang menemani kesehariannya. Bukan karena perpisahan, melainkan tuntutan pekerjaan yang memaksa ayahnya merantau ke Palembang, Sumatera Selatan. Sementara Aulia tinggal bersama ibunya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sang ayah hanya pulang tiga kali dalam setahun untuk waktu yang singkat.

Kondisi ini membuat Aulia terbiasa mengurus segala sesuatunya sendirian. Ia tidak pernah mengeluh. Ketiadaan sosok ayah dalam rutinitasnya terasa seperti kenormalan. Ia belajar untuk mengandalkan diri sendiri, mulai dari urusan rumah hingga urusan sekolah. Kemandirian ini terbentuk dari keadaan yang memaksanya menjadi pribadi tangguh sejak dini.

"Kadang suka melihat teman-teman beli alat tulis diantar ayahnya, sedangkan aku berangkat sendiri. Tapi, ternyata hal-hal semacam itu membuatku lebih mandiri," ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Meskipun kehadirannya sangat minim, Aulia mengenang ayahnya sebagai sosok yang sabar dan tekun saat mengajarinya mengerjakan tugas sekolah. Momen-momen langka itu sangat membekas meskipun hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Sentuhan bimbingan yang jarang didapatkannya justru memicu semangatnya.

Ayah Aulia, tanpa disadari, telah menanamkan nilai-nilai ketekunan yang menjadi modal terbesarnya.

"Kalau sama ibu, aku hanya dikasih pilihan. Kalau tidak mau belajar, harus siap menerima akibatnya. Dari situ, saya memikirkan sendiri dampaknya," tambahnya.

Aulia menolak bersedih dengan kondisi yang dihadapinya. Sebaliknya, situasi ini menjadikannya penyemangat untuk membuktikan diri. Ia berjuang lebih keras, menunjukkan ke lingkungannya bahwa ketiadaan ayah tidak akan menghalangi prestasinya. Obsesi untuk membuktikan diri ini menjadi motivasi terkuatnya.

Sejak duduk di bangku SD hingga kelas X SMA, Aulia selalu meraih peringkat pertama di sekolah. Prestasi ini bukan hanya sebuah pencapaian akademik, melainkan juga manifestasi dari tekadnya agar tidak kalah oleh keadaan. Ia membuktikan bisa berhasil tanpa kehadiran ayah yang membimbingnya setiap hari.

"Meskipun secara fisik jauh, ayah selalu menanyakan kabar setiap hari. Menanyakan bagaimana kegiatan sehari-hari. Perhatian kecil itu membuat ayah seperti ada di sini," tuturnya.

Belum lama ini, Aulia menyelesaikan studi sarjananya di perguruan tinggi negeri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah pencapaian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya mengingat selama ini dia mengurus segala keperluan kuliahnya sendiri.

Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Ia lulus dengan predikat membanggakan, menutup satu babak perjuangannya dengan pencapaian luar biasa. Ketidakhadiran ayah menjadi dorongan penyemangat baginya.

Panutan dari buku

Ditinggal sang ayah saat masih berusia 5 tahun tak membuat Danardono (44) kekurangan figur panutan. Jauh sebelum era internet, ia mencari sosok laki-laki ideal melalui buku dan komik. Sebuah jargon dalam komik lawas, "Cerdik seperti Wisnu, berani seperti Wisanggeni", menjadi mantra pegangannya selama puluhan tahun.

Prinsip itu membuatnya tumbuh menjadi pribadi bertanggung jawab, terlebih saat menjalani masa-masa remaja. Dia selalu memikirkan dampaknya setiap akan bertindak. Dia tidak ingin tindakannya membuat sang ibu kecewa.

"Aku pikirkan akibatnya, apakah ini akan berdampak buruk pada ibuku?" katanya saat menceritakan bagaimana menjalani masa remajanya dengan kenakalan yang terukur.

Sejak ayahnya pergi meninggalkan keluarga, Danardono memang sangat menghormati sosok ibu dan perempuan di sekitarnya. Selain ibu yang berjuang membesarkannya, ada bude, yakni kakak perempuan dari ibu yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan.

Tidak hanya itu, ada kakak

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-5)

JURNALISME DATA
BACA JUGA HLM 2

>> BACA JUGA:

Anak "fatherless" Alami Gangguan Psikologi
Anak *fatherless* berpotensi mengalami depresi, kecemasan, dan kesepian.
KOMPAS.ID
komp.as/gangguanpsikologi

PEREKONOMIAN

Keyakinan Konsumen Turun

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia masih berada pada level optimis, tapi angkanya turun. Penurunan ini terjadi ketika pemerintah tengah getol menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi dan merealisasikan program-program prioritasnya.

Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2025, yang dirilis pada Rabu (8/10/2025), mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis (di atas 100), yakni sebesar 115. "Terjaganya keyakinan konsumen pada September 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers.

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

PEMERINTAHAN

Kabinet Kembali Dirombak, Sejumlah Risiko Membayangi

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki setahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk yang keempat kali. Perombakan dilakukan dengan menambah dua wakil menteri serta membentuk dua badan dan dua posisi baru. Kabinet yang kian besar ini dinilai bisa menimbulkan risiko terhadap kinerja pemerintah.

Presiden melantik dua wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dan Akhmad Wiyagus dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Dengan pelantikan Akhmad, jumlah wamendagri menjadi tiga orang. Dua wamendagri lainnya, yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk, lebih dulu dilantik.

Sama halnya dengan wamendagri, jumlah wamenkes juga bertambah menjadi dua orang. Sebelumnya sudah ada Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. Adapun Benjamin adalah dokter ahli penyakit paru yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

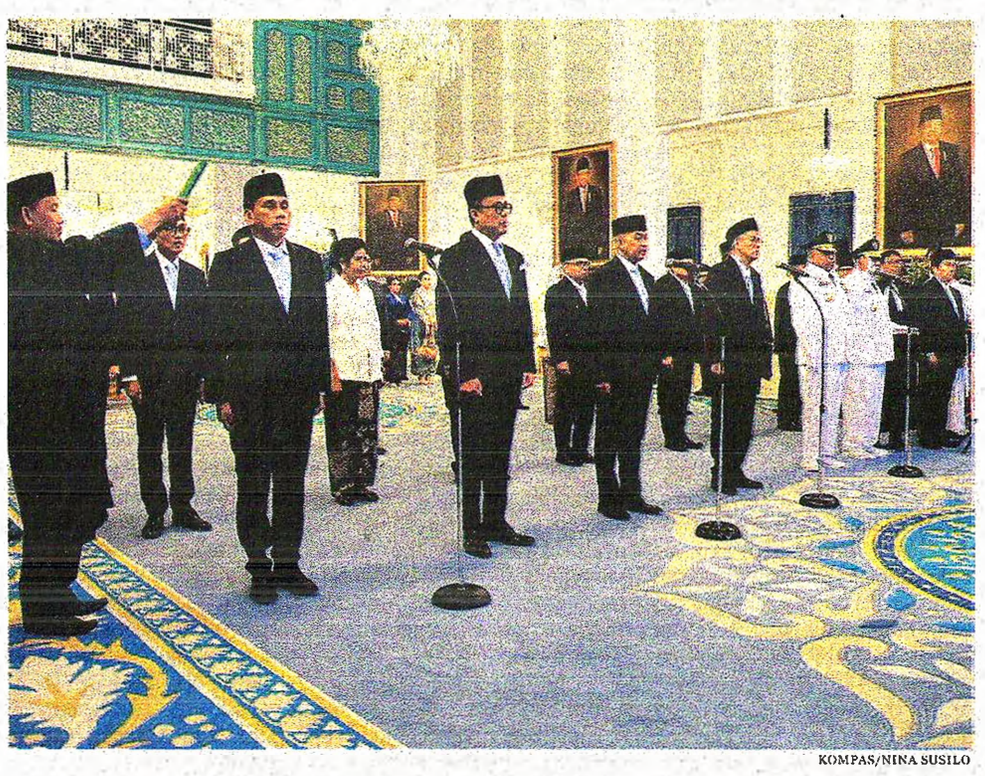
Pada awal pembentukan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo sudah memiliki 56 wamen. Selama hampir satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menambah tiga wamen. Selain Dante dan Benjamin, sebelumnya Presiden juga mengangkat Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wamen Haji dan Umrah.

Selain itu, ada pula beberapa wamen yang berpindah posisi. Salah satunya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Kemarin, Anggito dilantik Presiden menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggito mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya, yang diangkat menjadi Menteri Keuangan pada perombakan kabinet 8 September 2025.

Badan dan posisi baru

Kemarin, Presiden juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Badan baru ini dibentuk sebagai konsekuensi dari perubahan status Kementerian BUMN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)



KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Para pejabat ini, antara lain, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.

INDEKS

Korban di Al-Khoziny Bukan Sekadar Angka
NUSANTARA/HLM 11

Jangan Korbankan Transportasi Publik
METROPOLITAN/HLM 12

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH kompas.id

Hitam-Putih Cerita tentang Ayah

Keberhasilan ayah memenuhi kebutuhan psikologis anak akan membahagiakan. Sebaliknya, jika tak berhasil, anak akan bersedih. Warga membagikan kisah ini di media sosial dalam berbagai ungkapan.

JAKARTA, KOMPAS — Media sosial atau medsos menjadi saksi curahan hati warganet, termasuk tentang sosok ayah dengan beragam perasaan. Emosi senang menempati posisi teratas disusul rasa sedih di nomor urut dua.

Tim Jurnalisme Data Harian *Kompas* mengolah data 1.996 konten medsos dengan kata "ayah" beserta sinonimnya sepanjang Juni 2025 dari Monitoring Media Litbang *Kompas*. Sebanyak 70 persen di antaranya berasal dari X. Bulan Juni 2025 dipilih sebagai periode monitoring karena Hari Ayah Internasional jatuh pada 15 Juni.

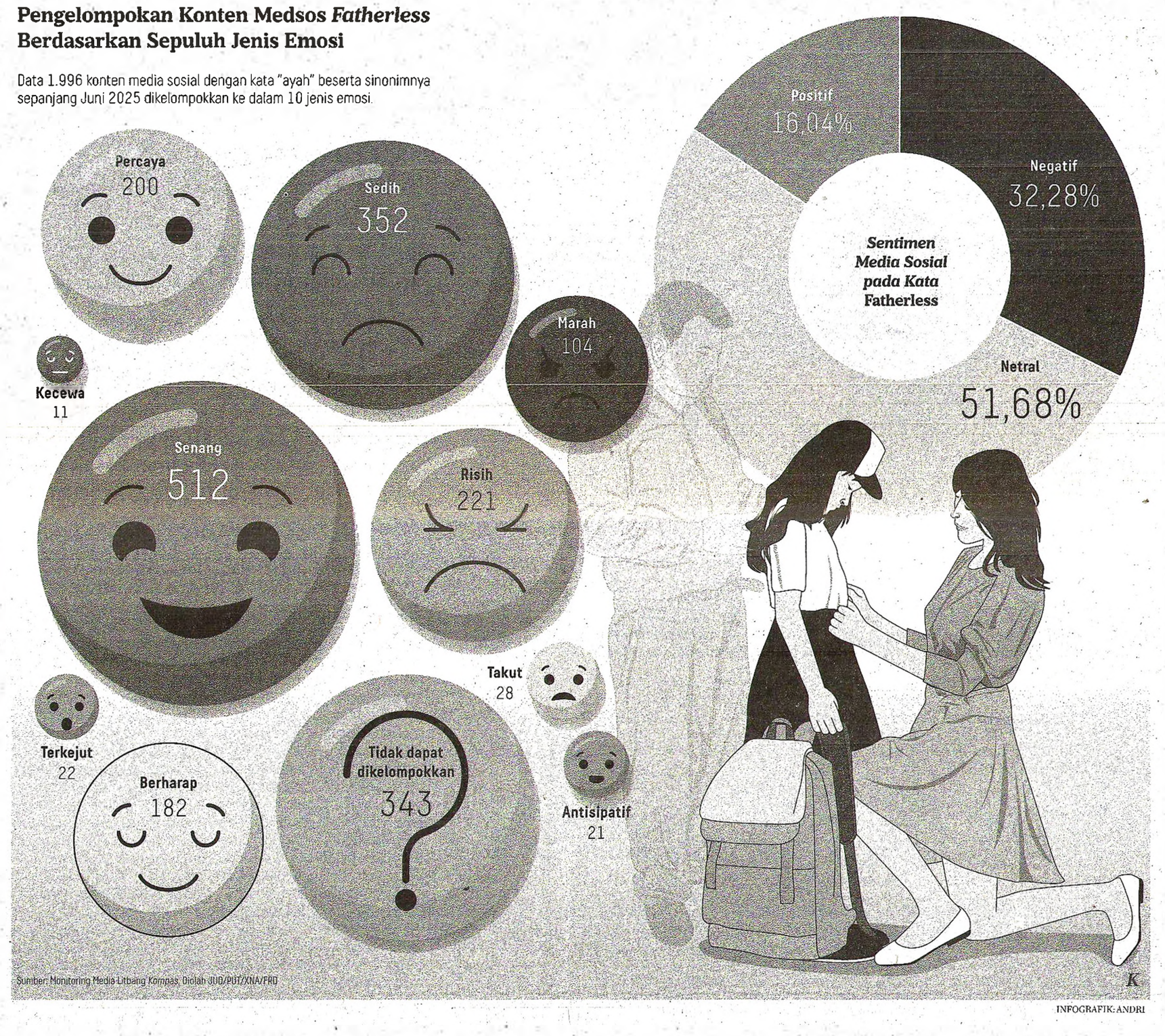
Kompas mengelompokkan konten medsos itu ke 10 jenis emosi, yakni marah, antisipatif, kecewa, risih, takut, berharap, senang, sedih, terkejut, dan percaya. Sebanyak 343 konten media sosial tidak dapat dikelompokkan.

Dari konten-konten yang dapat diklasifikasikan, 31 persen mengandung emosi senang. Posisi kedua dan ketiga emosi sedih dan risih dengan proporsi konten masing-masing 21 persen dan 13 persen. Rasa percaya (12 persen), berharap (11 persen), dan marah (6 persen) berada di peringkat keempat hingga keenam.

Secara rinci, konten-konten yang mengandung emosi senang paling banyak memuat kata "lucu", "bapak", dan "sehat". Di sisi lain, konten yang bernuansa sedih paling banyak mengandung kata "ayah", "*fatherless*", dan "peran."

Pengelompokan Konten Medsos *Fatherless* Berdasarkan Sepuluh Jenis Emosi

Data 1.996 konten media sosial dengan kata "ayah" beserta sinonimnya sepanjang Juni 2025 dikelompokkan ke dalam 10 jenis emosi.



Sumber: Monitoring Media Litbang *Kompas*, Diolah JUD/PUT/XNA/FRD

INFOGRAFIK: ANDRI

Konten tentang ayah

Rut Helga (31), pekerja yang tinggal di Tangerang, Banten, sering membuat konten medsos tentang ayahnya. Ia hanya iseng untuk membuktikan papanya benar-benar nyentrik atau tidak di mata warganet.

Salah satu kontennya berisi tentang cara ayah mengasuhnya dan kolom percakapannya dengan ayah di Whatsapp. "Mulanya saya takut dibilang sombong. Ternyata, ada warganet yang justru merasa terobati (dengan membaca konten saya). Dari situ, hati saya terasa hangat," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Rudarto (68), papanya Rut, tak keberatan dengan konten-konten putrinya di medsos. "Dia (Rut) alasan saya bertahan hidup," kata pria yang tinggal di Malang, Jawa Timur.

Merespons temuan *Kompas*, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji menilai, suasana kebatinan di medsos menandakan ada sekelompok anak yang senang dengan keberadaan ayahnya. Dampaknya, sang anak mengapresiasinya.

Untuk mencapai situasi itu, para ayah membutuhkan pemahaman sikap dan perilaku dalam membangun relasi dengan anak. "Kebutuhan psikologis anak patut diperhatikan," ucapnya di Jakarta.

Meskipun demikian, ada warga yang mengeluhkan ayahnya di media sosial. Salah satunya Faizah (29), warga Jakarta, yang sering membagikan pengalaman sebagai penyintas kekerasan di rumah tangga.

Melalui kanal media sosialnya, Faizah menceritakan trauma, depresi, dan menjadi hubungan sehat dengan keluarga. Kanal miliknya, di antaranya, Tiktok @ceritafaizah dan Instagram @faizahka.

Pengalaman tinggal berdua dengan ayah membuat Faizah trauma. Ia sering dituntut menjadi layaknya ibu rumah tangga yang harus dapat mengurus segala urusan rumah. Ia juga pernah terlambat satu tahun masuk SMA karena ayahnya tidak mengurus berkas administrasi ketika pendaftaran murid baru.

Menurut Faizah, penting baginya berbagi pengalaman betapa sulit menjadi anak perempuan dengan ayah toksik. "Mungkin banyak anak perempuan yang punya sosok ayah toksik atau *abusive*. Itu pasti membingungkan. Di satu sisi sayang karena pasti punya beberapa momen hangat. Walaupun jumlahnya mungkin sangat sedikit dibanding yang mengenaskan," kata Faizah.

Menurut Syafira Putri, psikolog klinis di Sorong, Papua Barat, rasa sedih yang mencuat dari konten medsos berkaitan dengan kesadaran seseorang yang ternyata membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya, tetapi tidak ia dapatkan. Adapun rasa jijik dapat muncul karena sang ayah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau selingkuh.

"Fatherless"

Merujuk olahan data yang sama, kata "*fatherless*" muncul 706 kali pada 1996 konten medsos yang dianalisis. Secara spesifik, kata "*crying*", "lucu", dan "iri" turut disematkan berbarengan dengan konten "*fatherless*" itu.

Syafira menilai, kata "lucu" yang bersamaan dengan konten "*fatherless*" menandakan ironi. Ada orang yang membicarakan kondisi *fatherless* dengan dibalut senyum dan tawa palsu.

Ia menggarisbawahi temuan *Kompas* terkait kata "iri." "Anak-anak yang *fatherless* cenderung iri melihat teman-temannya yang memiliki sosok ayah. Ini tak bisa dimungkiri. Ada klien saya yang *fatherless* serta merasa iri, jengkel, dan dengki melihat orang yang keluarganya utuh. Ia juga menginginkannya," tuturnya.

Sama halnya yang dirasakan Taro (29), warga Cikarang, Jawa Barat, yang sejak kecil ingin merasakan kehadiran orangtua lengkap. Sejak TK, orangtua Taro bercerai dan komunikasi di antara keduanya tidak baik. Ia diasuh ibunya dan jarang bersua dengan ayahnya walau tinggal di kota yang sama. Ia merasakan ada banyak momen sedih hidup tanpa ayah, seperti momen pengambilan rapor sekolah. Di momen itu, rapor teman-temannya diambil orangtua lengkap, ada ayah dan ibu.

Medsos seperti X menjadi kanal penyaluran Taro meringankan beban pikiran. "Bagiku nge-*tweet gitu* sebagai bentuk ungkapan kerisihan otakku. Tetapi, kadang bingung mau menuangkan ke mana. Kalau enggak bisa cerita ke orang, aku *nulis*. Itu meringankan otak, bisa lebih tenang," kata Taro.

Sentimen netral

Data medsos Litbang *Kompas* menunjukkan ada sentimen positif, negatif, dan netral terkait *fatherless*. Nada netral mendominasi konten *fatherless*. Sebanyak 1.534 konten atau 51,7 persen dari 2.968 konten yang memuat kata "*fatherless*", peran ayah, dan hari ayah bernada netral.

Artinya, mayoritas warganet menganggap ketiadaan peran ayah di rumah sebagai permakluman. Aktivitas ayah yang lebih banyak dihabiskan di luar rumah dianggap hal biasa.

Konten *fatherless* dengan sentimen negatif sebesar 32,3 persen atau 958 konten. Ketiadaan peran ayah dalam hidup sehari anak-anak dinilai memberikan dampak negatif pada anak oleh warganet. Sementara sisanya, hanya 16,04 persen konten yang bernada positif.

Milka (16), pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah, beberapa kali mengunggah foto bersama ayah, ibu, dan dua adiknya di medsos. Foto kebersamaan dengan keluarga itu ditunjukkan Milka sebagai simbol kedekatan dengan ayahnya. Meski ayah Milka sehari-hari bekerja di Karawang, Jawa Barat, tetapi tiap akhir pekan pulang ke Semarang untuk bertemu keluarga.

"Saya curhat ke medsos untuk menunjukkan kebersamaan dengan papa. Saya biasanya yang lebih sering unggah tentang keluarga itu dari Instagram-nya papa. Jadi, papa yang awalnya *upload* foto bareng-bareng kita saat *nonton* bioskop atau liburan," kata Milka.

Meski ayahnya bekerja di luar kota, Milka menganggap hal itu sebagai hal biasa. "Saya terbiasa ayah sehari-hari tidak di rumah. Papa selalu menyempatkan datang kalau aku ikut lomba. Papa sampai cuti untuk lihat aku lomba," ujar Milka.

(JUD/PUT/XNA)

PERAN GANDA

Menjadi Ibu Sekaligus Ayah bagi Si Buah Hati

Suatu malam pada bulan April dua tahun silam, hidup Dhianis berubah setelah sang suami mengembuskan napas terakhirnya. Suami dan ayah, yang menjadi andalan dalam keluarganya, berpulang untuk selamanya.

Belum sempat berdamai dengan kesedihan yang dirasakan, Dhianis harus menenangkan dua buah hatinya yang saat itu berusia empat tahun dan dua tahun. Bayang-bayang harus membesarkan keduanya seorang diri terus memenuhi pikirannya.

Dhianis khawatir tidak optimal membesarkan anak-anaknya seorang diri, terutama anak laki-lakinya yang membutuhkan sosok ayah selama masa pengasuhan. Terlebih, sang ayah selama ini dikenal dekat dengan anak laki-lakinya.

"Sempat bingung. Banyak pertanyaan ke diri sendiri. Misalnya, bagaimana nanti saat anak memasuki masa pubertas," kata Dhianis, Selasa (23/9/2025).

Sebagai dokter gigi yang sibuk dengan jadwal praktik, Dhianis sebelumnya membagi waktu mengasuh anak bersama suami. Saat dirinya menerima pasien di sore hari, suami intensif bermain dengan dua anaknya.

Dhianis memutar otak agar bisa membagi waktu untuk bermain bersama anak-anaknya. Dalam interaksi itu, ia kerap menghadirkan sosok ayah lewat galeri foto kebersamaan mereka yang masih tersimpan. "Saya anggap kami menjalani pernikahan jarak jauh beda alam," ucapnya.

Dhianis juga mengajarkan anaknya berani dan tegas menghadapi perundungan di sekolah. Peran yang selama ini dijalankan suami kini ia gantikan. Belakangan, si anak menunjukkan sikap percaya diri menghadapi perundungan teman-temannya.

Dhianis berpesan ke anaknya, "Kalau kamu *digangguin* teman kamu, harus berani melawan." Begitu ucapan yang disampaikan kepada anaknya.

Meski begitu, Dhianis menyadari anaknya tetap membutuhkan sosok laki-laki dewasa yang bisa menjadi panutan langsung. Sosok itu dihadirkan Dhianis lewat kakek dan paman. "Sekarang ini si sulung mau khitan. Sebelumnya masih takut, tetapi karena kemarin diberi pengertian sama omnya, ia jadi berani," kata Dhianis.

Dhianis sadar, dirinya harus menjadi sosok yang kuat dan tegas, hal yang sebelumnya ia anggap sebagai peran seorang ayah. Ia yakin, dengan fondasi yang kuat dari keluarga, ia bisa membentuk anak-anaknya menjadi pribadi yang tangguh mentalnya.

Perceraian

Alia (37) sudah setahun ini bercerai dengan suaminya. Ia tidak menyesali keputusannya itu. Dari sisi sumber pendapatan, ia tidak khawatir karena selama ini justru ia yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, soal pengasuhan anak, ia mesti bersiasat supaya anak perempuannya tidak kehilangan sosok ayah dalam hidupnya.

"Aku enggak masalah karena dari awal pun, dia (suami) secara fungsi tidak ada. Aku justru yang jadi *breadwinner* (penanggung nafkah keluarga). Sekarang bedanya seperti 20-30 persen beban yang hilang," ujar Alia, Jumat (15/8).

Sebelum bercerai, kata Alia, ia merencanakan masa depan keluarga dan merasa suaminya tak pernah hadir ikut merencanakan atau menjalani rencana-rencana yang dibuatnya. Alia juga lebih banyak mengasuh anak karena mantan suaminya dibesarkan dalam kultur keluarga patriarki yang menanamkan pola pikir bahwa ayah tidak wajib mengasuh anak.

Setelah bercerai, Alia tak kesulitan menjalani peran sebagai orangtua tunggal. Hanya saja, di awal perceraian, pekerja paruh waktu ini membutuhkan bantuan psikolog untuk menyembuhkan luka batinnya.

Namun, beberapa tantangan masih menghadang Alia, khususnya soal pengaturan waktu pengasuhan anak. Dulu ia masih bisa berbagi waktu dengan mantan suami, tetapi kini semua harus dijalaninya sendiri.

"Aku harus merencanakan semua dari A sampai Z. Dari bangun tidur saat subuh sudah harus masak, menyiapkan anak sekolah. Baru bisa istirahat setelah anak berangkat sekolah. Setelah itu harus melek lagi saat anak pulang sekolah," ujar Alia.

> ***Kesedihan anakku hilang karena bapaknya lebih tahu cara penanganannya.***
> Alia

Belum lagi ketika anak perempuannya yang berumur empat tahun rewel. Ia mencontohkan, sebelum wawancara lewat Zoom dengan *Kompas*, anaknya sempat tantrum karena keinginannya untuk jalan-jalan ke sebuah toko batal karena anaknya tertidur di restoran.

"Kayak tadi anakku rewel karena sakit, tetapi aku telanjur janji mengajak ke (toko) Miniso. Sebelumnya, aku dan anakku makan siang di restoran. Anakku tertidur di restoran hampir sejam. Karena sudah siang dan harus bekerja, aku langsung mengajaknya pulang. Sampai di rumah ia *nangis* kejer," kata warga Kota Bekasi ini.

Dulu, sebagai solusi jika anaknya rewel dan tak bisa dia tangani, Alia menelepon suaminya untuk menenangkan si anak. "Saya telepon bapaknya dan bapaknya *ngobrol* ke anak, *nangis* anakku berhenti. Istilahnya, kesedihan anakku hilang karena bapaknya lebih tahu cara penanganannya," kata Alia.

"Co-parenting"

Setahun setelah perceraian, ia dan mantan suaminya sepakat menerapkan *co-parenting*, yakni berbagi pengasuhan anak. Ia tidak ingin anaknya kehilangan sosok ayah karena perceraian orangtua.

Alia mengaku tidak mempunyai jadwal rutin anak bersama ayahnya, tetapi ada waktu rutin anak bisa berkomunikasi dengan ayah melalui sambungan telepon. Saat Alia sakit atau harus bekerja di luar kota, anak diasuh oleh ayahnya.

"Anak aku titip ke bapaknya kalau aku harus keluar kota lama. Cuma risikonya, anakku jadi kurus karena ayahnya tidak telaten memberi makan dia. Kalau anak enggak mau makan, tidak dipaksa, malah kadang diberi permen. Jadi, laparnya hilang," kata Alia.

Tak hanya itu, saat anak bersama ayahnya, mantan suaminya itu tidak seratus persen mengasuh anak. Anaknya justru diasuh oleh kakak perempuan mantan suami Alia.

Alia paham risiko yang terjadi jika anak diasuh oleh bapaknya selama beberapa waktu: anak bakal mendapatkan pengasuhan yang tidak ideal. Meski begitu, ia masih menilai anaknya harus dan berhak mendapatkan pengasuhan berimbang oleh ibu dan ayahnya.

"Yang ia (anak Alia) butuhkan adalah energi ayah ibunya. Energi maskulin dari ayah dan energi emosional dari ibu. Itu mengapa kalau anak *nangis* dipegang perempuan tetap menangis, tetapi setelah dipegang ayah menjadi diam. Cara memvalidasi (emosi) antara ayah dan ibu berbeda," ucap Alia.

Pernikahan jarak jauh

Hidup berjauhan dengan suami dirasakan Ros (48), warga Wonosobo, Jawa Tengah, selama 12 tahun terakhir. Suami Ros bekerja di Tangerang Selatan, Banten, dan pulang ke Wonosobo sebulan atau dua bulan sekali. Jika libur sekolah, Ros bersama Gatra, anak laki-lakinya berusia 14 tahun, berkunjung ke Tangerang Selatan.

Langkah itu dipilih Ros dan suaminya karena kondisi ekonomi mereka. Penghasilan suami Ros di salah satu perusahaan air minum dalam kemasan lokal di Jabodetabek dirasa lebih tinggi dibandingkan dengan UMR di Wonosobo. Selain itu, biaya sekolah dan biaya kebutuhan sehari-hari di Wonosobo juga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan di Jabodetabek.

Di Wonosobo, Ros menjaga orangtua suami. Ia masih tinggal di rumah mertuanya. Ia memiliki usaha katering kecil-kecilan untuk membantu penghasilan suami.

"Waktu itu belum mapan banget. Tempat tinggal juga masih fasilitas dari tempat kerja suami. Misalkan bawa keluarga juga kita tidak enak dengan yang lainnya. Kan, namanya di kota besar, biayanya juga lebih besar," cerita Ros.

Meski berjauhan, komunikasi Gatra dan ayahnya tetap terjalin dengan baik. Dalam satu hari, Ros tidak bisa menghitung berapa kali ponselnya berdering sebagai notifikasi panggilan video dari suaminya. Suami Ros intens sekali memantau perkembangan kegiatan anaknya setiap hari walau biasanya dibatasi hingga pukul 19.00.

Sementara ketika pulang ke Wonosobo, suami Ros selalu berusaha menciptakan *quality time* bersama sang anak. "Misalkan, 'Ayo, mau makan di mana. Ayo, mau rekreasi ke mana.' Biasanya ia wujudkan apa yang anak inginkan," ujar Ros.

Meski lebih banyak waktu bersama Gatra, Ros dan suami saling berbagi peran dalam pengasuhan anak. Ros mengantar jemput Gatra ke sekolah dan juga menemani setiap proses belajar Gatra di rumah. Sementara jika ada kesulitan dalam pembelajaran, suami Ros bertanggung jawab dengan biaya les anaknya.

"Kalau saya tidak bisa, biasanya saya kompromi sama ayahnya. Suami saya memberi solusi, misalnya anak tidak mampu dalam pembelajaran, dia lebih mengarahkan agar anaknya ikut les," lanjut Ros.

Untuk menambah wawasan tentang pengasuhan anak, tidak jarang Ros mengikuti pengajian bersama ibu-ibu yang lain. Menurut Ros, hal itu penting karena ia paham bahwa ia mengurus anak secara fisik seorang diri. Ajaran tentang pola *parenting* dari pengajian dapat menjadi referensi baru baginya dalam mendidik anak yang kini semakin beranjak dewasa.

(FRD/PUT/XNA)

Dilema antara Kepentingan Politik dan Meritokrasi

Pengelolaan birokrasi pemerintah daerah berada dalam tarikan menjaga stabilitas sosial, profesionalisme pelayanan publik melalui meritokrasi, dan mengakomodasi politik lokal.

Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintah daerah di Indonesia kerap menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dan realitas politik. Meski sistem meritokrasi menjadi cita-cita reformasi birokrasi nasional, penerapan sistem ini tak berjalan mudah.

Sistem meritokrasi aparatur sipil negara (ASN) adalah kebijakan manajemen ASN yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas tanpa diskriminasi terhadap latar belakang apa pun. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) kerap menyebut pentingnya sistem ini di pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu sasaran pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 adalah terciptanya ASN yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit.

"Sistem merit bukan sekadar agenda, melainkan juga prinsip dasar dalam transformasi ASN. Implementasinya berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja ASN," kata Menpan dan RB Rini Widyantini pada Penyampaian Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah 2024, seperti dikutip dari laman Kemenpan dan RB, Selasa (7/10/2025).

Meskipun demikian, Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik sekaligus dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai penerapan sistem meritokrasi tidak mudah.

"Kita ingin ada meritokrasi, tetapi kepentingan politik daerah kuat dan terdapat tantangan afirmasi pada daerah-daerah tertentu," katanya dalam diskusi "Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah" di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10).

Ia melihat ada tiga kecenderungan pengelolaan birokrasi pemerintah daerah, yakni menjaga stabilitas sosial, menjamin profesionalisme pelayanan publik melalui sistem meritokrasi birokrasi, dan mengakomodasi realitas politik lokal.

"Kalau di Pulau Jawa sudah selesai. Namun, di daerah di luar Jawa, terutama di daerah timur, sistem meritokrasi sering dianggap sebagai praktik diskriminasi (terhadap masyarakat)," ujarnya.

Dengan adanya tuntutan afirmasi terhadap putra-putri asli daerah, sistem meritokrasi kerap tak berjalan maksimal. Kondisi ini kian menantang mengingat posisi ASN di sejumlah daerah menjadi harapan dan sumber penghidupan sehingga dapat memunculkan konflik.

"Menjadi persoalan ketika seleksi jabatan pemerintah daerah berbasis meritokrasi sudah selesai, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan preferensi kepala daerah. Bahkan, posisi staf di daerah pun sering diutak-atik karena pertimbangan politik," tambahnya.

Kelihaian pemerintah daerah dalam mengatur mana yang politis dan mana yang *merit-based*, menurut dia, menjadi tantangan. Untuk itu, diperlukan formula kelembagaan yang menjembatani kepentingan politik, prinsip meritokrasi, dan kebutuhan stabilitas sosial.

"Salah satu opsi adalah meniru negara maju, di mana jabatan politik, misalnya posisi eselon 1-2 bisa bersifat politis, tetapi staf di bawahnya jangan diganggu," ujarnya.

Struktur organisasi pemerintahan di Indonesia juga dinilai masih sangat simetris dan berpijak pada pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan perbedaan geografis, sosial, ataupun budaya daerah. Akibatnya, banyak pemerintah daerah kesulitan merespons kebutuhan warganya secara efektif.

Manajemen talenta

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha memperkuat sistem manajemen talenta ASN.

Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Jabar Nurhakim Ramdani Fauzian menegaskan pentingnya membangun sistem pencarian dan penempatan talenta ASN yang efektif dan efisien serta dukungan regulasi berkelanjutan.

Berbagai langkah kerja diambil Pemprov Jabar untuk memastikan sistem meritokrasi dan transformasi birokrasi berjalan. Misalnya, untuk memetakan potensi ASN dalam proses seleksi dan perekrutan pegawai negeri sipil, digunakan sistem *profiling* dan *people analytics*. Di sistem itu, setiap pegawai dinilai berdasarkan prestasi, riwayat kerja, disiplin, pendidikan, dan preferensi karier.

"Ada 39 indikator profil yang kami gunakan. Dari hasil *profile matching*, sistem secara otomatis menempatkan mereka dalam antrean ketika ada jabatan yang kosong," kata Nurhakim.

Setelah pemetaan, tiga calon terbaik yang memenuhi kriteria akan diusulkan kepada Gubernur Jabar untuk dipertimbangkan. Gubernur memilih berdasarkan kesesuaian kompetensi sekaligus faktor *chemistry*.

"Gubernur punya *privilege* dalam memilih, tetapi pilihan itu dilakukan dari kandidat yang sudah melalui proses seleksi dan penilaian berbasis data," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga telah menerapkan *career coaching* untuk membantu pegawai memahami posisi dan capaian kinerja yang diharapkan. Sistem monitoring yang transparan dan terintegrasi dengan audit dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kemenpan dan RB juga menjadi instrumen penting dalam meminimalkan intervensi politik.

"Dengan sistem yang kuat dan audit yang rutin, intervensi politik bisa dibatasi. Pencarian talenta tetap kami akomodasi, tetapi harus memenuhi kualifikasi," ujarnya.

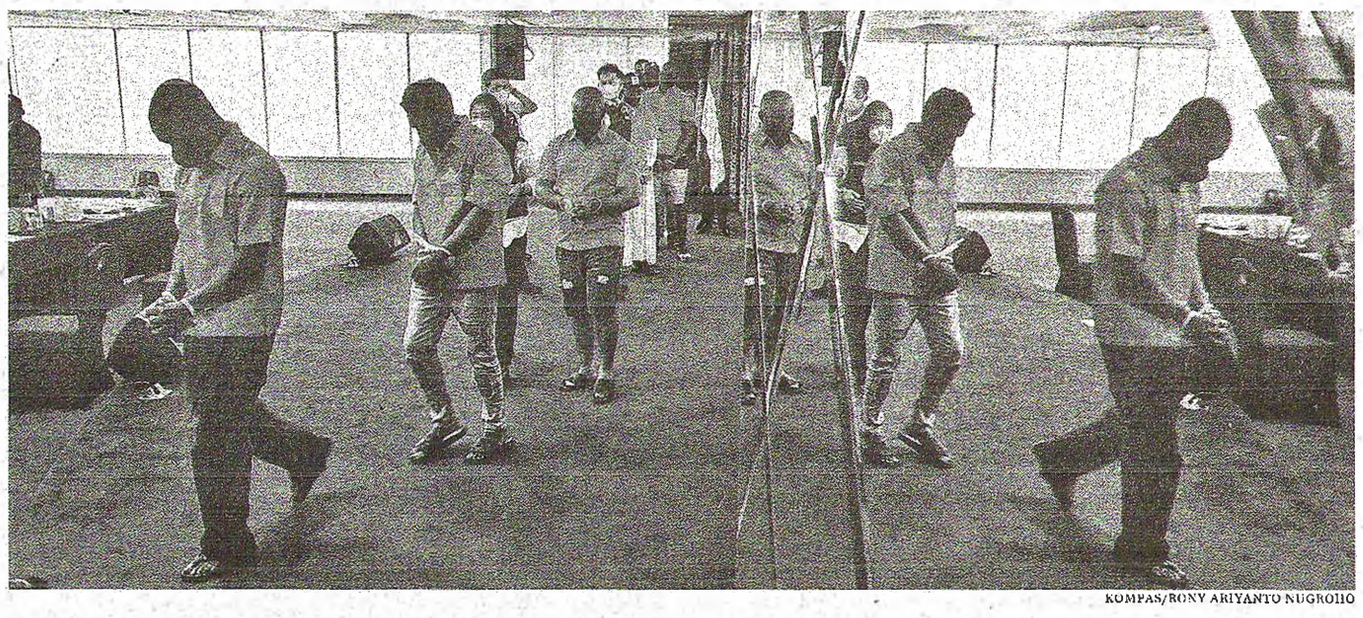
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah sangat bergantung pada faktor kepemimpinan kepala daerah. Kepala daerah yang memiliki visi yang kuat dan mampu mendorong perubahan birokrasi akan lebih berhasil meningkatkan kinerja pelayanan publik.

"Ada daerah yang cukup baik dalam urusan pelayanan publik karena pemimpinnya mampu melibatkan masyarakat dan mendorong perubahan di birokrasi," ujarnya.

Kepemimpinan kepala daerah, menurut dia, menjadi faktor utama dalam praktik desentralisasi. Meski faktor kelembagaan, sumber daya manusia, dan transformasi digital turut memengaruhi, kepemimpinan tetap menjadi penggerak utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif.

(DENTY PIAWAI NASTITIE)

Warga Asing Tertangkap dalam Operasi Keimigrasian



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana para warga negara asing (WNA) bermasalah digiring dalam ekspos penangkapan mereka di Gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Rabu (8/10/2025). WNA bermasalah ini terjaring dalam Operasi Wiraspada 2025 pada 3-5 Oktober 2025. Dalam operasi ini, Ditjen Imigrasi menangkap 196 warga asing yang menyalahgunakan visa, *overstay*, serta menjadi investor dan sponsor fiktif. Kasus ini diungkap dalam operasi di Jabodetabek, Maluku Utara, dan Bali.

BURON TERSANGKA KORUPSI

Pencabutan Paspor untuk Batasi Ruang Gerak

JAKARTA, KOMPAS — Pencabutan paspor dua buron kasus korupsi, yakni Riza Chalid dan Jurist Tan, ditujukan untuk membatasi ruang gerak mereka di luar negeri. Meski paspornya dicabut, keduanya tetap warga negara Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuldi Yusman mengatakan, paspor Jurist Tan, tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook, dicabut pada 22 Juli 2025. Adapun paspor Riza Chalid, tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah, dicabut pada 11 Juli 2025.

Paspor dicabut berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus itu. Pencabutan paspor dilakukan secara sistem. Artinya, paspor fisik masih dipegang oleh keduanya.

"Kami sudah bersurat kepada Dirjen Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan kepada mereka bahwa paspor MRC (Muhammad Riza Chalid) sudah dicabut secara kesisteman. Untuk itu, diminta kepada mereka menyampaikan apabila memang, misalnya, Riza Chalid ada di Malaysia," kata Yuldi, Rabu (8/10/2025).

Ia menegaskan bahwa keduanya masih warga negara Indonesia. Konsekuensi hukum dari pencabutan paspor itu lebih agar pemerintah dari negara tempat keduanya diduga bersembunyi diminta meningkatkan pengawasan. Untuk Riza Chalid, misalnya, karena paspornya sudah dicabut, seharusnya izin tinggalnya di Malaysia pun bisa dibatalkan.

Informasi yang diperoleh Kementerian Imipas, saat ini keduanya hanya memegang satu paspor Indonesia.

Lebih tepat ditarik

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penarikan paspor kedua buron tersebut tidak serta-merta membuat mereka nirkewarganegaraan atau *stateless*. Ketentuan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di dalam UU Keimigrasian dijelaskan, penarikan paspor dapat dilakukan kepada pemiliknya saat berada di dalam atau luar wilayah Indonesia dalam hal pemiliknya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat lima tahun atau pemiliknya masuk dalam *red notice* Interpol. Hal lain adalah apabila pemegangnya masuk dalam daftar pencegahan.

"Di dalam UU Keimigrasian, orang yang terkena sangkaan pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun itu paspornya bukan dicabut, melainkan ditarik. Konsekuensinya, paspor nanti diinformasikan ke kantor imigrasi seluruh dunia bahwa paspor itu ibaratnya tidak berlaku lagi karena sudah ditarik," katanya.

Konsekuensi lainnya, ruang gerak pelaku kejahatan menjadi terbatas. Ruang gerak mereka hanya terbatas di negara tempat mereka tinggal. Ketika ingin keluar dari negara itu, mereka akan terdeteksi oleh sistem imigrasi sebagai orang yang telah ditarik paspornya sehingga tidak bisa ke luar negeri.

"Bahkan, mungkin bisa dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian karena ada di negara tersebut tanpa ada dokumen yang sah," katanya.

Adapun untuk kewarganegaraan seseorang, lanjut Hikmahanto, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam kaitan ini, Riza Chalid dan Jurist Tan tidak otomatis *stateless* karena belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 23 undang-undang itu. (DEA)

PENGUMUMAN

SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI
BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN
MASA JABATAN 2026-2031

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memastikan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel dan profesional, sesuai Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2025 dan 105/P Tahun 2025, Panitia Seleksi membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik Indonesia yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik untuk mengikuti proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2026-2031. Pendaftaran dibuka pada tanggal 14 - 16 Oktober 2025.

Informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran serta jadwal pelaksanaan seleksi dapat diakses melalui laman resmi *https://seleksidewasdireksibpjs.djsn.go.id*.

Jakarta, 9 Oktober 2025

Ketua Panitia Seleksi
Calon Anggota Dewas dan Direksi
BPJS Kesehatan

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Ketua Panitia Seleksi
Calon Anggota Dewas dan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan

ttd.

Indah Anggoro Putri

Tersangka Suap Pemanfaatan Hutan



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tersangka kasus suap izin pemanfaatan kawasan hutan, Djunaidi, menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Direktur Utama PT Paramita Mulia Langgeng itu menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan di PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V yang merupakan anak perusahaan Perhutani.

KEHIDUPAN SOSIAL

Biaya Murah, Ekspatriat Minati Tinggal di Indonesia

Kurang dari tiga bulan, tahun 2025 segera berganti ke tahun 2026. Bagi para ekspatriat atau Anda yang berencana pindah ke luar negeri, ada baiknya memperhatikan pemeringkatan negara terbaik untuk tinggal menurut kacamata ekspatriat.

Setiap tahun, InterNations, komunitas ekspatriat, menerbitkan laporan Expat Insider, salah satu studi terlengkap tentang kehidupan di luar negeri. Studi ini dilakukan karena lebih banyak orang sekarang tinggal di luar negara asal mereka.

BBC edisi 23 September 2025—mengutip Laporan Migrasi Dunia—memberitakan, saat ini 3,6 persen populasi global dianggap sebagai migran internasional. Pindah ke luar negeri membawa tantangan sekaligus keuntungan.

Laporan InterNations menawarkan gambaran tentang tempat tinggal terbaik untuk pekerjaan, gaya hidup, dan keterjangkauan. Pada pemeringkatan 2025 oleh InterNations, dengan memanfaatkan masukan dari 10.000 lebih ekspatriat yang mewakili 172 negara, Indonesia berada di peringkat ke-8 negara terbaik untuk ditinggali bagi ekspatriat.

Pada pemeringkatan 2025, lima negara Asia menguasai separuh daftar 10 besar. Dimulai dari Thailand (peringkat ke-4), Vietnam (ke-5), China (ke-6), Indonesia (ke-8), dan Malaysia (ke-10). Kelima negara Asia itu, disebutkan Kathrin Chudoba, Pemimpin Redaksi InterNations, dalam pemberitaan *Forbes* edisi 7 September 2025, sebagai bintang baru.

Satu hal yang menyatukan para ekspatriat di kelima negara Asia tersebut adalah kepuasan mereka terhadap keuangan pribadi. Pada indeks ini, lima negara Asia itu masuk 10 teratas, terentang dari Vietnam yang berada di peringkat ke-1 hingga Malaysia di peringkat ke-9.

"Negara-negara ini menonjol dalam hal keuangan pribadi, semuanya berada di 10 besar untuk keterjangkauan dan nilai uang," kata Chudoba.

Sama seperti 2024, pada 2025 ini aspek yang menarik bagi ekspatriat adalah perumahan. Para ekspatriat merasa akses pada perumahan mudah dijangkau dan mudah ditemukan di lima negara Asia itu.

Yang paling bervariasi adalah Indeks Kualitas Hidup. Pada indeks ini, China ada di peringkat ke-6, sementara Indonesia ada di peringkat ke-40. Tiga negara lainnya, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, ada di antara peringkat itu.

Namun, yang pasti, para ekspatriat tidak akan kehabisan pilihan kuliner dan tempat makan. Untuk faktor ini, kelima negara tersebut berada di urutan 10 teratas. Secara keseluruhan, ekspatriat yang tinggal di lima negara Asia ini merasa bahagia.

Keunggulan Indonesia

Para ekspatriat yang mengikuti survei InterNations menilai keunggulan Indonesia terletak pada biaya hidup di Indonesia yang rendah, keramahan penduduknya, dan keseimbangan kehidupan kerja yang baik.

Pada indeks bekerja di luar negeri untuk ekspatriat, Indonesia ada di peringkat ke-9. Untuk indeks ini para ekspatriat sangat puas dengan keseimbangan kehidupan kerja dan jam kerja yang singkat. Indonesia juga menempati peringkat pertama untuk kepuasan kerja dan peluang karier pribadi ekspatriat secara keseluruhan pada 2024.

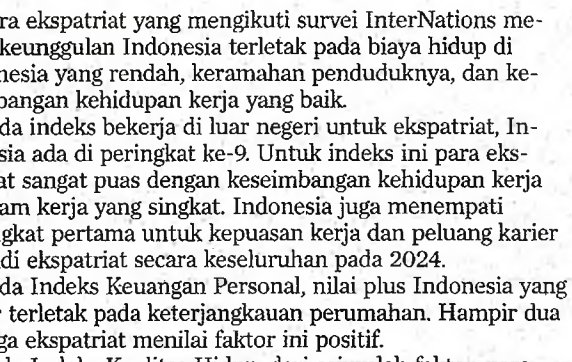
Pada Indeks Keuangan Personal, nilai plus Indonesia yang besar terletak pada keterjangkauan perumahan. Hampir dua pertiga ekspatriat menilai faktor ini positif.

Pada Indeks Kualitas Hidup, dari sejumlah faktor, para ekspatriat merasa betah, mudah beradaptasi dengan budayanya, dan merasa diterima di Indonesia. Para responden setuju bahwa masyarakat Indonesia ramah terhadap penduduk asing.

Selain negara-negara yang dinyatakan terbaik, laporan juga menyebutkan negara-negara yang peringkatnya terus merosot. Amerika Serikat dikeluhkan karena infrastruktur yang buruk bagi pesepeda dan pejalan kali. Akses pada layanan kesehatan juga dinilai buruk. Sementara itu, meski dinilai memiliki kehidupan yang berkualitas, Eropa dikeluhkan karena berbiaya hidup tinggi dan adaptasi sosial yang rumit.

Dari pemeringkatan, kata Chudoba, terungkap bahwa negara-negara terbaik ditentukan oleh realitas sehari-hari. Pertimbangan keuangan menjadi kian relevan. (HLN)

KILASAN KAWAT SEDUNIA



Calvert

Kalau nasib sudah beruntung, di saat badan lelah pun rezeki menghampiri. Demikian dialami seorang pria warga Distrik Calvert, Negara Bagian Maryland, Amerika Serikat. Ia memenangi lotre yang dipasang seusai berolahraga di sebuah *gym*. Dalam berita yang diunggah di laman UPI.com, Selasa (7/10/2025), dilaporkan, pria mujur yang tidak disebutkan namanya itu menang lotre pacuan kuda virtual sebesar 31.138 dollar AS atau hampir Rp 500 juta. Awalnya, saat perjalanan pulang dari *gym*, ia mampir ke kedai 7-Eleven di Boulevard Baltimore Annapolis di Glen Burnie. Di kedai itu ia membeli beberapa lembar lotre. Dia memasang taruhan di Superfecta Box dengan angka 9, 7, 11, dan 12. Angka yang dipilihnya bukan kebetulan. Pria itu disebutkan sudah memasang urutan angka tersebut selama bertahun-tahun. Kali ini dewi keberuntungan menghampirinya. Tak disangka, dari hasil pacuan kuda virtual, muncul deretan angka 7, 9, 11, dan 12. Kalau saja angka yang keluar sesuai urutan angka yang dipasang pria tersebut, dia akan mendapat hadiah lebih besar, yakni 200.000 dollar AS atau Rp 3,3 miliar. Meski demikian, pria itu tetap bersyukur. Dia akan menggunakan uang hadiah tersebut untuk membayar berbagai tagihan dan berlibur bersama keluarga. (ONG)



SUPRIYANTO


AP PHOTO/CAISA RASMUSSEN

Greta Thunberg dan sejumlah aktivis yang turut dalam Global Sumud Flotilla hadir dalam konferensi pers bersama yang digelar oleh Gerakan Global untuk Gaza di pusat kota Stockholm, Swedia, Selasa (7/8/2025).

Greta Thunberg Minta Dunia Tetap Fokus ke Gaza

Aktivis belia Greta Thunberg (22) mengatakan, penyiksaan terhadap aktivis GSF tidak sebanding dengan penderitaan rakyat Palestina.

STOCKHOLM, RABU — Aktivis Greta Thurnberg (22) mengungkapkan, dirinya dan aktivis lain yang mengikuti armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla atau GSF menjadi sasaran penyiksaan selama di tahanan Israel. Bentuk penyiksaan itu, antara lain, ia sulit mendapat air bersih dan tahanan lain susah mendapatkan pengobatan.

Namun, aktivis asal Swedia itu enggan untuk mengelaborasi lebih jauh. Ia justru meminta dunia untuk tetap fokus pada Jalur Gaza. "Secara pribadi, saya tidak ingin menceritakan apa yang saya alami karena saya tidak ingin menjadi berita utama 'Greta telah disiksa' karena bukan itu ceritanya di sini," katanya dalam konferensi pers di Stockholm, Selasa (7/10/2025) waktu setempat. Thunberg menambahkan, pengalaman mereka tidak sebanding dengan apa yang dirasakan warga Palestina di Gaza setiap hari.

Pada Sabtu (4/10), beberapa aktivis Swedia dan negara lain mengatakan, Israel memperlakukan Thunberg dengan kasar. Mereka mendorong tubuhnya, memaksanya mencium bendera Israel, dan mengenakan bendera itu selama masa penahanan.

Thunberg dideportasi bersama 160 orang lainnya ke Bandara Internasional Eleftherios Venizelos, Athena, Senin (6/10). Setelah mendarat, ia sudah menyatakan, pengalaman selama di Israel bukan hal yang penting.

Thunberg bersama 470-an aktivis dari 50 negara menjadi bagian dari armada kapal sipil GSF yang mencoba menembus blokade laut Israel guna membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza. Selama 1-3 Oktober 2025, militer Israel menangkap 479 aktivis GSF.

Seiring kepulangan ratusan aktivis, mereka saling memperkuat kesaksian bahwa Israel melakukan kekerasan kepada mereka.

Pencegatan kedua

Israel juga kembali mencegat sekelompok kapal dari Koalisi Armada Kebebasan (FFC) yang berusaha mengirim bantuan ke Gaza, Rabu (8/10). Ini merupakan pencegatan kedua dalam sepekan terakhir setelah pencegatan GSF. Kapal dan penumpang armada tersebut selamat. Israel akan mendeportasi mereka.

"Militer Israel membajak armada kemanusiaan secara ilegal. Para peserta adalah para pekerja kemanusiaan, dokter, dan jurnalis dari seluruh dunia. Mereka telah dibawa tanpa persetujuan dan ditahan dalam kondisi yang tidak diketahui. Militer Israel tidak memiliki yurisdiksi hukum atas perairan internasional," bunyi pernyataan FFC.

Kementerian Luar Negeri Israel tidak menanggapi permintaan komentar terkait dengan penyiksaan aktivis. Sebelumnya, Israel telah berulang kali membantah.

"Semua tahanan diberi akses ke air, makanan, dan toilet. Akses mereka ke penasihat hukum tidak ditolak dan semua hak hukum mereka ditegakkan," ujar seorang juru bicara Kemenlu Israel, pekan lalu.

Penangkapan aktivis dan perlakuan kasar Israel telah memicu kritik dari sejumlah negara, termasuk Pakistan, Turki, dan Kolombia. Yunani mengirim protes tertulis.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Rabu, mengecam keras pencegatan GSF. Dia juga menuntut agar aktivis Malaysia dibebaskan. Dua aktivis Malaysia sudah dideportasi.

Angka Gaza

Tanggal 7 Oktober 2025 perang Hamas-Israel tepat berlangsung dua tahun di Jalur Gaza. Data terbaru menggambarkan dampak mengerikan terhadap rakyat Palestina akibat serangan Israel.

Media Associated Press telah merangkum data dari Kementerian Kesehatan Gaza, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dan lembaga lain terkait perang di Gaza per September 2025.

Sekitar 11 persen penduduk Gaza telah terbunuh atau terluka. Secara rinci, lebih dari 67.000 orang tewas dan 170.000 orang terluka.

Jumlah korban tewas mencakup 18.430 anak-anak, 9.735 perempuan, dan 4.429 warga lansia. Jumlah ini belum termasuk 6.000 orang yang terkubur di bawah reruntuhan dan 460 kematian akibat malanutrisi.

Selain itu, lebih dari 40.000 korban juga mengalami luka yang mengubah hidup.

"Sudah dua tahun kami hidup dalam ketakutan, kengerian, pengungsian, dan kehancuran," ujar Mohammed Dib (49), warga Palestina di Gaza, kepada Reuters edisi Rabu (8/10).

Sekitar 2 juta warga, yakni 90 persen dari total populasi, menjadi pengungsi. Mereka berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain setiap beberapa bulan untuk menghindari serangan. Tenda kumuh tersebar di sebagian besar wilayah selatan Gaza. Lebih dari 500.000 orang menghadapi kelaparan yang sangat parah.

Pusat satelit PBB menyatakan, setidaknya 102.067 bangunan telah hancur, termasuk sekolah, kampus, klinik medis, masjid, rumah kaca, dan rumah warga. Dengan demikian, 78 persen bangunan dan 92 persen rumah rusak atau hancur. Banyak lahan pertanian hancur lebur, sementara area pemakaman penuh.

Para ahli PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyebutkan aksi Israel merupakan genosida. Tel Aviv terus membantah.

Sementara itu, negosiasi antara Hamas dan Israel di Mesir masih berlangsung. Negosiasi memberi secercah harapan perang segera berakhir.

(AP/AFP/REUTERS/LSA)

AMERIKA SERIKAT

Perseteruan Politik Membuat Repot Rakyat AS

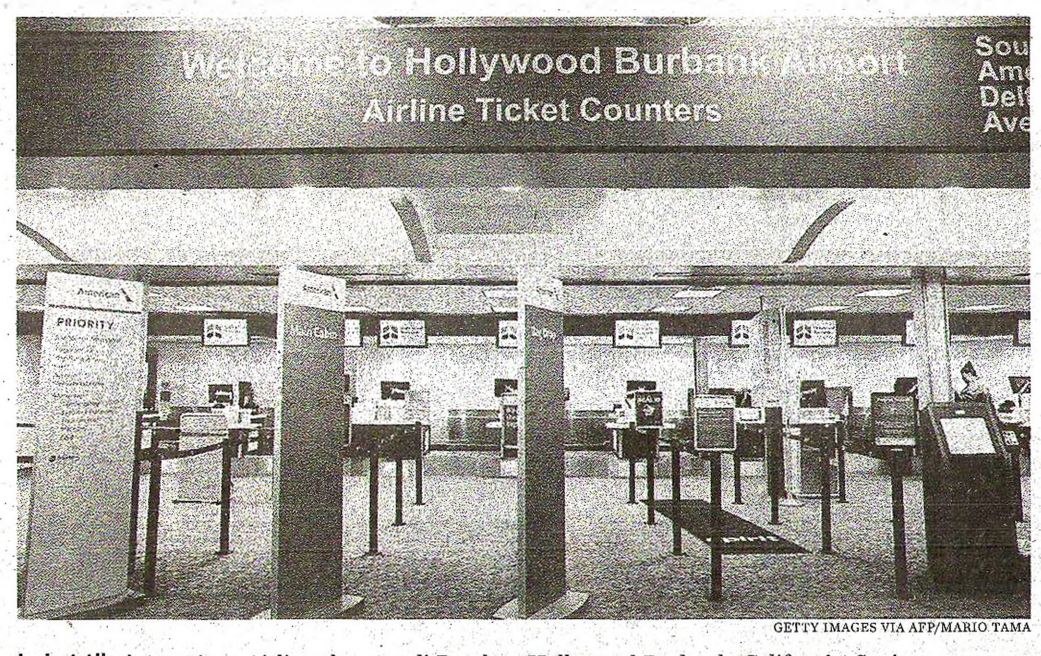
WASHINGTON, SELASA — Penghentian layanan pemerintah federal Amerika Serikat berdampak pada penundaan banyak penerbangan. Hal ini karena banyak bandara kekurangan petugas. Sejumlah pegawai memilih tak masuk kerja karena pemerintah belum membayar gaji mereka.

Badan Penerbangan Federal (FAA) AS mengumumkan penundaan penerbangan untuk hari kedua berturut-turut, Selasa (7/10/2025) waktu setempat. Sedikitnya 3.000 penerbangan ditunda. Bandara yang terdampak di antaranya Houston, Nashville, Dallas, Chicago O'Hare, dan Newark.

Sebelumnya, dua program bantuan makanan di AS terancam. Sekitar 43,8 juta penerima berpotensi kehilangan subsidi makanan.

Aktivitas masyarakat masih akan terus terganggu apabila Partai Republik dan Partai Demokrat masih belum bersepakat tentang anggaran.

Penghentian layanan pemerintah federal AS itu sudah memasuki hari ke-7. Namun, belum ada tanda-tanda kedua partai menyepakati anggaran. Mereka malah saling tuding dan menyalahkan.



GETTY IMAGES VIA AFP/MARIO TAMA

Loket tiket American Airlines kosong di Bandara Hollywood Burbank, California, Senin (6/10/2025). Badan Penerbangan Federal (FAA) menyatakan bahwa bandara tersebut saat ini tidak memiliki pengatur lalu lintas udara menyusul penghentian layanan (*shutdown*) oleh pemerintah federal AS.

Di Bandara Chicago O'Hare, FAA mengurangi lalu lintas udara sehingga penerbangan tertunda 30-41 menit.

Di Bandara Hollywood Burbank, California Selatan, menara pengawas mati selama beberapa jam. Penerbangan tertunda hingga rata-rata 2,5 jam.

Saat seorang pilot yang akan lepas landas menghubungi menara pengawas, ia mendapat jawaban: "Menara ditutup karena kekurangan staf."

Menteri Perhubungan AS Sean Duffy memastikan wilayah udara AS tetap aman meski kekurangan staf pengatur lalu lintas. Solusi sementara adalah memperlambat lalu lintas udara untuk menjaga keselamatan.

Bekerja tanpa gaji

Sekitar 13.000 pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) harus bekerja selama penghentian layanan pemerintah di AS itu. Namun, mereka tidak dibayar.

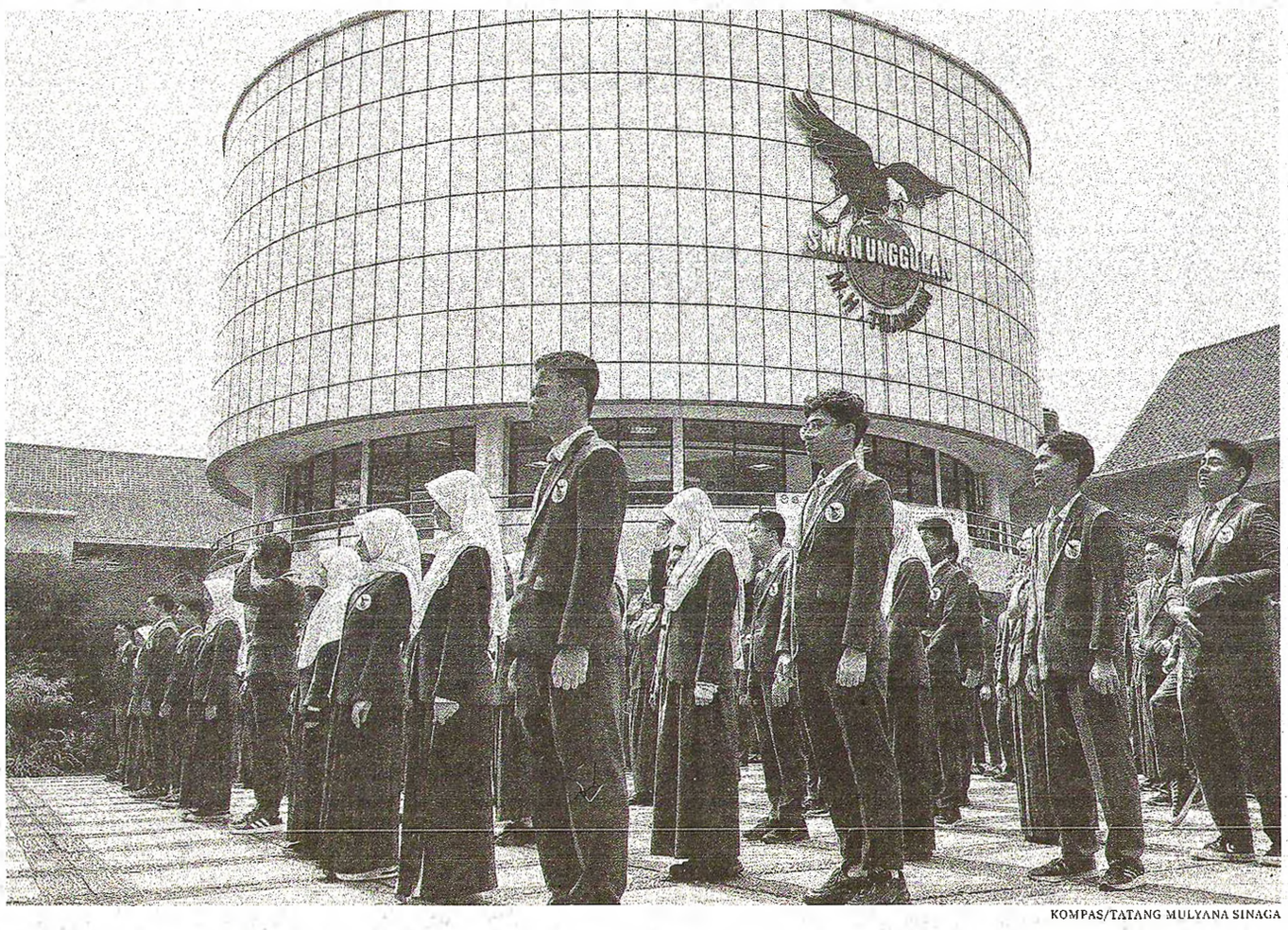
Gaji mereka dijadwalkan baru dibayar sebagian pada 14 Oktober 2025. Itu pun untuk pekerjaan yang dilakukan sebelum pemerintah menghentikan layanan.

Johnny Jones, sekretaris-bendahara cabang Federasi Karyawan Pemerintah Amerika yang mewakili pekerja TSA, mendesak Republik dan Demokrat segera mencapai kesepakatan.

Para pekerja bandara juga butuh hidup, membayar segala macam tagihan, termasuk tunjangan anak dan cicilan. Jika tak masuk kerja terlalu lama, mereka berisiko diberhentikan. Bantuan makanan hingga tiket bus telah diupayakan bagi pegawai yang tak digaji itu.

Perbedaan pendapat Republik dan Demokrat ada pada Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Demokrat ingin bantuan premi bagi jutaan warga itu diperpanjang. Republik bersikeras bahwa sistem layanan kesehatan bersubsidi itu bermasalah dan harus dikurangi.

(REUTERS/AFP/AP/LUK)



KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Siswa SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Jakarta, berbaris di halaman sekolah, Rabu (8/10/2025). SMA itu menjadi salah satu sekolah yang ditransformasi menjadi Sekolah Garuda.

Sekolah Garuda Ditarget Cetak SDM Unggul

Pemerintah akan membentuk 80 Sekolah Garuda transformasi dan 20 Sekolah Garuda baru hingga 2029. Target lulusannya dipatok menjadi SDM unggul.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperkenalkan Sekolah Garuda yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (8/10/2025). Sebanyak 12 sekolah di sejumlah daerah ditransformasi menjadi Sekolah Garuda. Sementara empat Sekolah Garuda baru dibangun dengan biaya sekitar Rp 200 miliar per unit.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Sekolah Garuda menjadi wahana bagi siswa yang mempunyai keinginan kuat menjadi peneliti dan industrialis unggul. Sekolah itu diharapkan bisa mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul sehingga mampu bersaing dengan SDM dari negara lain.

"Jadi, harapannya anak-anak dari SMA Garuda, baik yang transformasi maupun yang baru, bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi unggulan dunia, tentunya juga di Indonesia," ujarnya dalam pengenalan Sekolah Garuda di SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Jakarta, Rabu.

Selain SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, sekolah lain yang ditransformasi menjadi Sekolah Garuda adalah SMAN 10 Fajar Harapan (Aceh), SMA Unggul Del (Sumatera Utara), MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), SMA Cahaya Rancamaya (Jawa Barat), dan SMA Taruna Nusantara (Jawa Tengah). Selain itu, ada juga SMA Pradita Dirgantara (Jawa Tengah), SMAN 10 Samarinda (Kalimantan Timur), SMAN Banua BBS (Kalimantan Selatan), MAN Insan Cendekia Gorontalo (Gorontalo), SMAN Siwalima Ambon (Maluku), dan SMA Averos Sorong (Papua Barat Daya).

Sementara empat Sekolah Garuda yang baru akan dibangun berada di Belitung Timur (Bangka Belitung), Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Bulungan (Kalimantan Utara). Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda transformasi dan 20 Sekolah Garuda baru.

Brian menuturkan, anggaran dan pembinaan Sekolah Garuda cukup beragam. Untuk Sekolah Garuda transformasi, pihaknya hanya mendukung beberapa aspek untuk meningkatkan kesiapan para siswa menembus perguruan tinggi unggulan dunia.

"Sehingga nantinya para siswa itu akan bisa menimba ilmu dari tempat-tempat yang memang memiliki keunggulan. Kurikulumnya enggak beda. Kami hanya menambahkan saja supaya mereka lebih siap berkompetisi dengan sesama lulusan SMA dari negara lain," ucapnya.

Menurut Brian, sejumlah sekolah unggulan yang ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda memiliki fasilitas cukup baik. Pihaknya akan memberikan sejumlah pelatihan untuk membekali siswa menembus perguruan tinggi terbaik sesuai minatnya.

"Untuk yang sekolah baru, karena harus membuat baru (membangun dari awal), itu (anggaran) sekitar Rp 200 miliar setiap sekolah. Targetnya mulai tahun depan sudah menerima siswa untuk empat sekolah yang baru dibangun. Kalau untuk yang (Sekolah Garuda) transformasi sudah berjalan," katanya.

Brian menambahkan, 20 Sekolah Garuda baru dibangun di daerah yang minim atau belum mempunyai SMA unggul. Sementara penetapan Sekolah Garuda transformasi mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari kelengkapan fasilitas, kualitas guru, hingga portofolio sekolah. "Yang kami tetapkan tahun ini sudah ada 16 (Sekolah Garuda). Mungkin tahun depan bertambah lagi menjadi 30 sekolah," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pendidikan unggulan di seluruh pelosok Indonesia. Harapannya, semakin banyak anak Indonesia dari seluruh pelosok negeri bisa menembus kampus-kampus terbaik dunia.

"Ini cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif. Meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi dari penjuru negeri," ujar Stella.

Minat STEM rendah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, Sekolah Garuda merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk melahirkan generasi yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, khususnya sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Menurut dia, kemampuan STEM sangat dibutuhkan dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

"Apalagi, sekarang ini kita melihat adanya gejala minat generasi muda belajar STEM ini cukup rendah. Oleh karena itu, dengan program ini (Sekolah Garuda), kita berharap dapat melahirkan saintis di berbagai bidang, khususnya STEM, untuk bisa melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi yang ternama, baik di dalam maupun di luar negeri," tuturnya.

Sebelumnya, aktivis pendidikan Tamansiswa, Darmaningtyas, mengatakan, sejauh ini sudah banyak lulusan sekolah, baik swasta maupun negeri, yang bisa mendaftar ke universitas-universitas negara maju tanpa harus mengikuti matrikulasi. Menurut dia, transformasi sekolah yang sudah ada menjadi Sekolah Garuda lebih realistis ketimbang mendirikan sekolah baru.

Sebab, investasi yang diperlukan tidak terlalu besar. Anggaran pendidikan pun bisa dihemat supaya alokasi untuk sektor pendidikan yang lain, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tetap tersedia.

Kepala SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Sarjono, mengatakan, transformasi menjadi Sekolah Garuda akan memperkuat pendampingan dari Kemendiktisaintek, khususnya dalam hal manajemen sekolah, guru, dan peminatan siswa. Sementara kurikulum dan jumlah siswa yang diterima tidak berubah.

Setiap kelas atau tingkatan di sekolah tersebut terdiri atas tiga rombongan belajar. Setiap rombongan belajar terdiri atas 22 siswa. Lulusan sekolah itu telah diterima di perguruan tinggi sejumlah negara, seperti Australia, Jepang, dan Kanada.

"Setiap tahun, lulusan yang diterima di perguruan tinggi sekitar 30 persen. Dengan transformasi menjadi Sekolah Garuda, kami berharap jumlahnya meningkat paling tidak menjadi 40 persen," ucapnya.

(TAM/INA)

ASESMEN

Sebanyak 3,5 Juta Murid Ikut TKA untuk Pertama Kalinya

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 3,5 juta murid SMA atau sederajat di seluruh Indonesia akan menjalani tes kemampuan akademik atau TKA pada 1-9 November 2025. Persiapan teknis dimatangkan agar TKA yang digelar untuk pertama kalinya ini bisa berjalan lancar.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, total ada 3.518.167 murid dari 43.918 satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang mendaftar TKA. Sementara calon peserta sebanyak 4.178.627 murid.

Jenjang SMA menjadi penyumbang peserta terbesar dengan 1,75 juta calon peserta, diikuti oleh SMK sebanyak 1,59 juta peserta, dan madrasah aliyah (MA) sebanyak 506.942 peserta. Di samping itu, beberapa satuan pendidikan keagamaan dan khusus, seperti sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah agama Katolik, hingga sekolah luar biasa, juga mendaftar tahun ini.

"Dengan lebih dari 3,5 juta peserta, kita melihat semangat kolaborasi yang kuat dari sekolah, pemerintah daerah, hingga siswa. Inilah modal penting agar pelaksanaan TKA berjalan lancar di seluruh wilayah," kata Kepala BSKAP Toni Toharudin dalam keterangan pers, dikutip pada Rabu (8/10/2025).

Dari sisi moda pelaksanaan, ujar Toni, sebagian besar sekolah telah siap menyelenggarakan TKA secara digital. Sebanyak 67,9 persen sekolah akan melaksanakan TKA secara daring, 12,2 persen secara semidaring, sedangkan 19,9 persen masih dalam tahap finalisasi moda pelaksanaan.

"BSKAP bersama dinas pendidikan di seluruh daerah akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan teknis agar pelaksanaan TKA berlangsung tertib, lancar, dan sesuai jadwal," ujarnya.

Toni menegaskan bahwa TKA 2025 bukanlah sekadar ujian. TKA yang disebut-sebut sebagai ujian nasional versi baru ini bisa membantu sekolah dan murid memahami capaian sekaligus menjadi langkah maju menuju pendidikan Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkualitas.

Selain kesiapan infrastruktur dan teknis, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya nilai kejujuran dan integritas selama pelaksanaan asesmen. Sebab, TKA bukan semata-mata ajang memperoleh nilai, melainkan sarana belajar untuk menumbuhkan karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab serta nilai-nilai yang menjadi fondasi utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan berkarakter di Indonesia.

Peran guru

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani menambahkan, guru berperan penting dengan memberikan informasi yang benar dan dukungan emosional kepada muridnya serta memastikan kesiapan teknis TKA. Pemerintah akan menyiapkan pelatihan dan pendampingan agar pelaksanaan TKA berjalan optimal.

"Peran bapak-ibu guru menjadi sangat penting menjelang TKA karena yang paling mengenal karakter murid dan tahu cara terbaik mendampingi mereka. Melalui bimbingan yang konsisten dan dukungan moril, guru akan sangat membantu murid-murid kita menjalani TKA dengan percaya diri dan berintegritas," kata Nunuk.

Ia juga menegaskan, penyelenggaraan TKA bukan untuk memberdayakan atau menghukum guru. Jika nanti nilai TKA murid rendah, bukan berarti guru gagal. Namun, guru tetap harus memperbaiki strategi pembelajaran sebagai bentuk evaluasi.

Sementara untuk pengelola sekolah, hasil TKA bisa digunakan untuk pemetaan pembelajaran antarsekolah dan menjadi dasar penyusunan program remedial, pengayaan, atau penguatan kurikulum. Data ini juga bisa menjadi bahan diskusi obyektif dengan orangtua atau wali murid mengenai capaian akademik anaknya, bukan hanya berdasarkan rapor dari sekolah.

"Dalam jangka panjang, TKA akan membantu sekolah menjaga integritas penilaian pada nilai rapor agar selaras dengan kemampuannya. Jadi, bukan hanya pada murid dan guru saja," ucapnya.

Adapun rangkaian jadwal TKA bagi murid kelas akhir jenjang SMA/SMK dan sederajat dilaksanakan terlebih dahulu, mulai dari pendaftaran yang telah ditutup pada 5 Oktober.

Setelah itu, simulasi TKA pada 6-12 Oktober, gladi bersih pada 27-31 Oktober, pelaksanaan pada 1-9 November, penjadwalan ulang pada 17-23 November, dan pengolahan hasil pada 24 November 2025-3 Januari 2026. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, TKA dilaksanakan pada Maret 2026.

Indikator penilaian

Secara terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, TKA harus mendapat porsi yang sesuai dalam indikator penilaian Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Proses belajar murid sejak awal sekolah yang terukur dalam nilai rapor dan catatan prestasi akademik ataupun non-akademik tak boleh dikesampingkan (Kompas.id, 1/9/2025).

Selain itu, TKA yang hanya mengujikan tiga mata pelajaran dan dua mata pelajaran pilihan berpotensi membuat sekolah fokus mempersiapkan murid untuk belajar lima mata pelajaran yang akan diujikan dalam TKA. Ini bisa terjadi karena sekolah ingin muridnya mendapat nilai TKA baik demi masuk jalur SNBP ke perguruan tinggi negeri.

"Karena pasti psikologinya atau motivasi sekolah itu lebih tinggi agar anak-anaknya mendapatkan nilai TKA yang baik dan diterima melalui jalur prestasi atau SNBP," kata Satriwan.

Di sisi lain, kebijakan ini bisa membuat lembaga bimbingan belajar akan kembali menjamur karena para murid akan digembleng fokus mengejar nilai terbaik pada lima mata pelajaran yang diujikan dalam TKA. Artinya, biaya pendidikan yang ditanggung orangtua atau wali murid akan makin besar karena pendidikan dirasa tidak cukup di sekolah saja. (TIO)

Kampung Batik Kauman



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjung mendatangi Kampung Batik Kauman di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025). Kampung Kauman awalnya merupakan permukiman abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta yang bertugas sebagai pembuat pakaian untuk penghuni keraton tersebut. Kawasan itu ditetapkan sebagai kampung wisata sejak tahun 2006.

JAMBI CULTURAL FEST 2025

Satire dari Atas Panggung, Seniman Suarakan Kehancuran Lingkungan

Para seniman berikhtiar. Ramai-ramai mereka menggaungkan isu lingkungan ke dalam karya seni di atas panggung. Ada ajakan gerakan merawat Bumi yang menggugah kepedulian bersama.

Ikhtiar untuk masa depan Bumi disuarakan melalui karya satire para seniman asal Lampung, Jambi, Sumatera Barat, hingga Aceh. Mereka hadir di atas panggung Jambi Cultural Fest (JCF) 2025 di Taman Budaya Jambi (TBJ), Kota Jambi, Provinsi Jambi, 3-5 Oktober 2025.

Datang dari Lampung, koreografer Ahmad Susantri menjelma jadi harimau sumatera. Ia dikepung oleh jerat-jerat satwa dalam hutan. Tubuhnya meliuk tak beraturan, menyiratkan kegelisahan mendalam sang raja rimba. Saat melangkah, ia pun harus pelan-pelan dan waspada. Jika langkahnya tak awas, jerat satwa siap-siap menerkam kaki.

Penari yang akrab dipanggil Susan ini memberi judul karyanya *Terjerat*. "Karya ini lahir dari keprihatinanku atas kerusakan hutan dan konflik harimau dan manusia di Lampung," katanya.

Di Lampung Barat, ramai-ramai petani membuka hutan untuk menjadi kebun kopi. Geliat harga kopi di pasaran dunia kian membutakan mata. Alhasil, rumah harimau pun dijadikan kebun.

Kata Susan, keberadaan harimau di masa lalu dijaga dan dihormati sebagai leluhur sekaligus penjaga kehidupan. Saat manusia merangsek masuk kian dalam ke hutan, pertemuan dengan harimau jadi makin sering terjadi. Tak jarang timbul konflik yang berujung petaka.

Dalam setahun terakhir, konflik bahkan mengorbankan tujuh warga tewas. Ada harimau yang ditangkap dan dipindahkan. Kondisi itulah yang membuat miris hatinya. Namun, Susan tak ingin diam. Ia pun menawarkan bibit-bibit pohon untuk ditanam kepada ratusan pengunjung yang memenuhi TBJ.

"Kalau ingin bahagia, mari kita menanam pohon," ujarnya seraya disambut riuh para penonton yang berebut ingin mendapatkan bibit-bibit pohon.

Orang Rimba

Keprihatinan juga mengantarkan Tiara, koreografer asal Kabupaten Tebo, Jambi. Tahun lalu, ia mengangkat tema Candi Muaro Jambi yang digerogoti oleh batubara. Kali ini, Tiara mengangkat isu alih fungsi hutan dan nasib Orang Rimba yang terusir.

Di atas panggung, dua penari menangis di atas tumpukan kayu bekas tebangan. Serpihan kayu beterbangan. Bising deru mesin meraung-raung. "Ini menggambarkan kehidupan Orang Rimba yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada alam, tetapi kini hutan mereka sekarat," katanya.

Pada hari sebelumnya, koreografer Aceh, Bade Arrasyid, mengangkat permasalahan sampah yang memenuhi Danau Laut Tawar di Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Lewat karya tari eksperimental, tubuhnya terbenam di antara gunungan sampah plastik. Ia ingin membincangkan persoalan rusaknya keseimbangan ekologi di danau itu. "Saya ingin mengajak semua orang ikut mempertanyakan kembali, sepenting apa sebuah ekosistem itu dijaga," ujarnya.

Sementara itu, Ghozali Idham, penari yang dibesarkan dalam lingkungan adat Mentawai, mengangkat karya *Bit-bit* sebagai interpretasi atas keresahannya atas alam yang tak lagi berdamai serta harapan dan doa-doa.

"Karya ini sebagai bentuk respons terhadap keresahan saya melihat kondisi alam saat ini. Kalau tidak ada hutan, di mana kita cari roh, di mana kita cari obat, di mana kita cari makan, di mana kita cari kehidupan?" katanya.

Ia ingin menyuarakan kepada dunia bahwa hutan bukan sekadar pohon, melainkan napas dan kehidupan masyarakat Mentawai. "Setiap ranting adalah hikmah yang terukur, hutan bukan hanya sekadar pohon," ucapnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana telah memantik keprihatinan banyak pihak, tak terkecuali para seniman. "Dari atas panggung, kami ingin tak hanya menghibur, tetapi juga memberi pesan, menyuarakan keprihatinan ini," kata Ichalago, pemimpin produksi JCF 2025.

JCF 2025 mengusung tema "Harmoni Alam (Masyarakat Adat)". Selain tari dan teater, rangkaian JCF juga diisi pameran foto bertemakan masyarakat adat oleh Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Ada pula persembahan tari *Labubu*, tari *Jernang*, serta narasi dan video tentang suku Anak Dalam.

Menurut Ichal, sekitar 30 usulan karya bertema lingkungan dan masyarakat adat masuk dari seniman se-Sumatera. Panitia memilih empat koreografer—Susan, Tiara, Bade, dan Ghozali—yang dinilai paling menarik dan mewakili persoalan komunitas adat di Sumatera.

Catatan *Kompas* menyebut ekosistem Bukit Duabelas, ruang hidup Orang Rimba, menyusut dari 130.000 hektar menjadi 58.000 hektar dalam tiga dekade akibat alih fungsi hutan. Hilangnya rimba mengancam makna hidup komunitas adat itu yang memiliki ikatan kuat dengan alam, modal penting bagi pelestarian biodiversitas.

Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak Orang Rimba terpaksa hidup sebagai pengemis, pemungut sawit, ataupun pemulung. Upaya pemerintah baru sebatas penyediaan rumah serta layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, belum menyentuh kebutuhan utama mereka: ruang hidup yang lestari.

(IRMA TAMBUNAN)

TAJUK RENCANA

Belanja yang Masih Lambat

Dunia yang berubah cepat tak juga membuat kita belajar menyusun dan merealisasikan banyak hal dengan segera. Termasuk soal membelanjakan anggaran.

Perekonomian Indonesia triwulan II-2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan. Seperti biasa, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar pertumbuhan. Adapun belanja pemerintah porsinya tak sampai 10 persen, bahkan pertumbuhannya negatif.

Angka ini sedikit di atas pertumbuhan ekonomi periode Januari-Maret 2024, yakni 5,11 persen. Tahun 2024, pemilihan umum berlangsung pada 14 Februari.

Pada tiga bulan pertama 2024, konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen terhadap triwulan I-2023. Kenaikan ini, menurut Badan Pusat Statistik, terutama pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemilu serta realisasi belanja pegawai.

Sumbangan atau porsi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan porsi konsumsi masyarakat dan investasi. Meski demikian, belanja pemerintah berperan menggerakkan berbagai sektor dan mengalir ke berbagai bidang. Oleh karena itu, anggaran yang lambat dibelanjakan juga membuat dampaknya terhadap perekonomian menjadi kurang optimal.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai dengan awal Oktober 2025, realisasi belanja pemerintah pusat baru sekitar 55,6 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Dengan demikian, di sisa waktu tiga bulan sebelum tahun ini berakhir, kementerian/lembaga dan non-K/L harus mengebut untuk merealisasikan belanja.

Padahal, realisasi belanja yang menumpuk di akhir tahun berisiko menjadi kurang optimal. Belanja berupa kegiatan bisa jadi kurang efektif karena diburu waktu. Sebagian terkesan sekadar ada karena waktu yang sudah sangat mendesak sebelum tahun berakhir. Bahkan, tak jarang masyarakat berkomentar: kenapa semua proyek dan kegiatan tumpang tindih dan menumpuk di akhir tahun?

Sebaliknya, realisasi belanja di awal atau pertengahan tahun bisa memacu lebih banyak kegiatan ekonomi di sisa waktu yang lebih panjang hingga akhir tahun. Kegiatan, barang, dan modal bisa lebih banyak, efek berganda bisa terasa di lebih banyak sektor. Dampaknya bisa lebih optimal dan dirasakan lebih banyak kelompok masyarakat. Jika ada kegiatan yang kurang optimal, masih ada cukup waktu untuk memperbaiki sehingga tak terkesan sekadar asal menghabiskan anggaran.

Di tengah kondisi perekonomian yang serba tak pasti, perencanaan yang matang dan taktis akan membuat belanja anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak luas. Konsumsi pemerintah bisa jadi penopang pertumbuhan ekonomi yang diperlukan masyarakat saat ini. Masyarakat Indonesia, yang sebagian di antaranya sedang kehilangan pekerjaan, sebagian berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menggerus tabungan dan sebagian mengandalkan bantuan sosial untuk bertahan hidup.

Kewajiban Kita pada Finalitas Hukum

Seperti letupan, pemenuhan rasa adil itu seolah mengurai ketidakpastian dan rasa ketidakadilan korban dan keluarga mereka. Dari Sudan, kita memetik pelajaran.

Setelah 20 tahun berlalu, Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC akhirnya memutuskan pemimpin milisi Sudan, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, bersalah atas kasus-kasus kejahatan kemanusiaan. Dia diketahui memimpin milisi Arab Janjaweed meneror warga Darfur kala perang saudara berkecamuk di Sudan pada tahun 2003-2004.

Ali dinilai hakim bersalah dalam 27 dakwaan. Menurut salah satu hakim, Joanna Korner, Ali merupakan salah satu aktor utama dalam perkara-perkara itu. Korner menyebutkan, Ali memberi perintah yang berujung pada pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghancuran rumah-rumah warga.

Meski Ali sempat membantah dan menyatakan tidak bersalah, pengadilan yang digelar ICC pada tahun 2020 menemukan bukti dan keterangan yang justru memberatkannya. Ada 56 saksi dihadirkan. Mereka, antara lain, menceritakan tentang adanya pemerkosaan massal yang digunakan sebagai teror terhadap rakyat Darfur. Majelis hakim pun akhirnya mengganjar Ali, yang dinilai bersalah atas perkara-perkara itu, dengan hukuman penjara seumur hidup.

Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, vonis tersebut adalah terobosan. Bagi korban, vonis tersebut adalah pemenuhan rasa adil. Seorang warga Sudan berusia lanjut mengatakan, vonis itu adalah sesuatu yang telah mereka tunggu-tunggu sejak lebih dari 20 tahun lalu (Kompas.id, 7 Oktober 2025).

Vonis yang dijatuhkan ICC dalam perkara kejahatan kemanusiaan di Sudan, Rwanda, Bosnia, dan Kongo adalah kemenangan melawan impunitas. Pemenuhan rasa adil bagi korban dan keluarga korban bukan perkara balas dendam.

Berkaca pada kebijakan pada filsuf sejak era Plato, Immanuel Kant, hingga John Rawls, keadilan atau pemenuhan rasa adil adalah kunci dari moralitas dan laku politik yang baik. Sebagai prinsip moral universal, sebagaimana dikemukakan Kant, keadilan adalah basis dari upaya-upaya menempatkan manusia sebagai tujuan.

Gagasannya menjadi dasar dari upaya dan praktik pemenuhan hak-hak asasi manusia dan landasan bagi aneka hukum internasional. Melalui proses hukum yang relatif lama—tiga tahun—perkara yang terjadi 20 tahun silam itu akhirnya mendapat kepastian. Kepastian ini penting untuk memberi jaminan bahwa ada tata aturan dipatuhi, bahwa setiap kejahatan mendapat hukuman yang semestinya, dan korban mendapatkan pemenuhan atas keadilan.

Pemenuhan atas prinsip-prinsip tersebut menegaskan, tidak ada kejahatan yang dibiarkan berbiak, membinasakan manusia dan kemanusiaan. Vonis tersebut menegaskan bahwa manusia adalah setara, dan masa depan yang baik dan kesejahteraan dapat diharapkan terwujud.

Dari vonis ICC atas perkara di Sudan, kita dapat dan perlu belajar untuk menyelesaikan beragam kasus pelanggaran HAM yang masih terkatung-katung. Dari Sudan, kita bisa belajar bahwa tidak ada masa kedaluwarsa untuk menuntaskan kewajiban kita bagi masa depan.

KOMPAS
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum: Lilik Oetama
Wakil Pemimpin Umum: Andy Budiman Kumala, Paulus Tri Agung Kristanto
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: A Haryo Damardono
Wakil Pemimpin Redaksi: Adi Prinantyo
Redaktur Senior: Ninuk Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana: Marcellus Hernowo
Wakil Redaktur Pelaksana: Andreas Maryoto, Antonius Tomy Trinugroho, Khaerudin, Muhammad Samsul Hadi
Sekretaris Redaksi: Dewi Indriastuti

Arah Reformasi Polri

Agus Riewanto
Direktur Pusat Hukum dan Demokrasi, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Tim Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai respons atas tekanan publik pasca-tindakan represif dalam penanganan aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

Ironisnya, sebelum keputusan Presiden menetapkan tim, Polri telah lebih dahulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025. Hal ini berpotensi dualisme kewenangan. Publik curiga Polri punya agenda tersendiri, bahkan juga berisiko melemahkan arah reformasi Polri. Benarkah demikian?

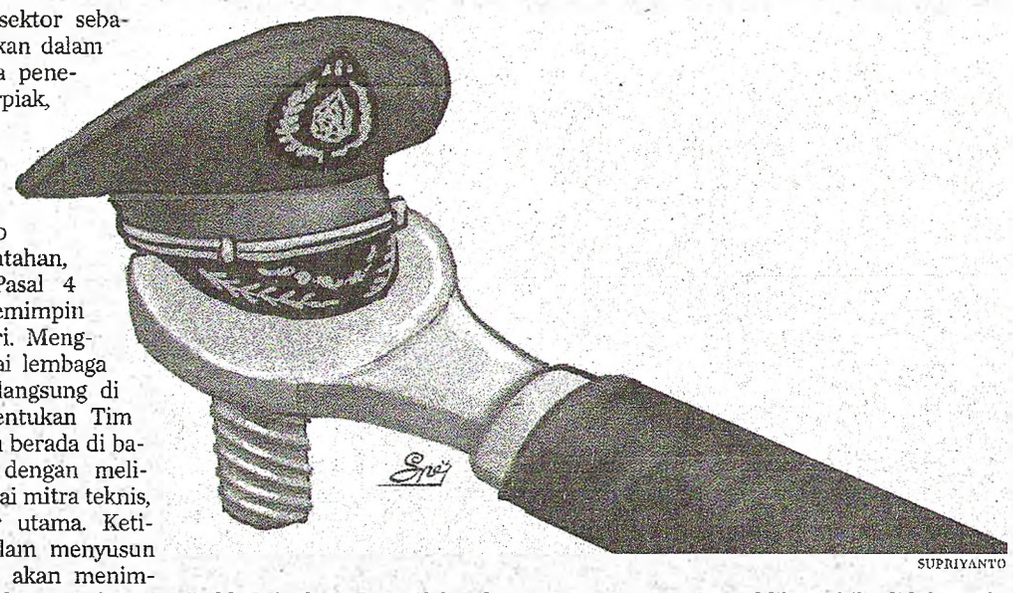
Tim reformasi ideal

Dalam merancang komposisi Tim Reformasi Polri diperlukan keseimbangan antara unsur internal Polri, unsur pemerintah, dan masyarakat sipil. Unsur dari dalam Polri memiliki keunggulan pada penguasaan teknis kepolisian dan akses langsung terhadap sistem internal. Namun, memiliki kelemahan, yakni bias kepentingan dan dipastikan akan resistensi terhadap perubahan. Sebab, dalam tradisi reformasi diperlukan gerakan dari luar sistem, bukan dari dalam sistem itu sendiri.

Tim Reformasi Polri diperlukan dari unsur pemerintah untuk penguatan legitimasi politik dan memastikan tanggung jawab pemerintah dalam tata kelola semua institusi negara, termasuk Polri. Namun, acap kali juga akan memicu kecurigaan publik akan politisasi reformasi jika dilakukan dengan tertutup.

Di sisi lain, Tim Reformasi Polri juga memerlukan unsur dari luar Polri seperti akademisi, aktivis HAM, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil agar lebih independen, menjamin obyektivitas, dan lebih partisipatif. Meski demikian, kelemahannya akan menghadapi situasi keterbatasan teknis dalam memahami kompleksitas birokrasi dan sistem internal Polri.

Oleh karena itu, formulasi Tim Reformasi Polri yang ideal haruslah bersifat hibrida, dengan proporsi berimbang di antara ketiga unsur itu agar tidak terjadi dominasi dan memungkinkan dialog konstruktif lintas sektor sebagaimana direkomendasikan dalam studi reformasi lembaga penegak hukum lainnya (Karpiak, Mulla, & Perez, 2022).


SUPRIYANTO

Maka, diperlukan sinergi antartim, dan sudah seharusnya Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana amanat Pasal 4 UUD 1945, untuk memimpin langsung reformasi Polri. Mengingat posisi Polri sebagai lembaga eksekutif yang berada langsung di bawah Presiden, pembentukan Tim Reformasi Polri haruslah berada di bawah otoritas Presiden dengan melibatkan unsur Polri sebagai mitra teknis, bukan sebagai inisiator utama. Ketidaktegasan Presiden dalam menyusun struktur kepemimpinan akan menimbulkan tarik-menarik kekuasaan internal yang memperlambat, bahkan menggagalkan agenda reformasi Polri.

Arah reformasi Polri

Reformasi Polri yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menyentuh empat pilar utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, kultur organisasi, dan operasionalisasi anggaran Polri.

Dari sisi substansi, perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 8 dan 11, untuk menguatkan independensi lembaga dan memperjelas mekanisme akuntabilitas relasinya dengan Presiden. Pengangkatan Kapolri sebaiknya didasarkan pada sistem meritokrasi dan transparansi, dengan pendekatan kombinasi peran yang seimbang, antara hak prerogatif Presiden, kontrol dari DPR, dan peran Tim Reformasi, agar Polri terhindar masuk dalam pusaran kekuasaan politik.

Secara struktural, reformasi Polri perlu diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM) Polri. Maka dari itu, penempatan ribuan anggota aktif Polri di berbagai lini jabatan sipil akan mengaburkan batas fungsi dan melemahkan profesionalisme birokrasi pemerintahan. Pola rekrutmen Polri dan fungsinya berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, apabila keduanya dicampur, akan merusak meritokrasi di lingkungan Polri ataupun di lingkungan birokrasi ASN.

Dari aspek kultural, arah reformasi Polri ditujukan pada mengikis kuatnya budaya impunitas, sebagaimana tecermin dalam penanganan kasus-kasus seperti peristiwa beruntun yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Termasuk kasus Ferdy Sambo yang terseret kasus pembunuhan, dan Teddy Minahasa Putra dalam kasus narkoba-sabu, serta insiden fatal di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Contoh kasus tersebut menunjukkan kegagalan keteladanan Polri dan lemahnya sistem etik internal Polri dalam mengawal keadilan substantif.

Sementara itu, dari aspek operasional, alokasi anggaran Polri sebesar Rp 2,6 triliun dalam lima tahun terakhir untuk pengadaan alat pengendali massa menunjukkan kecenderungan Polri mengedepankan pendekatan koersif. Padahal, alokasi anggaran idealnya difokuskan pada penguatan penyelidikan, peningkatan kapasitas personel, dan pembenahan sistem pelayanan publik.

Lebih dari itu, terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian Republik Indonesia juga menuai kritik. Hal ini disebabkan aturan ini memberi kewenangan kepada polisi untuk menggunakan senjata api dalam menindak demonstran yang anarkistis. Masalahnya, tak ada penjelasan yang memadai bagaimana tindakan itu harus diambil.

Reformasi polisi di negara lain

Pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Perancis, menawarkan pelajaran penting dalam merancang reformasi kepolisian yang profesional dalam melayani publik. Di Amerika Serikat, pendekatan desentralisasi memungkinkan inovasi di tingkat lokal. Model pengawasan sipil, seperti Civilian Oversight Boards—pengawas independen yang dibentuk untuk memantau, menilai, serta memberikan akuntabilitas terhadap kinerja dan perilaku aparat kepolisian, terutama terkait dengan penggunaan kekuatan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak sipil—terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik apabila didukung komitmen politik dan akses pada informasi yang memadai (White & Schafer, 2024).

Sementara itu, Perancis menerapkan sistem *dual policing* antara Police Nationale dan Gendarmerie, yang memungkinkan spesialisasi fungsi, antara fungsi polisi dengan pendekatan sipil dan militer. Polisi akan lebih fokus pada masalah-masalah sipil dalam penegakan hukum dan menjaga keseimbangan profesionalisme dan hak asasi manusia. Selain itu meminimalkan pendekatan militer dalam penanganan demonstrasi massa (Anderson, M. 2020).

Dari kedua model tersebut, Indonesia dapat menarik pelajaran berharga. Pertama, pentingnya membentuk lembaga pengawas sipil independen dengan kewenangan yang jelas dalam menilai kinerja dan menyelidiki penyimpangan aparat kepolisian. Kedua, desentralisasi terbatas Polri di tingkat provinsi dengan supervisi pusat yang kuat dapat menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan Polri agar lebih responsif terhadap masalah ketertiban pada masyarakat lokal tanpa mengorbankan integritas nasional.

Ketiga, pemisahan fungsi pendekatan sipil dan militer secara ketat dalam penanganan demonstrasi massa, sebagaimana di Perancis, harus menjadi dasar dalam meninjau ulang peran Brimob dan penggunaan kekuatan represif.

Arah dan agenda reformasi Polri untuk saat ini perlu didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, budaya transparansi, dan akuntabilitas yang ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan memadukan pengalaman internasional dan konteks nasional, reformasi Polri bukan hanya mungkin, melainkan juga niscaya untuk memastikan terwujudnya kepolisian yang demokratis, profesional, dan tepercaya.

"Reform Fatigue" dalam Tata Kelola BUMN

Ruslan Effendi
Aparat Sipil Negara, Alumnus Program Doktoral Akuntansi UGM

Pada 2 Oktober 2025, Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengesahkan revisi keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Ironisnya, pengesahan itu terjadi hanya delapan bulan setelah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2025 yang sebelumnya juga merevisi UU BUMN. Dalam sejarah tata kelola korporasi negara, langkah ini tergolong tidak lazim.

Revisi keempat ini menghapus nomenklatur Kementerian BUMN dan menggantinya dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), mengatur ulang struktur *holding* investasi dan operasional di bawah BPI Danantara, menegaskan kepemilikan saham seri A dwiwarna oleh negara, sekaligus mengembalikan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.

Di sisi lain, revisi ini juga melarang rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di lingkungan BUMN, serta memperluas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit.

Bagi sebagian kalangan, langkah ini merupakan penyempurnaan UU No 1/2025 yang dinilai terlalu liberal dalam memisahkan BUMN dari mekanisme kontrol publik. Namun, bagi pengamat tata kelola korporasi, revisi berulang dalam waktu sesingkat ini justru menunjukkan gejala *reform fatigue*--keletihan institusional akibat perubahan hukum yang terlalu cepat sebelum sistem sebelumnya sempat beradaptasi.

Jarang terjadi

Dalam praktik internasional, perubahan mendasar terhadap Undang-Undang BUMN jarang dilakukan lebih dari sekali dalam satu dekade. Singapura, misalnya, tidak pernah mengubah *Companies Act* yang menjadi dasar operasional Temasek Holdings sejak 2002.

Korea Selatan terakhir melakukan reformasi BUMN pada 2007 dan hanya menyesuaikan aturan pelaksananya. Adapun Brasil baru meninjau kembali undang-undang BUMN setelah tujuh tahun, pada 2023, ketika muncul isu politisasi direksi.

Mengapa Indonesia tampak tergesa-gesa? Ada beberapa penjelasan yang bisa dilihat dari dinamika politik dan ekonomi nasional. Pertama, revisi cepat ini berkaitan erat dengan transisi pemerintahan dan restrukturisasi fiskal. Pemerintahan baru berupaya memperkuat peran negara dalam mengelola aset strategis melalui BPI Danantara. UU No 1/2025 yang disahkan pada masa transisi dianggap belum sepenuhnya mencerminkan visi baru pembangunan, sehingga revisi keempat dilakukan untuk menyesuaikannya.

Kedua, revisi ini juga merupakan respons terhadap kritik publik dan akademik. UU No 1/2025 mengandung pasal yang menghapus status penyelenggara negara bagi direksi BUMN, serta membatasi audit Badan Pemeriksa Keuangan hanya atas permintaan DPR. Ketentuan itu dianggap melemahkan akuntabilitas publik dan berpotensi membuka ruang impunitas. Melalui revisi keempat, sebagian besar pasal tersebut dikoreksi.

Ketiga, revisi ini juga merupakan reorientasi kelembagaan yang cukup besar. Pembentukan BP BUMN mengubah hubungan antara pemerintah dan BUMN, dari semula berbasis kementerian menjadi berbasis badan pengaturan. Namun, dalam praktiknya, perubahan ini justru menimbulkan risiko tumpang tindih fungsi antara regulator, pemilik saham, dan pembuat kebijakan.

Dalam berbagai forum, pejabat pemerintah kerap menyebut bahwa Indonesia ingin "mengelola BUMN seperti Temasek." Klaim ini menarik, tetapi sulit dibuktikan secara kelembagaan.

Temasek Holdings di Singapura beroperasi sepenuhnya sebagai perusahaan swasta di bawah *Companies Act* dan berorientasi pada laba jangka panjang. Negara hanya bertindak sebagai pemegang saham pasif melalui Kementerian Keuangan. Dewan direksinya independen, tidak diisi pejabat politik, dan laporan keuangannya diaudit serta dipublikasikan secara rutin.

Sebaliknya, BPI Danantara dan BP BUMN merupakan badan hukum publik dengan mandat ganda: mengelola aset negara sekaligus menjalankan kebijakan pembangunan. Banyak BUMN masih memiliki fungsi sosial, seperti penyediaan energi, pangan, dan infrastruktur dasar. Audit keuangannya pun dilakukan lembaga negara, bukan auditor independen global.

Dengan demikian, model Indonesia jauh berbeda dari Temasek. Apa yang dilakukan melalui UU BUMN 2025 dan revisi keempat bukanlah peniruan, melainkan bentuk hibrida antara lembaga investasi negara dan instrumen kebijakan publik—suatu eksperimen khas negara berkembang yang memadukan logika pasar dan logika negara.

Berfungsi ganda

Dalam literatur ekonomi politik, model ini dikenal sebagai *developmental investment agency*, yaitu badan yang berfungsi ganda sebagai pengelola investasi sekaligus penggerak pembangunan nasional. Musacchio dan Lazzarini (2014) menyebut, fenomena ini sebagai bentuk baru dari *state capitalism*, ketika negara bertindak sebagai pemegang saham aktif yang mengintervensi pasar untuk tujuan pembangunan.

Namun, mereka juga mengingatkan risiko *institutional oscillation*—perubahan arah institusi yang terlalu cepat antara efisiensi bisnis dan kontrol politik, yang justru melemahkan keduanya.

Dari sudut pandang tata kelola, dua prinsip OECD tentang BUMN kini diuji di Indonesia, yaitu stabilitas kerangka hukum dan pemisahan peran negara sebagai regulator dan pemilik. *Perubahan yang terlalu sering* menurunkan kepastian bagi investor dan memperlemah disiplin korporasi. Sementara pembentukan lembaga baru tanpa kejelasan fungsi berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara pengawasan dan kepemilikan.

Revisi keempat memang memperkuat kembali akuntabilitas publik. Akan tetapi, dalam jangka panjang bisa menimbulkan ketidakpastian kelembagaan jika arah kebijakan terus berubah tanpa konsolidasi yang tuntas.

Konsistensi

Reformasi BUMN seharusnya tidak diukur dari seberapa sering undang-undangnya diubah, tetapi dari seberapa lama sistemnya bertahan secara stabil dan kredibel. Negara membutuhkan kerangka hukum yang tahan uji, bukan yang cepat diperbarui setiap kali terjadi perubahan politik. Sebab, dalam dunia usaha, konsistensi lebih berharga daripada kecepatan.

Jika setiap pemerintahan membawa model kelembagaan baru, kelelahan institusional (*reform fatigue*) menjadi harga yang harus dibayar. Birokrasi menjadi bingung, pasar ragu, dan publik kehilangan kepercayaan.

Revisi cepat mungkin tampak seperti bukti kemauan politik. Akan tetapi, tanpa stabilitas, reformasi hanya menjadi siklus penyesuaian tanpa arah. Dalam konteks ini, tantangan terbesar bagi pemerintah bukan lagi menyusun undang-undang baru, melainkan membangun konsistensi jangka panjang dalam tata kelola BUMN—agar reformasi benar-benar menjadi instrumen kemajuan, bukan sekadar pergantian label kelembagaan.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke **www.kompas.id/kirim-opini**

POJOK

Seperlima anak Indonesia tanpa pengasuhan ayah.
Semua ada tanggung jawabnya, apalagi yang sudah jadi ayah.

Kampung batik Kauman yang kian memikat.
Memikat batiknya, laris dagangannya.

Kegembiraan hingga macet panjang selama libur hari nasional China.
Namanya juga hari libur.

Mang Usil

Transformasi Perkotaan dan Perlunya UU Perkotaan

Bakti Setiawan
Guru Besar Perencanaan Kota UGM

Senin, 15 September 2025, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, diluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 (KPN 2045).

Kebijakan ini diluncurkan bersama Bappenas dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kebersamaan lima kementerian dalam peluncuran KPN 2025 ini menunjukkan perhatian pemerintah bahwa persoalan perkotaan memang semakin kompleks dan memerlukan kebijakan yang komprehensif serta melibatkan banyak lintas lembaga/kementerian.

Tertuang dalam dokumen tersebut, enam alasan utama mengapa diperlukan kebijakan pembangunan perkotaan yang komprehensif sampai tahun 2045 mendatang. Salah satu alasan yang utama adalah semakin mengotanya negara kepulauan terluas di dunia ini.

Diproyeksikan oleh Bappenas, bahwa penduduk yang tinggal di perkotaan akan mencapai lebih dari 72,9 persen pada tahun 2045 nanti—satu pertambahan yang signifikan dalam 20 tahun mendatang. Sebab, saat ini, baru sekitar 56 persen penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan.

Lebih lanjut, dokumen tersebut juga cukup rinci memuat strategi pembangunan perkotaan Indonesia, baik mulai dari tantanganya, konsep, visi, misi, dan juga *road map* pembangunan perkotaan sampai tahun 2045 mendatang. Dijelaskan dalam dokumen tersebut, bagaimana perkotaan telah dan akan terus menjadi pusat pertumbuhan negara.

Pemerintah harus terus memberikan perhatian lebih pada perkembangan dan persoalan perkotaan. Sebab, target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045 juga akan sangat tergantung pada bagaimana pembangunan perkotaan dapat diarahkan dengan lebih baik dan produktif.

Artikel ini melengkapi dokumen tersebut, khususnya melihatnya dalam perspektif transformasi perkotaan dalam jangka yang lebih panjang (*beyond* 2045) serta argumen tentang perlunya undang-undang perkotaan untuk menguatkan dasar hukum tindakan kita ke depan.

Tantangan transformasi

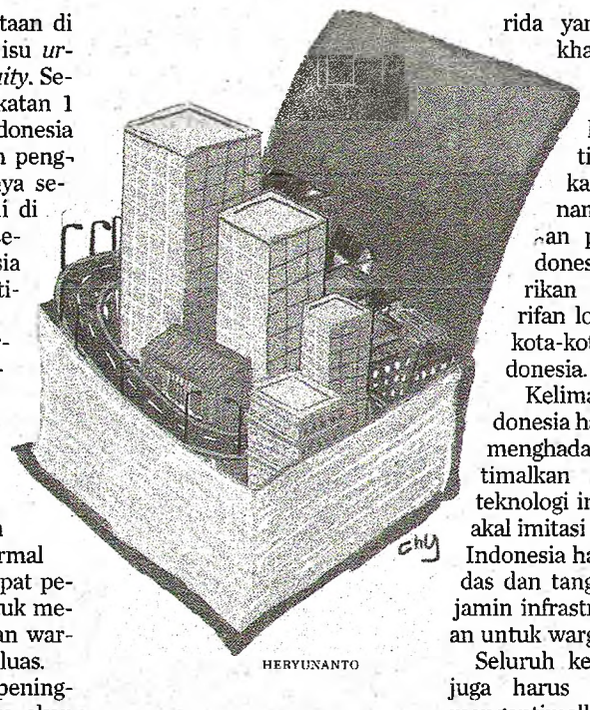
Paling tidak terdapat enam tantangan transformasi perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia. Pertama, Kajian Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa selama ini arus urbanisasi di Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa kota metropolitan, seperti Jakarta, Bandung Raya, Semarang, dan Surabaya.

Ke depan, urbanisasi yang lebih merata ke kota-kota menengah dan kecil, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, akan semakin menjamin pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membangun dan mengelola kota-kota menengah dan kecil yang berkelanjutan relatif lebih mudah dilakukan daripada membangun dan mengelola kota-kota besar dengan segala kompleksitasnya. Desentralisasi dan otonomi daerah yang berkualitas akan semakin menjamin pembangunan kota yang lebih memperhatikan aspirasi dan potensi lokal. Pembangunan IKN di Pulau Kalimantan diharapkan dapat memberikan inspirasi pembangunan wilayah perkotaan di luar Pulau Jawa.

Tantangan dan peluang kedua transformasi perkotaan di Indonesia menyangkut isu *urban productivity* dan *equity*. Selama ini setiap peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya memicu 4 persen penghasilan per kapita—hanya setengah dari yang terjadi di beberapa negara lain, seperti China dan Malaysia (Bank Dunia, 2019; Setiawan, 2021).

Ke depan, kualitas urbanisasi di Indonesia harus ditingkatkan agar dapat lebih menjamin dan mempercepat proses transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Sektor informal perkotaan harus mendapat peluang dan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota dalam arti yang luas.


HERYUNANTO

Dengan demikian, peningkatan produktivitas kota akan dibarengi dengan berkurangnya ketimpangan sosial dan ekonomi warganya. Sebab, sebagian besar warga yang tergantung di sektor informal akan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi kota yang mandiri dan tangguh.

Dengan kata lain, peningkatan produktivitas kota yang penting untuk mendorong peningkatan ekonomi negara harus juga menjamin inklusivitas dan peluang ekonomi untuk seluruh warga kota. Kota yang semakin inklusif dan memberi peluang ekonomi untuk seluruh warganya akan menjamin kesetaraan dan keadilan sosial.

Berikutnya, perubahan iklim dan bencana telah dan akan menjadi tantangan penting transformasi perkotaan di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat paling tidak 90 kota yang terletak di kawasan pesisir yang rentan atas perubahan iklim. Kota-kota ini mewadahi paling tidak 100 juta jiwa pada tahun 2045 nanti. Perencanaan dan pengelolaan kota di Indonesia harus didasarkan pada konsep ramah iklim dan rendah karbon.

Karena seluruh wilayah Indonesia berada dalam *ring of fire*, hampir semua kota di Indonesia menghadapi berbagai ragam ancaman bencana. Meningkatkan ketangguhan kota-kota di Indonesia menjadi keharusan untuk menjamin keberlanjutan kota. Pembangunan kota yang tangguh dan rendah karbon harus menjadi keharusan di Indonesia.

Tantangan keempat transformasi perkotaan di Indonesia berkaitan dengan isu warisan sejarah dan budaya serta identitas. Kota dan wilayah perkotaan selalu menjadi ajang utama globalisasi dan kapitalisme sehingga cenderung rentan atas berbagai perubahan global atau eksternal. Kota-kota di seluruh dunia cenderung menjadi seragam dan tidak mampu merepresentasikan sejarah dan karakternya. Proses ini harus diwaspadai dan direspons dengan saksama.

Kota-kota di Indonesia sejatinya telah mampu merespons dan bernegosiasi dengan berbagai kekuatan luar/global dan menghasilkan area urban hibrida yang menarik dan khas. Banyak kota di Indonesia menggambarkan hasil dialektika kekuatan lokal-global yang dinamis. Pembangunan perkotaan di Indonesia harus memberikan ruang bagi kearifan lokal dan identitas kota-kota yang khas Indonesia.

Kelima, kota-kota di Indonesia harus semakin siap menghadapi dan mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi (TI) dan akal imitasi (AI). Kota-kota di Indonesia harus semakin cerdas dan tangguh dalam menjamin infrastruktur dan layanan untuk warganya.

Seluruh kegiatan perkotaan juga harus semakin efisien, mengoptimalkan berbagai peluang perkembangan TI serta AI. Pengelolaan perkotaan juga semakin dituntut lebih efektif dan efisien dengan dukungan TI dan AI. Dan terpenting, warga kota juga semakin cerdas dan bijak serta terlibat penuh dalam pembangunan kotanya.

Tidak kalah penting, tata kelola yang efektif dan inklusif akan menjadi kunci keberhasilan untuk mengawal keberlanjutan transformasi perkotaan di Indonesia. Jane Jacobs (1985), pemikir perkotaan yang ternama dari Amerika, telah mengingatkan sejak lama, bahwa keberhasilan pembangunan kota akan terwujud jika dan hanya jika seluruh warga kota diberi kesempatan dan peluang untuk membangun kotanya.

Di Indonesia, inklusivitas pembangunan perkotaan ini juga ditengarai oleh proses demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Ratusan pemimpin daerah di Indonesia diharapkan akan semakin sadar dan berupaya meningkatkan tata kelola pembangunan kota yang efektif dan inklusif, serta berlomba-lomba untuk mewujudkan banyak aspirasi warganya.

Memberikan lebih banyak peluang bagi generasi muda, khususnya generasi milenial dan Z untuk terlibat penuh dalam pembangunan kota, merupakan satu keharusan. Dua generasi ini, dalam dua sampai tiga dasawarsa ke depan, akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan perkotaan di Indonesia.

Urgensi UU Perkotaan

Dengan enam tantangan transformasi perkotaan di atas, Indonesia memerlukan landasan legal yang jelas dan kuat untuk membangun kotanya. Saat ini, peraturan dan perundangan yang terkait dengan pembangunan perkotaan tidak memadai karena paling tidak empat hal berikut.

Pertama, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah panjang perkotaan di seluruh dunia, kota telah dan akan terus menjadi pusat dan energi utama perkembangan peradaban satu masyarakat dan bangsa. Pentingnya peran kota bagi perkembangan peradaban satu bangsa tentu memerlukan landasan hukum yang jelas dan kuat agar posisi dan perannya dalam pembangunan satu negara semakin jelas. Undang-undang perkotaan di Indonesia akan memberikan jaminan peran dan fungsi kota yang jelas dan lebih besar dalam pembangunan nasional. Undang-undang perkotaan akan menuntut perhatian serta tanggung jawab pemerintah dan negara yang lebih besar terhadap pembangunan perkotaan di Indonesia.

Kedua, pembangunan perkotaan menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, maupun warga dan masyarakat kota. Dimensi hak dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perkotaan hanya akan kuat apabila dijamin dalam undang-undang.

Undang-Undang Perkotaan akan memberikan dasar dan pengaturan yang lebih kuat dan jelas akan peran, tanggung jawab tiap-tiap pemangku kepentingan kota. Begitu pula berbagai kemungkinan kolaborasi antarpemangku kepentingan akan semakin jelas dan pasti dalam pembangunan perkotaan.

Berikutnya, transformasi perkotaan yang berkelanjutan mempunyai cakupan dimensi yang luas, baik aspek ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, maupun politik. Tata kelola perkotaan dengan demikian akan melibatkan hampir semua sektor dan bidang dalam struktur kelembagaan pemerintah yang ada. Keberadaan undang-undang perkotaan akan menjadi dasar yang kuat untuk mengikis kecenderungan ego sektoral dan ego daerah sebagaimana selama ini terjadi, sekaligus memungkinkan kolaborasi yang sinergis antarlembaga, baik vertikal maupun horizontal.

Tidak kalah penting, fenomena perkotaan di Indonesia mempunyai sejarah dan kekhasannya sendiri, serta berujud pada keragaman kota yang bernilai. Diperlukan landasan legal yang kuat untuk mengawal dan memastikan bahwa kekhasan dan keistimewaan kota-kota di Indonesia terjaga dan berkembang menjadi khazanah perkotaan yang khas Nusantara. Keberagaman, keunggulan, dan kekhasan kota-kota Nusantara akan menjadi bagian dari mosaik kawasan urban di seluruh dunia.

Ringkasnya, undang-undang perkotaan diperlukan karena telah menjadi "kebutuhan hukum" masyarakat luas. Undang-Undang Perkotaan akan menjamin landasan legal yang jelas dan kuat bagaimana menjamin transformasi perkotaan yang berkelanjutan di seluruh Nusantara, jauh melebihi target Indonesia Emas 2045. Sebagaimana disampaikan oleh Edward Glaeser dalam bukunya, *Triumph of the City* (2012)—*city magnify humanity's strengths*—transformasi perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia harus menunjukkan kehebatan dan ketangguhan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

SURAT KEPADA REDAKSI

Rubrik ini menerima surat Anda mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman Opini maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan konsumen yang tidak terselesaikan dalam prosedur formal. Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca dikirim kepada **suratpembaca@kompas.id** atau ke Redaksi Kompas, Jl Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau pindaian identitas diri.

Ponpes Ambruk

Ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 29 September 2025, menyisakan beberapa pertanyaan yang layak menjadi catatan para pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap aspek keselamatan manusia agar ke depan peristiwa semacam ini tidak terulang kembali.

Hal pertama yang perlu diingatkan kembali ialah pentingnya penegakan standar kelayakan dan keamanan pekerjaan konstruksi, termasuk masalah perizinan serta pengawasannya.

Menurut catatan sementara pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 108 santri telah berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan; dengan rincian 103 santri telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 5 orang santri lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Selain itu, masih ada sekitar puluhan santri dinyatakan hilang, yang diduga kuat masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.

Hal kedua yang cukup penting untuk menjadi catatan adalah belum munculnya pernyataan resmi dari pihak pengelola atau pemilik pesantren tentang peristiwa ini, sebagai bentuk tanggung jawab moral pihak terkait atas jatuhnya banyak korban.

Dan yang ketiga, dan ini merupakan hal paling krusial, yakni agar dilakukan audit investigatif teknis guna memastikan penyebab utama runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khoziny.

Kasus runtuhnya bangunan tersebut memberi pelajaran yang sangat berharga akan pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis pekerjaan konstruksi.

Dan yang sangat disayangkan adalah adanya faktor kelalaian, keteledoran atau bahkan kecerobohan, di mana pekerjaan proyek dilakukan di tengah aktivitas santri yang berada di lokasi proyek.

Sejauh yang saya pahami, standar keamanan pekerjaan konstruksi melarang adanya aktivitas manusia di lingkungan proyek, yang keberadaannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan proyek, selain pekerja proyek.

BUDI SARTONO SOETIARDJO
Graha Bukit Raya I, Cilame, Ngamprah, Bandung

Reformasi Polri

Tuntutan publik mendesak agar Kepolisian Negara Republik Indonesia berbenah diri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Untuk meletakkan kembali tatanan yang baik dan beradab, semua aspek yang menyangkut pelanggaran dan pengabaian hukum tidak dapat ditoleransi. Hukum perlu ditegakkan untuk mencegah pelanggaran demi pelanggaran agar tidak menjadi budaya yang (dianggap) boleh dilakukan setiap warga masyarakat, seperti berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM), melanggar rambu-rambu lalu lintas, berkendara melawan arus, dan sebagainya.

Petugas Polantas cenderung tidak dapat menangani semua masalah di lapangan, khususnya penegakan hukum. Sebab, tidak sebandingnya jumlah aparat petugas dan kendaraan. Oleh karena itu, jika keadaan ini dibiarkan berlanjut, bangsa Indonesia akan terperangkap krisis.

Untuk lebih mendayagunakan aparat kepolisian, wewenang pemberian SIM kendaraan bermotor beroda dua, empat, enam, dan seterusnya harus dialihkan ke Kementerian Perhubungan (DLLAJR).

Di Jerman, *driver's license* (*führerschein*) diterbitkan oleh Fahrerlaubnisbehörde, instansi yang memeriksa kelaikan kendaraan bermotor. Juga di Amerika Serikat, *driver's license* diterbitkan oleh DMV (Department of Motor Vehicles), instansi semacam DLLAJR di Indonesia. Jadi, baik di Jerman, Uni Eropa, maupun di Amerika, SIM tidak diterbitkan oleh polisi.

Tugas polisi harus dikembalikan sepenuhnya pada penegakan hukum. Aparat kepolisian dihadirkan untuk mengurus kelancaran lalu lintas, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan saja.

Dengan menata ulang peraturan ataupun perundangan yang berlaku, penegakan hukum tanpa pandang bulu dapat membentuk masyarakat Indonesia yang disiplin, patuh, dan santun berkendara di jalan raya. Semoga.

FX WIBISONO
Jl Kumudasmoro Utara, Semarang

acara hari ini

Kamis, 9 Oktober 2025

Acara sewaktu-waktu dapat diubah oleh pengasuh televisi.

TVRI
04.30 Serambi Islami
06.00 Klik Indonesia Pagi
07.00 Jendela Negeri
08.00 Bersama Perempuan
09.03 Mari Menggambar
09.30 Halo Dokter
10.30 Dapur Devina
11.03 Seblak Show
12.00 Klik Indonesia Siang
13.00 Saba Desa
13.30 Ayo Bertani
14.03 Pesona Indonesia
14.30 Inspirasi Indonesia
15.03 Mimbar Agama: Buddha
15.30 Jelajah Negeri
16.03 Rest Area
17.03 Jendela Rumah Kita Reborn
18.00 Klik Indonesia Petang
19.00 Indonesia Bicara
20.00 Jendela Rumah Kita Reborn
21.00 Dunia Dalam Berita
21.30 Irama Gambus
22.30 Menjemput Ridho-Mu
23.30 Klik Indonesia Malam
00.00 Monitor Olahraga
00.30 Antar Gelanggang

BTV
06.00 Indonesia Raya
06.03 Jalan Dakwah
07.00 Figur Publik
08.00 Kuyliner
08.30 Masak ala Devina Hermawan
09.15 Selera Rasa
10.15 Ketulusan Hati
11.00 Berita Satu Siang
12.00 Investor Market Today
13.00 Investor Daily Talk
13.30 Spot On
15.00 Dikit-dikit Damkar
15.30 Berita Viral
16.30 Berita Satu Sore
17.30 Berita Satu Utama
19.30 Dunia Binatang
20.00 Berita Viral
21.00 Spot On
22.00 Berita Satu Malam
23.00 Mitos Tengah Malam
23.30 One Vault
00.30 Berita Viral
01.27 Tanah Airku
01.30 Berita Satu Sore

TRANSTV
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 CNN Indonesia Good Morning
08.30 Pagi-pagi Ambyar
10.30 Insert
12.30 Brownis (Obrowlan Manis)
14.00 Rumpi (No Secret)
15.00 Insert Today
16.00 CNN Indonesia News Update
16.30 Dream Box Indonesia
17.30 Bikin Laper
18.45 Insert Story
20.00 Dunia Punya Cerita
21.00 Bioskop Trans TV
23.00 Bioskop Trans TV

TRANS 7
04.30 Info Update
05.15 Redaksi Pagi
06.30 Spotlite
07.30 Selebrita Pagi
08.30 FYP (For Your Pagi)
09.30 Selebrita Heits
10.15 Big Bang!
11.15 Enah Bikin Enak
12.00 Bocah Petualang
12.45 Jejak Petualang
13.30 Kepo
14.30 Redaksi
15.15 Jejak Si Gundul
16.15 Makan Receh
17.15 Exposed Uncensored
18.00 On The Spot
18.45 Secret Story
19.15 POV (Pasti Obrolan Viral)
20.00 Arisan
21.30 Lapor Pak!
22.45 The Police
23.30 Misteri Dunia
00.15 Redaksi Malam
00.45 Sport7
01.30 Best Fishing
02.30 BTS

rtv
04.30 Pinkfong Wonderstar
05.30 Marsupilami
06.00 Bread Barbershop
08.00 Metal Cardbot
09.30 Boboiboy Galaxy
10.30 Blox Buster
11.30 Ayo Menggambar: Draw with Will
12.30 Boboiboy
14.00 Super Wings
16.00 Quantum Heroes Dinoster
17.00 Boboiboy Galaxy
18.30 Armor Rangers
19.00 Ejen Ali
21.00 Boba (Bombastis Banget)
21.30 Terkepo-kepo
22.00 Lensa Indonesia Malam
22.30 Catatan Seputar Investigasi
23.00 Top Trending
23.30 Jejak Raja Jawa
00.30 Kokom (Kompilasi Komedi)
01.00 Terang Kasih
01.30 Besti (Best Informasi)
02.00 Movinesia

KOMPAS TV
05.00 Kompas Pagi
07.00 Sapa Indonesia Pagi
09.30 Berita Utama
10.30 Borgol
11.00 Kompas Siang
13.00 Sapa Indonesia Siang
14.00 Sasaran
14.30 Jurnal Merah Putih
15.00 Indonesia Update
15.30 Borgol
16.00 Kompas Petang
17.30 Sapa Indonesia Malam
19.30 Berita Utama
20.30 Rosi
21.30 Kompas Malam
22.30 Berita Utama
23.00 Kompas Sport
23.30 Kilas Kompas
00.00 Kompas Petang
01.30 Berita Utama
02.30 Kompas Malam

JAKTV
05.00 Senyum Quran
05.30 Muslimpedia
06.00 Inovator
06.30 My Health My Choice
07.00 Dunia Kita
07.30 Cooking Time
08.00 Lejel
10.00 Creative Talk
10.00 Animal Action
11.00 Above and Beyond
11.30 Aroma Puncal Borneo
12.00 Lejel
13.00 Berkah Shop
14.00 Everyday Chinese
15.00 Berkah Shop
16.00 Medika Natura
17.00 Muslimpedia
17.30 Kubah Borneo
18.00 Madu Sae
19.00 Ooopps
19.30 Rezeki Api
20.00 Galeri Publik
21.00 Medika Natura Eyang Gentar
22.00 Mirror Story
22.30 Pak Kobra
23.00 Obama

SCTV
04.50 Liputan 6 Pagi
06.00 Halo Selebriti
07.00 Asmara Gen Z
08.30 FTV Pagi
10.00 FTV Pagi
12.00 Liputan 6 Siang
12.30 Super Sale Indonesia
14.15 FTV Siang
15.30 Azizah: Cinta 6 Hati
17.00 Asmara Gen Z
18.30 Cinta Sedalam Rindu
20.15 Cinta di Bawah Tangan
21.45 Wanita Istimewa
23.00 FTV Primetime
00.45 FTV Utama
01.30 Buser
02.00 Sinema Malam

METRO TV
Knowledge to Elevate
04.05 Top News
05.05 Metro Pagi Primetime
06.30 Go Healthy
07.05 Editorial Media Indonesia
07.30 Metro Sport
08.30 Selamat Pagi Indonesia
09.30 Zona Bisnis
10.30 Go Healthy
11.05 Metro Sport
12.00 Metro Siang
13.30 Prioritas Indonesia
14.05 Newsline
16.05 Metro Hari Ini
17.30 Primetime News
20.05 Top News
21.05 Kontroversi
22.05 Metro Xinwen
22.30 Meet Night Live
23.30 Primetime News
00.05 Metro Hari Ini
01.30 Melawan Lupa
02.05 Meet Night Live

tvOne
04.30 Kabar Pagi
06.00 Kabar Arena Pagi
06.30 Apa Kabar Indonesia Pagi
08.30 Hidup Sehat
09.00 Inspirasi Pagi
09.30 Pagi-pagi Seru
10.30 Metropolitan
11.00 Kabar Siang
13.00 Apa Kabar Indonesia Siang
14.30 Kabar Merah Putih
15.30 Berita Utama Kriminal
16.00 Kabar Petang
18.00 Apa Kabar Indonesia Malam
20.00 Dua Sisi
21.00 Kabar Utama
22.00 Kabar Hari Ini
23.00 Kabar Arena Malam
23.30 Kabar Utama
00.00 Kabar Hari Ini
00.30 Kabar Petang
02.00 Kabar Indonesia Malam

Resensi

Ulas sebuah buku, album musik, atau film yang berkesan bagi Anda dalam 300 karakter. Kirim via surel ke klasika@kompas.id

SINEMA

Nadia Hallgren/
Victoria Beckham

Victoria Beckham akan menceritakan berbagai drama di balik kehidupannya yang penuh ketenaran dan glamor. Mantan anggota Spice Girls yang yang kini menjadi desainer ternama berbagi kisahnya sambil bersiap untuk Paris Fashion Week.


DOK NETFLIX

PUSTAKA

Faza Meonk/
Si Juki Anak Kosan Vol 5

Makin absurd! Kali ini, Juki dan kawan-kawan harus menerima azab, tukar tubuh dengan kecoa, terjebak macet sampai harus dibawa ke barak.


DOK GRAMEDIA

EKOSISTEM SENI

Konferensi Musik Indonesia Digelar Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Setelah lima tahun vakum, Konferensi Musik Indonesia kembali digelar tahun ini. Konferensi ini diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan peran musik Indonesia dalam mendukung industri budaya berkelanjutan.

Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 digelar di Jakarta pada 8-11 Oktober 2025. Konferensi musik pertama kali berlangsung pada 2018 di Ambon, Maluku. Salah seorang penggagasnya adalah musisi Glenn Fredly (alm). Setahun berselang, konferensi dilanjutkan di Bandung, Jawa Barat. Namun, setelah itu, KMI tak pernah lagi diadakan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, KMI akan mempertemukan sejumlah pihak dalam ekosistem musik Tanah Air. Berbagai topik akan dibahas dalam konferensi tersebut, mulai dari tata kelola hak cipta, pengelolaan royalti, jalur karya musisi untuk mendunia, kolaborasi musisi regional, hingga persiapan talenta musik di masa depan.

"Bagaimana kita merumuskan peran musik Indonesia dalam industri budaya dan ekonomi budaya ke depan yang akan semakin kondusif dengan potensi yang sangat besar," ujarnya dalam pembukaan KMI 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025) malam.

Dalam konferensi itu, para musisi juga berkesempatan menjaring relasi dengan industri dan platform musik digital. Menurut Fadli, musik berperan sebagai *soft power* yang dapat menjadi daya tarik Indonesia di kancah internasional.

"Kami berharap hasil dari konferensi musik ini tidak sekadar informasi-informasi kebijakan yang nanti bisa kita lakukan, tetapi juga membangun jaringan supaya musik Indonesia bisa berperan atau semakin dikenal di dunia," ucapnya.

Fadli menuturkan, genre musik Indonesia berpotensi besar menarik perhatian audiens di luar negeri. Ia meyakini, musik dangdut dan etnik Tanah Air cukup mudah diterima oleh pasar internasional. Hanya, tetap dibutuhkan sejumlah pendekatan agar musiknya menjadi lebih visibel.

"Kita berharap ada *Indonesian waves* (gelombang Indonesia) dari musik Indonesia karena ini merupakan *soft power* yang sangat penting dan potensinya perlu kita maksimalkan," katanya.

Fadli menyampaikan, industri musik sangat potensial menggerakkan perekonomian dengan menyerap banyak tenaga kerja. Musik juga berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif lain sehingga dapat menggerakkan perekonomian lebih luas.

Akan tetapi, ekosistem musik Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembagian royalti dan pembajakan karya. Hal ini juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam konferensi tersebut.

"Ini juga dibahas oleh teman-teman di Kementerian Hukum dengan industri (musik) dan juga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Nanti akan ada pengaturan yang adil dan pasti menjadi bagian yang hasilnya bagi semua pihak harus mendapatkan *win-win solution* (solusi saling menguntungkan)," katanya.

Peran Glenn Fredly

Penyelenggaraan KMI tidak bisa dilepaskan dari peran Glenn Fredly yang menggagas edisi pertama konferensi ini pada 2018. Kala itu, Glenn menyebutkan, ada tiga aspek yang ditekankan dalam konferensi musik, yakni musik untuk pendidikan, musik untuk ekonomi, dan musik untuk ketahanan kebudayaan bangsa.

Para musisi dan pihak-pihak dalam ekosistem musik bertemu untuk membicarakan masa depan musik Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif. Musik diharapkan ikut berperan sebagai motor penggerak ekonomi bangsa.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengatakan, Glenn selalu merangkul semua musisi Indonesia dan tidak bosan untuk terus memberikan motivasi kepada musisi muda. Hal ini yang membuat musisi merasa nyaman saat memperbincangkan musik Indonesia.

"Kalau bertemu dengannya selalu hangat. Dia melakukan itu ke semua orang. Saat itu kami masih yunior dan selalu dia dukung. Konferensi ini adalah mimpi beliau untuk mendukung musik Indonesia," ujar Giring. (TAM)

Rob di Pelabuhan Sunda Kelapa



KOMPAS/RIZA FATHONI

Anak-anak bermain di genangan banjir rob di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Rabu (8/10/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mengimbau warga pesisir utara untuk mewaspadai potensi banjir rob pada 8-15 Oktober 2025 yang disebabkan fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama.

Warga Pulau Pari Tolak Reklamasi



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, berunjuk rasa di depan Kementerian Kelautan dan Perikatan (KKP), Jakarta, Rabu (8/10/2025). Warga menyoroti ancaman serius yang dihadapi Pulau Pari akibat krisis iklim dan mendesak KKP untuk mencabut izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) reklamasi proyek swasta di Pulau Pari.

Nobel Kimia 2025 untuk Penemuan Logam-Organik

Tiga ilmuwan meraih Nobel Kimia 2025 atas penemuan kerangka logam-organik. Temuan ini membuka peluang besar bagi teknologi penangkap air, penyimpan karbon, dan pengendali polusi.

JAKARTA, KOMPAS — Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Hadiah Nobel Kimia 2025 kepada Susumu Kitagawa (74), Richard Robson (88), dan Omar M Yaghi (60) atas inovasi mereka dalam mengembangkan kerangka logam-organik. Inovasi ini menjadi dasar pengembangan berbagai material yang bermanfaat besar bagi manusia dan Bumi.

Pengumuman Hadiah Nobel Kimia itu dilakukan dari kantor Akademi Ilmu Pengetahuan (AIP) Kerajaan Swedia di Stockholm, Rabu (8/10/2025), dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Nobel Prize. Kitagawa bekerja di Universitas Kyoto, Jepang; Robson berasal dari Universitas Melbourne, Australia; sedangkan Yaghi dari Universitas California Berkeley, Amerika Serikat.

Konstruksi molekuler yang dikembangkan ketiga ilmuwan dan diberi nama kerangka logam-organik (MOF) itu mampu menciptakan ruang luas dalam molekul untuk menampung gas dan zat kimia lain dalam jumlah besar.

Besarnya kapasitas ruang tersebut membuat Ketua Komite Nobel Kimia Heiner Linke menyamakannya dengan tas tangan Hermione dalam kisah Harry Potter yang mampu menyimpan banyak barang melebihi kapasitas normalnya.

Dalam kehidupan nyata, ruang besar dalam MOF itu bisa diaplikasikan untuk mengembangkan material yang bisa digunakan untuk menangkap dan menyimpan zat kimia tertentu, baik gas atau bahan kimia yang tidak diinginkan. Karena itu, material MOF ini bisa dimanfaatkan untuk menangkap air dari udara gurun, menangkap gas karbon dioksida untuk mengurangi laju perubahan iklim, hingga menyimpan gas beracun.

"MOF berpotensi besar menciptakan peluang besar yang belum diprediksi sebelumnya melalui pengembangan material yang dibuat secara khusus dengan fungsi baru," kata Linke.

Berawal dari riset Robson

Inovasi MOF ini diawali dari penelitian Robson yang pada 1989 menguji sifat-sifat inheren atom dengan cara baru. Ia menggabungkan ion positif tembaga dengan molekul yang memiliki empat ikatan atau bisa dibayangkan seperti molekul dengan empat lengan. Di setiap ujung lengan molekul tersebut terdapat ion tembaga.

Saat struktur MOF tersebut digabungkan, maka akan terbentuk kristal teratur dengan ruang rongga besar, mirip struktur berlian yang dipenuhi rongga di dalamnya. Namun, Robson menyadari, konstruksi molekuler MOF yang dikembangkannya tidak stabil dan mudah runtuh.

Dari riset tersebut, Kitagawa dan Yaghi secara terpisah berusaha mengembangkan dan memperbaiki struktur yang tercipta hingga memiliki fondasi kokoh. Antara tahun 1992 dan 2003, riset Kitagawa menunjukkan bahwa gas dapat mengalir dalam struktur MOF sehingga MOF diprediksi bisa dibuat lebih fleksibel.

Sementara Yaghi menciptakan MOF yang sangat stabil dan menunjukkan bahwa MOF dapat dimodifikasi menggunakan desain yang lebih masuk akal hingga menghasilkan konstruksi MOF yang dapat disusun dengan berbagai jenis molekul baru sesuai kebutuhan.

Menginspirasi dunia

Setelah penemuan dasar yang dilakukan Robson, Kitagawa, dan Yaghi tersebut, ilmuwan kimia di seluruh dunia telah membangun puluhan ribu MOF yang berbeda. Beberapa konstruksi MOF yang dikembangkan diyakini mampu berperan besar dalam menghadapi tantangan besar umat manusia dan Bumi.

Sejumlah konstruksi MOF yang dibuat itu mampu memisahkan PFAS (*per- and polyfluoroalkyl substances*) dari air. PFAS adalah bahan kimia berbahaya yang sulit terurai dan banyak digunakan pada produk tahan air, minyak, dan panas.

Struktur MOF juga bisa digunakan untuk mengirimkan obat ke bagian tubuh tertentu, menyimpan air dari udara kering gurun pasir, menangkap karbon dioksida untuk mengurangi dampak pemanasan global, hingga mengurangi sampah plastik. Selain itu, konstruksi molekuler MOF bisa dimanfaatkan untuk menangkap gas beracun dalam pembuatan semikonduktor, mengatalisis reaksi kimia, hingga mengurangi paparan senjata kimia.

Namun, seperti dilaporkan BBC, sejauh ini MOF hanya digunakan dalam skala kecil. Industri sedang meneliti apakah material MOF bisa diproduksi secara massal.

Beberapa uji yang dilakukan industri tersebut adalah MOF untuk memecah gas berbahaya yang dihasilkan senjata nuklir serta untuk menangkap karbon dioksida yang dihasilkan cerobong pembangkit listrik ataupun pabrik.

Dengan demikian, pemanfaatan MOF secara massal, seperti ditulis Livescience, baru akan bisa dirasakan di masa depan. "Impian saya adalah menangkap udara dan memisahkan unsur-unsur di dalamnya, seperti karbon dioksida, oksigen, atau air serta mengubahnya menjadi bahan-bahan yang bermanfaat menggunakan energi terbarukan," ujar Kitagawa melalui saluran telepon yang diperdengarkan dalam pengumuman Hadiah Nobel tersebut.

Atas kerja keras mereka, Kitagawa, Robson, dan Yaghi berhak atas hadiah uang sebesar 11 juta krona Swedia atau Rp 19,4 miliar yang dibagi rata bertiga.

Hadiah Nobel dan uang akan diserahkan dalam acara khusus yang diselenggarakan AIP Kerajaan Swedia di Stockholm pada Desember mendatang. (MZW)

INVESTASI

Perlu Alternatif Pembiayaan untuk Transisi Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS — Upaya transisi energi menuju energi baru terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Meskipun regulasi sudah diterbitkan, transisi energi akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, inovasi, serta sumber daya manusia yang mendukung.

Wakil Direktur Policy+ Kenneth Nicholas mengatakan, regulasi terkait transisi energi terbarukan telah tersedia, mulai dari Kebijakan Energi Nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, hingga Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun, investasi energi terbarukan masih terbilang stagnan.

"Kalau bicara soal kebutuhan dana, sebenarnya ada lebih kurang Rp 1,5 triliun per tahun yang dibutuhkan (untuk energi baru terbarukan)," ujarnya dalam diskusi publik "Mobilisasi Pembiayaan Alternatif dan Inovatif untuk Transisi Energi di Indonesia", Rabu (8/10/2025).

"Namun, pertanyaannya, bagaimana cara memobilisasi tersebut. Bagaimana cara kita menyinergikan kebutuhan dari *pipeline* (rencana berjalan) EBT dengan pundi-pundi investasi yang ada," tuturnya.

Kenneth menyampaikan, kesenjangan investasi energi terbarukan pun masih tinggi. Dari realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 2,6 miliar dollar AS, investasi yang tercapai baru sekitar 22 persen. Kesenjangan tersebut, antara lain, disebabkan biaya modal tinggi, infrastruktur belum memadai, serta persepsi risiko yang menghambat investasi.

Selain itu, tantangan mendasar pendanaan energi terbarukan adalah terkait *bankability* atau kelayakan suatu proyek untuk didanai lembaga keuangan. Banyak proyek energi terbarukan gagal didanai karena tak memenuhi standar risiko dari investor. Sementara kebutuhan energi kian tinggi seiring pertumbuhan industri, rumah tangga, dan layanan publik.

> ***Proyek transisi energi baru terbarukan juga perlu memperhatikan prinsip keadilan energi.***
>
> Irvan Tengku Harja

Di tingkat global, pendanaan untuk dampak perubahan iklim mencapai 1,9 triliun dollar AS. Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan yang ditargetkan sebesar 8 triliun dollar AS sampai tahun 2030. Dari jumlah yang ada pun hanya kurang dari 2 persen yang mengalir ke Asia Tenggara.

Menurut Kenneth, selain kelayakan bank dalam investasi ke proyek terkait energi terbarukan, kendala lain adalah tingginya biaya modal di Indonesia. Biaya modal atau *cost of capital* di Indonesia bahkan lebih tinggi dari India dan China. Apabila bunga biaya pinjaman tinggi, hal itu akan membuat investor menjadi enggan berinvestasi.

Inisiatif global dengan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Itu terjadi karena upaya konversi batubara dan peningkatan energi terbarukan di Indonesia belum optimal dilakukan.

Strategi

Ia menyebutkan, sejumlah strategi setidaknya bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini. Strategi itu penting untuk meningkatkan mobilisasi pembiayaan alternatif untuk transisi energi terbarukan di Indonesia.

Hal tersebut bisa dilakukan, antara lain, dengan menyusun ulang standar kelayakan bank dalam investasi proyek energi baru terbarukan. Kepercayaan bank untuk memberikan investasi pada proyek tersebut perlu ditingkatkan.

Strategi lain dengan membuat katalog investasi nasional berisi proyek-proyek energi baru terbarukan. Katalog ini memungkinkan ada kesesuaian antara pengembangan proyek dan investor potensial, seperti lembaga donor, bank, serta swasta dari dalam negeri dan luar negeri.

Menurut Kenneth, kebijakan berbasis mandat bisa dijalankan, terutama pada badan usaha milik negara (BUMN). Sejumlah BUMN bisa ditetapkan sebagai percontohan dalam menjalankan berbagai model pembiayaan dengan tata kelola yang beragam untuk proyek energi baru terbarukan.

"Kita perlu mengonsolidasi kira-kira badan-badan apa yang bisa dihubungkan dengan dukungan instrumen seperti apa agar terbentuk *first mover* dan *industry champion* untuk proyek energi baru terbarukan," ungkapnya.

Program Manager and Research Lead, Just Energy Transition and Climate Action dari The Habibie Center, Irvan Tengku Harja, menyampaikan, proyek transisi energi baru terbarukan juga perlu memperhatikan prinsip keadilan energi.

Adanya kebijakan atau standar pengalaman yang kuat diperlukan dalam proyek-proyek transisi energi agar proyek yang dijalankan tidak justru menimbulkan ketimpangan yang baru.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Praptono Adhi Sulistomo mengatakan, pemerintah mencatat kebutuhan investasi untuk pengembangan energi bersih selama 10 tahun pada 2025-2034 mencapai Rp 1.682 triliun.

Dalam program Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, pemerintah pun telah menetapkan bauran energi baru terbarukan dalam jumlah yang signifikan, baik untuk energi surya, angin, nuklir, maupun baterai. (TAN)

BAHAN BAKAR MINYAK

Campuran Bioetanol 10 Persen untuk Bensin Bakal Diwajibkan

JAKARTA, KOMPAS — Dalam dua tahun, pemerintah siap memproduksi bensin dengan campuran bioetanol 10 persen, selangkah lebih maju dari pengembangan bioetanol 5 persen saat ini. Namun, tercapainya target ini diragukan mengingat terbatasnya kapasitas produksi tebu dan pabrik olahannya di tengah ambisi swasembada gula pada saat bersamaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025), menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerapan mandatori pencampuran bioetanol sebesar 10 persen atau E10 pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Bioetanol tersebut berasal dari bahan nabati, seperti tebu dan singkong.

Langkah ini lebih maju dari pengembangan bioetanol 5 persen (E5) yang sejak Juli 2023 diimplementasikan pada bensin RON 92 milik Pertamina dengan nama produk Pertamax Green 95. Menurut Bahlil, ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan impor BBM yang mencapai sepertiga dari total konsumsi BBM per tahun.

Pemerintah berkaca dari kemajuan pemanfaatan bioetanol dengan bahan baku olahan minyak kelapa sawit untuk campuran BBM jenis solar yang ditingkatkan bertahap. Campuran yang disebut biodiesel dengan kode B itu bersifat wajib sejak 2016, dari kadar 20 persen atau B20, kemudian menjadi B40 pada 2025.

Pemerintah menyiapkan tambahan industri bioetanol, salah satunya pabrik pengolahan di Merauke, Papua Selatan. Bioetanol untuk kebutuhan ini, kata Bahlil, juga akan dipasok dari olahan singkong yang pembangunan pabriknya masih direncanakan.

"Untuk pabrik etanol ada dua, satu singkong, satu tebu. (Pabrik pengolahan) tebu kemungkinan besar itu di Merauke. Sementara singkong lagi dipetakan," tutur Bahlil.

PT Energi Agro Nusantara (Enero), salah satu anak usaha PT Perkebunan Nusantara X yang memproduksi bioetanol, menyatakan kesiapannya terkait implementasi E10 tersebut secara mandatori.

Saat ini, Enero memasok bioetanol ke Pertamina untuk menghasilkan produk Pertamax Green 95, dengan campuran bioetanol 5 persen (E5). Dari Januari hingga September 2025, Enero memasok 324 kiloliter (kl) ke Pertamina untuk dijadikan Pertamax Green 95.

"Kami siap (memasok) jika memang ada *mandatory* bioetanol dari pemerintah. Ada banyak manfaat jika pemanfaatan bioetanol ditingkatkan. Mulai dari mengurangi emisi CO_2, mengurangi impor BBM, menyejahterakan petani tebu, hingga meningkatkan pendapatan negara dari PPN," kata Direktur PT Energi Agro Nusantara (Enero) Puji Setiyawan, melalui sekretaris perusahaan I Dewa Gede Indra Kusuma Suntaka, saat dihubungi *Kompas*, Rabu (8/10/2025).

Pengembangan bioetanol berbahan tebu ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN).

Pengamat pergulaan Yadi Yusriyadi, saat dihubungi, Rabu, menilai penyediaan bioetanol yang dipercepat tidak bisa dipenuhi seluruhnya dari dalam negeri. Pasalnya, secara bersamaan, pemerintah juga mempercepat target swasembada gula untuk konsumsi pada 2026 dan swasembada gula industri yang diakselerasi dari 2030 menjadi 2027 atau paling lambat 2028.

Meski demikian, Yadi setuju jika Indonesia mau menerapkan E10 ke depannya. (ERK)

PRODUK BAJA

Menang di WTO, Ancaman Lain Masih Menghadang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait sengketa antidumping produk *stainless steel* dengan Uni Eropa menjadi kabar baik untuk meningkatkan ekspor. Namun, masih ada ancaman dari kebijakan baru kuota impor dan tarif 50 persen baja oleh Uni Eropa. Ancaman lainnya adalah gempuran produk baja murah dari China.

Putusan WTO itu tercantum dalam laporan akhir Panel WTO atas sengketa bea masuk imbalan (*countervailing duties*/CVD) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) UE terhadap produk lembaran baja nirkarat canai dari RI bernomor DS616. WTO merilis laporan itu pada 2 Oktober 2025.

Anggota Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) sekaligus Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Fedaus mengatakan, keputusan WTO menjadi angin segar di tengah ketatnya praktik proteksi perdagangan global.

"Produk kita bisa masuk kembali ke pasar Eropa tanpa tambahan *import duty*," ujar Fedaus saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Fedaus menjelaskan, dalam konteks perdagangan global, instrumen *trade remedies* seperti *safeguard*, antidumping, dan CVD merupakan perlindungan yang sah untuk menjaga industri dalam negeri dari serbuan barang murah dari luar negeri. Mekanisme ini diterapkan hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia saat ini baru menerapkan BMAD untuk produk *hot rolled plate* (HRP) dan *hot rolled coil* (HRC). Namun, produk *cold rolled coil* (CRC) dan baja hilir masih minim proteksi jika dibandingkan dengan beberapa negara yang menerapkan proteksi tarif impor yang kuat.

Negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand; serta Uni Eropa telah menerapkan tarif impor setidaknya 20 persen untuk produk baja domestiknya. Amerika Serikat menerapkan tarif impor 265,79 persen untuk CRC dan 137,76 persen untuk produk baja hilir.

Meski demikian, Fedaus mengingatkan, ancaman terbesar justru datang dari lonjakan produksi baja China yang mencapai sekitar 1,2 miliar ton per tahun, sementara permintaan domestik di negara itu terus melemah.

"Produksi di Tiongkok terlalu besar, sementara pasar dalam negerinya turun. Ekspor ke Amerika dan Eropa sudah dibatasi sehingga produk baja mereka mencari pasar baru," ujarnya.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anne Patricia mengatakan, putusan Panel WTO itu merupakan capaian penting yang membawa sinyal positif bagi dunia usaha Indonesia.

Penghapusan CVD oleh Uni Eropa berpotensi membuka ruang lebih luas bagi produk baja nirkarat Indonesia untuk kembali bersaing secara adil di pasar Eropa. Namun, kata Anne, meski hambatan CVD dihapuskan, Indonesia tetap harus berhadapan dengan kompetisi ketat dari negara pengekspor utama lainnya, seperti China, India, maupun negara-negara Eropa Timur (kecuali Rusia) yang sudah lebih dulu memiliki kapasitas besar, efisiensi tinggi, dan jejaring pasar yang kuat.

Menurut pengamat industri baja sekaligus pendiri SM Insight, Widodo Setiadharmaji, jika Uni Eropa patuh pada putusan WTO, ekspor *stainless steel* Indonesia bisa meningkat lagi. Namun, struktur ekspor baja Indonesia jauh lebih kompleks dari sekadar satu komoditas.

"Yang perlu dilihat, komponen ekspor kita itu dua, *stainless steel* dan *carbon steel*. Jangan lupa bahwa yang dimenangkan itu hanya untuk komponen *stainless steel*, bukan keseluruhan produk baja" ujarnya. (IDO)

Wacana Layanan Blokir IMEI



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang ponsel bekas menunggu pembeli di Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menggodok aturan terkait layanan blokir dan pendaftaran ulang IMEI. Aturan ini diklaim untuk memperkuat perlindungan data serta mencegah penyalahgunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia.

Pameran Allpack 2025



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengunjung hendak melihat pameran Allpack 2025 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Pameran di bidang teknologi percetakan ini diikuti oleh 500 peserta dari 20 negara. Pameran akan berlangsung hingga Sabtu (11/10).

BBM Langka, Warga Gugat Menteri ESDM

Dalam gugatannya, warga menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 1,1 juta. Nilai itu setara dengan dua kali pengisian BBM RON 98 di SPBU swasta.

JAKARTA, KOMPAS — Seorang warga Jakarta, Tati Suryati, menggugat pemerintah dan pelaku usaha penyedia bahan bakar minyak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Langkah ini imbas dari persoalan habisnya stok bensin di stasiun pengisian BBM milik swasta selama dua bulan terakhir.

Tati Suryati (51), asal Tangerang Selatan, Banten, melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke pengadilan pada 27 September 2025. Gugatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, PT Pertamina Persero, dan PT Shell Indonesia. Ia menuduh para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal menjamin ketersediaan energi secara merata bagi masyarakat.

Dasarnya adalah Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasal ini menyebutkan, setiap badan usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan izin dari Kementerian Perdagangan.

Tati datang ke pengadilan untuk memenuhi agenda sidang perdana yang diagendakan pada Rabu pukul 10.00. Ia mengaku sebagai pengguna produk BBM dengan oktan 98 di beberapa SPBU swasta. "Saya membeli BBM di SPBU swasta per dua minggu sekali, perkiraan bisa mencapai 30 liter sekali isi," katanya.

Masalahnya, sejak 14 September 2025, ia sulit membeli bensin. Stok BBM di SPBU swasta langganannya habis. Ia pun terpaksa mengisi mobilnya dengan BBM RON 92.

Dalam gugatannya, Tati menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 1,1 juta. Nilai itu setara dengan dua kali pengisian BBM RON 98 di SPBU Shell berdasarkan riwayat pengisian terakhir yang terekam di aplikasi Shell sebagai bukti di pengadilan. Ia juga menuntut ganti rugi senilai Rp 500 juta, setara harga beli kendaraan yang ia pakai. Pertimbangannya, ia khawatir penggunaan BBM RON 92 berdampak pada performa mobilnya.

Sidang perdana terkait gugatan persoalan kelangkaan BBM di stasiun pengisian swasta batal dilaksanakan karena absennya pihak Shell dari panggilan. Majelis hakim yang diketuai Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani menunda sidang. Sidang pengganti dijadwalkan pada Rabu (15/10).

Kuasa hukum penggugat, Boyamin Saiman, menyayangkan batalnya sidang. "Sebenarnya gugatan ini mewakili kepentingan masyarakat yang menginginkan bisa membeli BBM di SPBU swasta," kata Boyamin.

Tujuan gugatan

Meski hanya mewakili individu, menurut Boyamin, gugatan ini menjadi alternatif selain metode *class action* atau gugatan perwakilan kelompok yang membutuhkan proses lebih panjang. Langkah ini diharapkan bisa memaksa pemerintah dan pelaku usaha, termasuk Pertamina, untuk segera mengisi BBM di SPBU swasta. "Masyarakat sudah membantu negara dengan tidak mengonsumsi BBM bersubsidi di SPBU Pertamina dan berpindah ke SPBU swasta. Jadi, kalau cuma membuka keran impor lagi, apa susahnya, sih?" ujarnya.

Melihat perkembangan terbaru dalam isu kelangkaan BBM di stasiun pengisian swasta, Boyamin menilai, pemerintah terlalu memaksakan penyediaan BBM melalui Pertamina kepada swasta. Dalam perkembangannya, pengadaan BBM dasar oleh Pertamina ditolak swasta karena mengandung etanol 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai, gugatan masyarakat dalam kasus ini bagus untuk kondisi tata kelola BBM hari ini. "Jika semangatnya memberikan peringatan kepada pemangku kepentingan dan memberikan edukasi masyarakat terkait BBM dan masalah energi, bagus juga," katanya.

Masalah ini sebenarnya sudah berusaha diselesaikan oleh Menteri ESDM dan Komisi XII DPR. Pertemuan Menteri ESDM dan manajemen lima SPBU swasta pada 19 September 2025 menghasilkan penugasan impor BBM murni oleh Pertamina untuk kebutuhan swasta.

Selanjutnya pada Rabu (1/10), DPR menggelar rapat terbuka bersama Kementerian ESDM dan perusahaan penyediaan SPBU, seperti Pertamina, Shell, PT Aneka Petroindo Raya (APR/BP AKR), PT AKR Corporindo Tbk (AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), dan ExxonMobil Lubricants Indonesia (ExxonMobil). Rapat itu membeberkan kronologi kelangkaan BBM hingga perkembangan negosiasi pembelian BBM terakhir.

Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (7/10), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kandungan etanol yang menjadi hambatan penyediaan BBM kepada pihak swasta melalui impor oleh Pertamina tidak berdasar. Alasannya, temuan itu tetap memenuhi standar pemerintah.

"Seluruh minyak atau BBM yang didistribusikan ke SPBU, baik punya Pertamina maupun swasta, diuji lewat standar pemerintah, lewat Lemigas. (Kandungan) etanol itu selama di bawah 20 persen tidak ada masalah, dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin sudah memenuhi standar," ujarnya.

Terkait negosiasi pembelian BBM oleh swasta, menurut informasi yang didapat Bahlil, hal itu masih terus berjalan. "Pembicaraan masih terus. Yang pasti dari kita juga membuka diri terhadap SPBU swasta. Saya juga sudah menyampaikan di mana-mana agar Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini, agar harga di masyarakat tidak terpengaruh," tuturnya.

Negosiasi pembelian BBM yang masih alot ini pun membuat perusahaan swasta kehabisan stok BBM. Shell Indonesia sejak Jumat (3/10) mengumumkan di media sosial bahwa stok bensin mereka tidak lagi tersedia di semua SPBU. Kini, mereka hanya melayani penjualan produk BBM diesel.

BP Indonesia melalui balasan komentar pengguna media sosial juga menyampaikan produk RON 92 dan 95 mereka tidak lagi tersedia Rabu kemarin. SPBU Vivo melalui situs resminya mengumumkan, stok BBM RON 90 dan 95 mereka tidak lagi tersedia. Sementara itu, stok RON 92 hanya tersedia terbatas di 10 dari 17 SPBU mereka di Jakarta. (ERK)

SEREMONIA

ALLPrint Indonesia 2025 Digelar 8–11 Oktober di JIExpo Kemayoran

Pasar percetakan komersial Indonesia menunjukkan prospek cerah, terutama di segmen pengemasan, periklanan, dan penerbitan. Secara global, industri ini diproyeksikan mencapai nilai 541,1 miliar dollar AS pada 2031 dengan pertumbuhan tahunan 2,5 persen.

Menangkap momentum tersebut, Krista Exhibitions resmi membuka ALLPrint Indonesia 2025 untuk ke-26 kalinya. Pameran internasional ini digelar pada 8–11 Oktober 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, menghadirkan inovasi dan teknologi terkini dalam industri percetakan dan grafika. Tahun ini, pameran turut diramaikan ajang Indo Sign & AD, Textile Printing, Print For Pack, Inter Corrugated, dan Pro Label Asia.

CEO Krista Exhibitions, Daud D Salim, menyampaikan, lebih dari 500 perusahaan dari lebih 20 negara berpartisipasi dalam pameran ini, termasuk dari Asia, Eropa, dan Australia. Kehadiran berbagai pelaku industri internasional menunjukkan besarnya kepercayaan terhadap potensi pasar Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri percetakan dan kemasan di kawasan Asia. "Komitmen ALLPrint Indonesia menjadi platform bisnis inklusif yang mendorong kolaborasi, transfer teknologi, dan inovasi berkelanjutan bagi kemajuan industri grafika nasional," katanya, Rabu (8/10/2025).



Kesuksesan ALLPrint Indonesia 2025 didukung berbagai kementerian dan asosiasi industri seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, PPGI, ASPERAPI, PITTSINDO, dan APPI. Acara ini juga menghadirkan beragam seminar dan *talkshow* bertema teknologi percetakan terkini, termasuk topik RFID, *zero defect printing*, hingga tren warna. Tak hanya itu, sesi *networking* eksklusif mempertemukan pelaku industri lintas sektor untuk memperluas jejaring dan menjajaki kolaborasi strategis. ALLPrint Indonesia 2025 pun menjadi ajang penting bagi industri percetakan, *advertising*, *signage*, dan manufaktur Tanah Air. [*]

Saldo Anggaran Lebih Disalurkan ke BPD

Di tengah pemangkasan transfer ke daerah, pemerintah menyalurkan saldo anggaran lebih ke bank daerah untuk mendorong ekonomi lokal.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya merangsang pergerakan ekonomi daerah dengan menyalurkan sebagian saldo anggaran lebih yang terparkir di Bank Indonesia ke bank-bank pembangunan daerah atau BPD. Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sektor riil di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan pemangkasan dana transfer dari pusat.

Seusai menghadiri acara "Prasasti Luncheon Talk" di Jakarta, Rabu (8/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, saat ini terdapat Rp 275 triliun kas pemerintah pusat berupa saldo anggaran lebih (SAL) yang terparkir di Bank Indonesia.

Melalui penempatan dana tersebut di bank pembangunan daerah (BPD), pemerintah ingin memastikan uang negara bekerja secara produktif di daerah dan memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi setempat.

Walakin, Purbaya akan mengkaji terlebih dahulu berapa besaran likuiditas yang mampu diserap BPD. "Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka (BPD), mereka bisa terima berapa. Saya tidak akan paksa mereka, tapi (Bank) DKI sepertinya mau, Bank Jatim juga. Kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih merata," ujarnya.

Rencana disambut positif oleh Direktur Utama BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Santoso Rohmad. Ia menyatakan siap mendukung kebijakan penempatan dana pemerintah ke BPD. Menurut dia, penempatan dana tersebut akan menambah likuiditas di sistem keuangan BPD. Dengan demikian, BPD diharapkan mampu memacu penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Itu (penempatan dana) akan membantu, apalagi ada pengurangan dari transfer daerah itu akan sangat membantu. Hanya saja, setiap bank itu, kan, kemampuannya beda-beda," katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Sebagai tahap awal, pemerintah berencana menempatkan dana Rp 5 triliun-Rp 10 triliun di Bank DKI dan Bank Jatim. Langkah ini bertujuan agar likuiditas di perbankan daerah mengalir lebih cepat ke pelaku usaha berskala kecil dan menengah. Menurut Menkeu Purbaya, likuiditas yang ditempatkan BPD berpotensi terserap lebih cepat oleh usaha berskala kecil ketimbang likuiditas bank Himbara.

Namun, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbicara lain. Dari sisi likuiditas, bank-bank daerah telah relatif longgar, tecermin dari rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio*/LDR) BPD per Juni 2025 sebesar 83,28 persen, menurun dari posisi akhir Desember 2024 sebesar 85,91 persen.

Dari sisi intermediasi, OJK mencatat pertumbuhan kredit BPD per Juni 2025 mencapai 4,06 persen, yakni menjadi Rp 661,17 triliun dari periode Juni 2024 sebesar Rp 635,37 triliun. Adapun pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) dilaporkan tumbuh 2,36 persen menjadi Rp 779,31 triliun dari posisi Juni 2024 sebesar Rp 761,32 triliun.

Efektivitas penyaluran

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, kelemahan penyaluran kredit ini akan menjadi tantangan bagi kebijakan injeksi dana langsung ke BPD. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada mekanisme penyaluran dan penggunaan dana di sektor riil.

Rizal mengingatkan pentingnya skema *conditional placement* atau penyaluran bersyarat agar dana tidak mengendap lagi di perbankan. "Tanpa mekanisme penyaluran bersyarat, kebijakan ini hanya akan memindahkan dana menganggur dari kas pusat ke daerah tanpa efek berganda terhadap ekonomi," ujarnya.

Sebagai contoh, pemerintah dapat mewajibkan BPD menyalurkan dana itu ke sektor produktif, seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur daerah, dalam jangka waktu tertentu. Dengan asumsi *credit-output elasticity* sekitar 0,25, setiap Rp 10 triliun dana yang ditempatkan di BPD berpotensi menambah produk domestik regional bruto sekitar Rp 2,5 triliun. Jika penyalurannya tepat, mobilisasi dana pusat ke BPD bisa mendorong perekonomian lokal.

Tantangan lain dari kebijakan ini adalah penumpukan dana pemerintah daerah di perbankan. Kemenkeu mencatat, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp 233,11 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Kondisi itu bisa menimbulkan beban biaya dana tambahan bagi BPD kendati Menkeu sebelumnya telah memastikan bunga simpanan pemerintah di BPD hanya 80 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau sekitar 3,8 persen.

Fiskal daerah

Langkah mobilisasi dana ke daerah ini ditempuh pemerintah di tengah berkurangnya aliran dana transfer ke daerah. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keluhan kepada Menkeu atas rencana pemangkasan transfer ke daerah 2026 sebesar 19,8 persen dari *outlook* tahun ini jadi Rp 693 triliun.

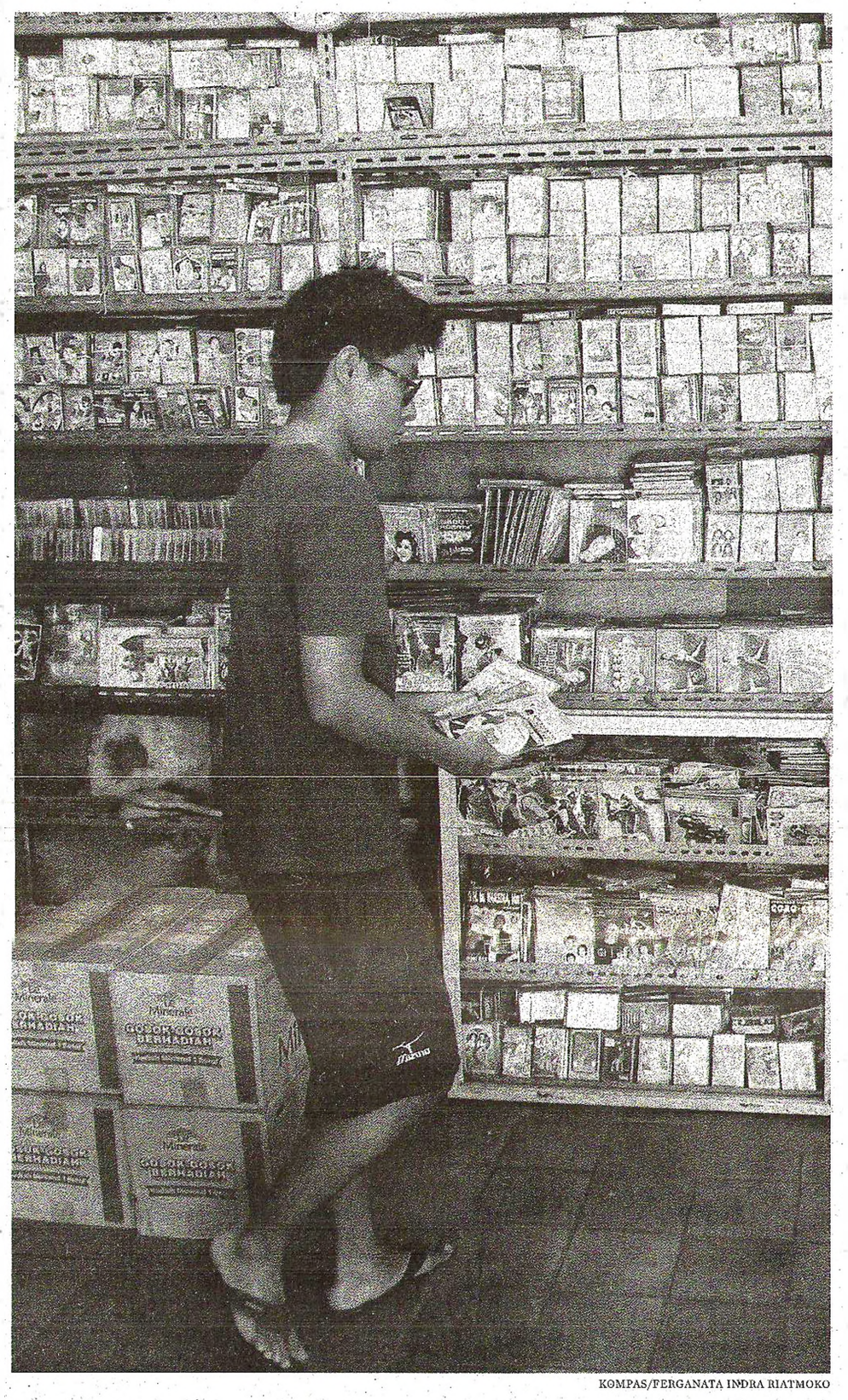
Pada Selasa, Menkeu Purbaya bertemu sejumlah gubernur dengan pembahasan utama soal pemangkasan dana transfer ke daerah. Turut hadir Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum APPSI Al Haris, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Al Haris mengatakan, pemotongan transfer ke daerah akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah, terutama untuk membayar belanja pegawai dan melanjutkan proyek infrastruktur. Kebijakan pemotongan dana bagi hasil (DBH) juga berpotensi menggerus prinsip otonomi daerah yang dibangun lebih dari dua dekade.

Senada, Sherly mengungkapkan, DBH di provinsinya dipotong hingga 60 persen, sementara dana alokasi umum habis untuk belanja pegawai. "Akibatnya, ruang untuk membangun jalan dan jembatan sebagai infrastruktur dasar semakin sempit," ujarnya.

Menanggapi kritik itu, Purbaya menegaskan, pengurangan transfer ke daerah bukan upaya menurunkan desentralisasi fiskal, melainkan dorongan agar daerah memperbaiki tata kelola keuangannya. Ia menilai masih banyak dana pemda mengendap di perbankan akibat rendahnya realisasi belanja. (DIM/AGP)

Toko Kaset di Surakarta



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Deretan kaset dipajang di Toko Kaset Harapan di kawasan Ngarsopuro, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025). Toko kaset tersebut menjadi toko kaset terakhir di Surakarta. Perkembangan musik digital membuat tempat usaha penjualan kaset di berbagai daerah gulung tikar.

CADANGAN DEVISA

Mengapa BI Menyimpan Cadangan Emas?

Di tengah harga emas yang terus melambung dan seakan tak kenal jenuh mencetak rekor baru, Bank Indonesia dikabarkan menjual sebagian cadangan emasnya. Mungkin kedengarannya lazim layaknya masyarakat menjual aset investasinya guna membiayai kebutuhan tertentu.

Namun, kalau memang benar demikian, muncul sekelumit pertanyaan mendasar, mulai dari untuk apa bank sentral menjual cadangan emasnya, apakah mungkin bank sentral juga merasakan butuh uang (BU) seperti yang dialami masyarakat hari-hari ini, hingga kenapa bank sentral memiliki cadangan emas?

Ada baiknya kita cari tahu terlebih dahulu duduk perkara di balik kabar BI menjual cadangan emasnya.

Adalah World Gold Council yang pertama kali mengabarkan ihwal BI yang telah menjual cadangan emasnya tersebut. World Gold Council merupakan organisasi nirlaba internasional yang terdiri atas sejumlah perusahaan tambang emas terkemuka.

Dalam laporan bertajuk "Central Bank Gold Statistics: Central Bank Gold Buying Rebounds in August", World Gold Council membahas tren pembelian emas oleh bank-bank sentral global. Laporan yang dipublikasikan pada 3 Oktober 2025 itu menyebutkan, BI telah menjual 13 ton cadangan emasnya, masing-masing 11 ton pada Juli 2025 dan 2 ton pada Agustus 2025.

World Gold Council mendasarkan pernyataan itu pada data cadangan emas bank sentral dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan laporan dari bank sentral masing-masing. Berdasarkan data IMF, cadangan emas BI per Agustus 2025 adalah 2,11 juta *fine troy ounce* atau 72,34 ton.

Cadangan ini turun 1,88 ton dibandingkan dengan Juli 2025 yang mencapai 74,39 ton serta melanjutkan penurunan sebesar 11,25 ton dari Juni 2025 yang mencapai 86,74 ton. Dengan demikian, cadangan emas BI berkurang sekitar 13 ton atau senilai Rp 22,82 triliun jika disetarakan dengan harga emas dan kurs dollar AS dalam periode itu.

BI membantah. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, BI tidak menjual 11 ton emas. Ia meminta semua pihak merujuk perkembangan cadangan devisa pada laman resmi BI.

Perkembangan cadangan emas BI dalam laman resmi statistiknya dicatat dalam bentuk nilai. Merujuk Special Data Dissemination Standard (SDDS) mengenai *international reserves and foreign currency liquidity*, cadangan emas BI per Agustus 2025 tercatat 8,81 miliar dollar AS.

Jika dihitung berdasarkan harga emas per akhir Agustus 2025 yang mencapai 3.449,3 dollar AS per troy ons, nilai cadangan emas tersebut setara dengan 2,55 juta troy ons atau sekitar 87,42 ton. Angka ini mirip dengan perhitungan IMF sebelum terjadi penurunan pada Juli-Agustus 2025.

Salah satu cara membuktikan ada penjualan emas atau tidak adalah dengan membandingkan tingkat pertumbuhan nilai cadangan emas dengan kenaikan harga emas global dalam periode yang sama. Jika pertumbuhan cadangan emas lebih rendah, bisa dibilang ada indikasi penjualan emas oleh BI. Jika pertumbuhannya selaras, kemungkinan besar BI tidak menjual cadangan emas.

Menggunakan logika ini dengan dasar data BI, cadangan emas BI tumbuh 24,77 persen dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2025. Ini sejalan dengan kenaikan harga emas global sebesar 23,31 persen pada periode yang sama.

Artinya, besar kemungkinan BI tak menjual cadangan emas sebagaimana disebutkan World Gold Council. Namun, jika data IMF rujukannya, logika yang sama mengindikasikan adanya dugaan BI jual emas.

Mengapa emas

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, emas digunakan sebagai dasar penilaian nilai tukar mata uang di berbagai negara. Sistem ini dikenal sebagai Standar Emas Klasik.

Dalam sistem ini, bank sentral diharuskan memiliki cadangan emas yang sebanding dengan jumlah uang kartal yang beredar. Namun, sistem ini mengalami perubahan signifikan saat dunia mulai beralih ke Sistem Bretton Woods pada 1944 hingga 1971. Dalam sistem tersebut, emas tak lagi menjadi standar utama secara langsung, tetapi diganti dollar AS sebagai satu-satunya mata uang yang dijamin oleh emas. Mata uang negara lain pun mengaitkan nilainya terhadap dollar, menjadikan emas sebagai bagian dari sistem keuangan global secara tak langsung.

Kalau melepas sebagian emas sedikit, harganya bisa mendapatkan gain (keuntungan). Jadi, gain itu bisa menjadi cadangan tambahan.

Perubahan kembali terjadi pada 1971 ketika sistem moneter global beralih ke sistem nilai tukar mengambang atau Era Mata Uang Fiat. Dalam sistem ini, nilai mata uang tidak lagi berbasis pada komoditas seperti emas, tetapi bergantung pada kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Sistem fiat ini masih digunakan hingga kini.

Meski emas tak lagi menjadi acuan utama, bank sentral di berbagai negara, termasuk BI, masih menyimpan emas sebagai bagian dari cadangan devisa. Terdapat tiga alasan utama mengapa emas tetap dipertahankan: sebagai aset lindung nilai (*safe haven*), alat diversifikasi portofolio, dan untuk menjaga kepercayaan pasar.

Ekonom dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19, banyak bank sentral, terutama di negara-negara yang bukan penghasil emas, mulai menambah porsi emas dalam cadangan devisanya sebagai bentuk diversifikasi.

"Banyak negara *emerging market* yang mendiversifikasi cadangan devisanya. Kalau kita lihat sekarang, cadangan devisanya yang dalam bentuk emas itu sudah lebih tinggi daripada cadangan devisanya yang dalam bentuk euro," katanya saat dihubungi, Selasa (7/10/2025).

Fenomena ini turut mendorong lonjakan harga emas global. Saat ini, harga emas mencapai 4.020 dollar AS per troy ons, mengalami kenaikan sebesar 54,14 persen secara tahunan. Berdasarkan data SDDS BI, cadangan emas yang dimiliki BI per akhir September 2025 tercatat sebesar 9,93 miliar dollar AS atau sekitar Rp 165,75 triliun. Angka ini setara dengan 6,67 persen dari total cadangan devisa BI yang berjumlah 148,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.482,1 triliun.

Sementara itu, porsi terbesar dari cadangan devisa BI masih berupa mata uang asing utama, yakni sebesar 86,69 persen. Sisanya terdiri dari aset internasional yang diterbitkan IMF dan alokasi cadangan dari IMF. Secara keseluruhan, cadangan devisa berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, membayar utang luar negeri, serta meningkatkan kepercayaan investor, terutama saat terjadi krisis ekonomi.

Penjualan cadangan emas oleh bank sentral bukanlah hal yang keliru. Praktik ini lazim dilakukan selama tetap mempertimbangkan stabilitas dan efisiensi pengelolaan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty berpendapat, penjualan cadangan emas oleh bank sentral, antara lain, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi pengelolaan portofolio cadangan devisa.

"Kalau melepas sebagian emas sedikit, harganya bisa mendapatkan *gain* (keuntungan). Jadi, *gain* itu bisa menjadi cadangan tambahan, mungkin ada kaitan dengan kenaikan harga emas," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut M Rizal Taufikurahman dari Indef, penjualan emas lebih ditujukan untuk menjaga likuiditas, menyeimbangkan portofolio aset, dan merespons tekanan eksternal. Beberapa negara seperti Rusia dan Turki juga pernah menjual emas untuk mendukung kebijakan domestik, seperti pencetakan koin atau penyesuaian fiskal.

Akhirnya keputusan terkait cadangan emas berada sepenuhnya di tangan bank sentral. Namun, penting untuk memastikan keputusan tersebut bebas dari tekanan politis yang dapat merusak kepercayaan dan stabilitas ekonomi.

(AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO)

OTO MOTIF

MOBIL DIJUAL

MERCEDES

Mercy CLS 63. Tahun 2012. Warna : **.Abu-Abu , Full AMG. KM : 35 Ribuan.** Asli Service Record. Jual Rp 710 Jt. Hubungi : Dona +62 813- 8905- 1838

TOYOTA

Toyota Alphard tahun 2022 ***** warna Hitam. ***** Hubungi WA : *****0813-2561-9898 *****

Venturer Diesel 2021 Abu-Abu sngt mulus istimewa Tanpa Cacat Banyak Optionalnya 439jt TDP.69jt Angs.9jt @OTO568.COM # 081.680.1214

RAGAM

HIBURAN & S.BUDAYA

Wayang Milenial Indonesia-Pentas jam 20.00 - Tgl.11. okt 2025 di Yudonegaran Yogyakarta - Tgl.08 Nov 2025 di Unnes Semarang

PENERJEMAH

Tjan Sie Tek & Partners "Indonesia-Inggeris" VV Dok. Perusahan / Pribadi, Terdaftar Kedutaan AS,Sing,UK,Aust,DLL. WA 0813 86676868,0838 72014126 www.tjansietek.com (Sejak Tahun1977)

PERHIASAN

Beli arloji rolex,patekP,berlian,ruby Permata,Saphire dll.Toko King Arloji Jl.Kyai Maja no.1B dpn psr Mayestik (terima jual sementara) 0817115416

DAERAH-DAERAH

BOGOR

Villa dijual LT:6.Ribuan*Villa 1:*5KT 5KM. **Villa 2:** 1KT, 2KM. Dapur Luas, Kolam Renang, View Gunung Salak dan Pangarango,Hubungi 0812 8682 6111

DENPASAR

Hotel *4 SHM 5Lt 2210/ 7300 m2 room 120,Seminyak 250m pantai dkt Atlas 120 kmr,Pool occ 88% psr 300M Bu 120 M AnnaVgh 081331750518 TP

SURABAYA

Dijual Tanah Siap Bangun Golf View Citraland Surabaya Barat Lt.2000/ Lt.4000/Lt.6000 ada banyak pilihan Yeny Brighton Graha 082232303075

KEHILANGAN

Hilang BPKB Grand Livina B 1766 TON An SV Theresina Lestari S. Almt : JL Swadaya I no 15 RT 06/04 Cililitan Jkt

RAGAM

Hilang BPKB & STNK Mobil Honda BRV 1:5, Tahun 2016, T-1526-TR, A/N: Nurul Ulpah, MHRDG1750GJ603125, L15Z12513368. Ttd Supardi

Hilang BPKB Motor Honda NF 100, Tahun 2002, B 4609 TAF, A/N : Yusnita, MHIKEV8122K243931, KEV8E12408 08. Ttd Supardi

Hilang Bpkb Mts Canter Colt Dsl 2013 Nopol B9378PDC Noka: MHM FE73P3DK004585 Nosin:4D34TJ8 6921 A/n PT.Balakosa Tri Kirana

Hilang Bpkb(R2)Yamaha BK6-R MT 2021 Biru Nopol.B5607 TIP Noka: MH3RG4710MK153079 Nosin: G3J6E0316890 A/n Adityia Anami

Hlg BPKB Avanza Nopol BA2355ZL a.n Adhe Ariesca.Noka MHFM1BA3J6K0 10917.Nosin DB70841. Ttd. Eka Hendri

Hlg BPKB Mbl Toyota Kijang KF70 Th 2000 B 1307 EMP Hijau Metalik An. Young Gomulya NR: MHF11KF70000 29736 NM : 7K0307760

Hlg SHM no.5222,an.Syakuri Tauhid, L: 22m², Jl. Gang H. No.9A, RT 001 RW 11,Cempaka Putih Barat Jakpus. Hub : 08158179943, 085219909790

Telah Hilang BPKB & STNK Nomor Polisi : B1912YK Nomor Mesin : 22SEC0 45000120 Nomor Rangka: S76T03405 An. Dinni Hayyati.

Telah Hilang BPKB Mobil Renault Duster Nomor Polisi: B2655PFH Nomor Rangka : MKS HSRA55HK000313 Nosin: K9K8796E069024 An Johanna Aprilia

Telah Hilang BPKB Motor Honda Beat Hitam Nomor Polisi : B5501 TTF Nora : MH1JME 110RK009290 Nosin: JME1E1009391 An Johanna Aprilia

Telah Hilang BPKB Motor Honda Vario Hitam Nomor Polisi : B3870 UPY Nora : MH1JFV 119JK848904 Nosin: JFV1E1854606 An Angga Tristiyanto.

JAWA BARAT

Hilang BPKB mobil no.M13798469, nopol: E1709KQ, an: Jamaludin, Desa Semplo, Palimanan, Cirebon

Hilang BPKB No:H-00229-I,NoPol: H-2920-ACC a/n:Suci Jayanti Ttd: Suci Jayanti

Hilang BPKB No:U00360298,NoPol: T-2690-JD, a/n: Muna Maemunah Ttd: Muna Maemunah

Hilang BPKB No:V02875546,NoPol: D-4129-VFP a/n:Erni Kusumah Ttd: Erni Kusumah

Hilang BPKB No:WD0146127,NoPol: D-1519-NG, a/n: Wahdan Mauli Ttd: Wahdan Mauli

Hilang BPKB:L-13119760, D-2038 -ZBX, a/n: Detri Hasna Fadhila Ttd: Detri Hasna Fadhila

JAWA TENGAH & DIY

Hilang Bpkb spm Honda K2596HF An. Karsono Ngembak Rt 008/002 Purwodadi Grob

Hilang Bpkb spm Honda K5094IZ An. Kustiyah Ngrao Utara Rt 005/003 Pakis Kradenan Grob

Hilang Stnk spm Honda K3266IJ An. Muhammad Fajar Santoso Grasak Rt 6/7 Sulursari Gabus Grob

Hilang Stnk spm Honda K5639BMF An. Ratna Kusumawardani Jeketro Rt 04/01 Gubug Grob

Hilang Stnk spm K5592AYF An. Ariana Herawati Sileman Rt 003/007 Jono Tawangharjo Grob

Hlg BPKB AB5377EA NoKa MH1JM-1111GK131050, NoSin JM11E112-4768 an.Agam, Gedongtengen YK

PROPERTI

APARTEMEN

DIJUAL

Apartement dijual Grand Madison Central Park GM 15J Ukuran 58.3 m²--- 2 KT , 2 KM , 3 AC , kitchen set. Minat Hubungi : 08161928818

Apt Golf Hills Pondok Indah-------- ------180sqm--3Bdr--View Pool------- harga Sangat Amat Murah------Rp.3,8M Evelyn--0 8 1 2992 3 1 8 8--ERA

RUMAH DIJUAL

JAKARTA SELATAN

Dijual Rmh Jl.Terusan Hang Lekir V 3 KT, 3 KM, LT. 573 / LB. 400, SHM Strategis, Good Invest, Harga 30 M RWSignature - Aldila 081287776761

Dijual rumah di Wijaya IV Kby Baru LT 580 / LB 283, 4+2KT / 4+1KM, SHM Eksklusif, Strategis, Rp 37 M (Nego) RWSignature - Mario 0811-1338-070

TANAH DIJUAL

JAKARTA SELATAN

Area Pakubuwono---------- ---------Sebelah gedung GKY--------- 2752m²-------izin komersial puluhan Lt Evelyn--081 2992 3188--ERA

RUANG USAHA

DIJUAL

Dijual Gudang JIEP Pulo Gadung LT.9.500 / LB.4.188, SHGB, Rp 88 M Strategis, Good Inv, cocok utk Logistik RWS ignature - Aldila 081287776761

RUMAH DIKONTRAKKAN

Jln Melati No.55 Ampera,Jaksel. 954 m². S.Pool, Kebun Luas, Parkir Luas, Bs Untk Office,Cafe.081281824777

PASAR SENI ITB

Dari Kampanye Naik Angkutan Kota hingga Mitigasi Masalah Sampah

Cornelius Helmy Herlambang

Pasar Seni ITB kembali digelar setelah 11 tahun absen. Ajang ini kembali akan menjadi kesempatan bagi seniman hingga pengunjung merespons zaman dan kondisi kota sekaligus tempat belajar apa saja bagi siapa saja yang datang.

Pilihan warna hijau, kuning, merah, dan biru yang dibubuhkan di atas tas tote itu mencolok mata. Namun, gambar di atas tas itu mengundang penasaran.

Dilihat lebih cermat, gambarnya seperti peta bagi mereka yang hendak datang ke Institut Teknologi Bandung (ITB) menggunakan angkutan kota, setidaknya dari 12 daerah di Kota Bandung.

Jika datang dari Dipati Ukur, Kosambi, atau Arcamanik, misalnya, warga bisa menggunakan angkot nomor 18. Sementara dari Terminal Ledeng dan Cikutra dapat menaiki angkot 05. Apabila datang dari Ciroyom dan Paris van Java Mall, memakai angkot nomor 06.

Sebagai penegasan bahwa desain tas tote itu semacam panduan sederhana, ada ajakan dalam bahasa Sunda, "Ulah Repot, Hayuk Ngangkot". Artinya, 'jangan repot, ayo naik angkot'.

Tas tote itu adalah satu dari berbagai *merchandise* yang dikeluarkan Pasar Seni ITB 2025 yang bakal digelar pada 18-19 Oktober 2025.

Pasar Seni ITB pertama kali digelar tahun 1972. Setelah itu, ajang ini digelar setiap empat tahun sekali. Di tahun terakhirnya, 2014, diklaim 700.000 orang datang berkunjung.

Terinspirasi dari *art fair* di Amerika Serikat, ajang ini menjadi ruang jual-beli karya seni. Tahun ini, tercatat ada 250 *tenant* seniman hingga UMKM meramaikan acara. Namun, bakal ada juga penampilan musik Project Pop hingga Bottlesmoker.

Adapun tahun ini, tema yang diambil adalah "Setakat Lekat: Laku, Temu Laju". Lewat tema ini, Pasar Seni ITB hendak menjadi wadah sekaligus respons keberagaman praktik seni lintas disiplin, komunitas, dan generasi yang kini berada antara realitas nyata dan maya sekaligus.

Minimalkan kemacetan

Akan tetapi, *nyeni* bukan satu-satunya yang utama. Ada kampanye besar yang dilakukan penyelenggara untuk kota yang lebih baik. Menggunakan angkot, setidaknya untuk datang ke Pasar Seni ITB, misalnya, sangat penting di tengah kemacetan yang masih menyelimuti Bandung.

Menjadi ibu kota provinsi dan destinasi wisata, Bandung masih akrab dengan kemacetan. Satu dari sekian banyak penyebabnya adalah kualitas transportasi umum yang belum ideal yang membuat warga enggan menggunakannya.

Berdasarkan data Tomtom Traffic Index 2024, Bandung bahkan disebut sebagai kota paling macet di Indonesia. Untuk menempuh 10 kilometer saja, dibutuhkan waktu 32 menit 37 detik.

Dengan kondisi ini, Ketua Umum Pasar Seni ITB 2025 Zusfa Roihan mengatakan, Pasar Seni ITB tidak ingin menambah beban kemacetan di Bandung. Potensi itu bisa saja terjadi. Tahun ini, diperkirakan sebanyak 600.000 orang datang ke acara ini tiap hari.

"Bakal ada kerinduan warga terhadap Pasar Seni ITB. Ajang ini terakhir kali digelar 11 tahun lalu. Oleh karena itu, kami berharap ajakan naik angkot ke lokasi bisa ikut meminimalkan dampak macet yang muncul," katanya.

Zusfa mengatakan, panduan peta angkot tidak sendirian meminimalkan kemacetan Bandung di hari-H. Panitia juga sudah menyediakan kantong parkir. Namun, lokasinya memang tidak dekat dengan kompleks ITB.

"Ada empat yang kami sediakan, dari Balai Kota Bandung, Bandung Indah Plaza (BIP), Monumen Perjuangan Rakyat Jabar, dan Stasiun KA Bandung. Dari sana, pengunjung disediakan (kendaraan) *shuttle* gratis," ujarnya.

Namun, ia memperkirakan kendaraan *shuttle* tidak akan cukup mampu melayani semua pengunjung. Solusinya, pengunjung diajak berjalan kaki. Jarak ITB dengan Balai Kota, BIP, dan Monumen Perjuangan berkisar 1-2 kilometer, sedangkan dari stasiun KA sekitar 5 kilometer.

Selain macet, sampah juga rawan menjadi masalah kota. Sejak awal Oktober 2025, pembuangan sampah dari Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dibatasi.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6174/PBLS.04/DLH perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

Berdasarkan aturan itu, Kota Bandung hanya boleh membuang 981,31 ton sampah per hari. Padahal, potensi sampah di Bandung mencapai 1.500 ton per hari.

Zusfa mengatakan, pihaknya juga paham dengan konsekuensi itu. Apalagi, potensi sampah dari Pasar Seni ITB sebesar 4 ton per hari atau 8 ton dalam dua hari penyelenggaraan. "Kami sudah siapkan mitigasinya," katanya.

Sejauh ini, Zusfa menyebut sudah bekerja sama dengan pelaku budidaya *maggot* dan bank sampah di Kota Bandung. Sampah organik yang telah dipilih akan mereka angkut saat itu juga. Dia mengatakan, tak semua sampah akan terolah, tapi harapannya upaya itu bisa mengurangi sekitar setengahnya.

"Nantinya, di acara, kami sudah melarang penggunaan kemasan plastik dan *styrofoam*. Botol minuman plastik juga tidak akan masuk lokasi. Sebagai gantinya, kami sediakan banyak *water station*," ujarnya.



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Foto arsip memperlihatkan sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mengikuti arak-arakan menyambut penyelenggaraan Pasar Seni ITB 2010. Setelah vakum 11 tahun, Pasar Seni ITB kembali digelar pada tahun 2025.



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pantulan wajah keluarga santri tampak di layar yang menampilkan siaran langsung proses evakuasi korban runtuhnya mushala Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025). Pada Jumat pukul 18.00 WIB, delapan korban meninggal ditemukan. Semua korban meninggal dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim.

Korban di Al-Khoziny Bukan Sekadar Angka

Korban bangunan runtuh di Pesantren Al-Khoziny yang sudah teridentifikasi 34 orang dari total 67 jenazah. Keluarga korban berharap keadilan.

Ambrosius Harto Manumoyoso/Runik Sri Astuti/Dahlia Irawati

Tim Identifikasi Korban Bencana atau Disaster Victim Identification dari Polda Jawa Timur telah mengumumkan identitas 34 korban bangunan ambruk di Pesantren Al-Khoziny, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Masih ada 33 kantong jenazah yang sedang diidentifikasi di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya.

Para korban adalah santri Al-Khoziny yang tertimpa reruntuhan bangunan empat lantai di asrama putra. Insiden terjadi pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB saat santri menunaikan shalat Ashar berjemaah. Tragedi itu dinyatakan sebagai bencana akibat kegagalan teknologi konstruksi.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tragedi itu menimbulkan 171 korban, yang terdiri dari 104 korban selamat dan 67 korban tewas, termasuk delapan bagian tubuh (*body parts*).

Sebelumnya, data korban yang dirilis Basarnas dan BNPB sedikit berbeda. Menurut Basarnas, dari 171 korban, 67 orang tewas dan 104 orang selamat. Adapun BNPB pada Selasa mengumumkan, jumlah korban adalah 61 jenazah utuh dan tujuh potongan tubuh. Dengan memperhitungkan potongan tubuh yang kemungkinan bagian tubuh dari jenazah lain, BNPB memperkirakan ada 63 orang tewas.

Data korban yang sulit dipastikan ini terjadi sejak hari pertama pencarian dan pertolongan korban, yakni Senin, 29 September 2025. Perkiraan jumlah korban selamat ataupun tertimbun reruntuhan terus berubah.

Pesantren Al-Khoziny tidak memiliki data pasti jumlah santri yang sedang shalat Ashar saat kejadian. Begitu juga dengan pekerja yang mengecor di lantai empat, jumlahnya tidak dapat dipastikan.

"Saat operasi berlangsung, pondok pesantren tidak memberikan data sehingga yang dilakukan Basarnas adalah mendata setiap korban yang berhasil dievakuasi. Oleh karena itu, operasi dinyatakan selesai setelah dipastikan tidak ada korban di lokasi kejadian," ujar Kepala Basarnas Muhammad Syafii.

Jumlah pasti korban hanya dapat dibuktikan melalui identifikasi satu per satu jenazah dan potongan tubuh yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Saat ini, proses identifikasi korban dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim.

"Kami menerima 67 kantong jenazah, termasuk *body parts*, dan telah mengidentifikasi 34 korban," ujar Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim Komisaris Besar Muhammad Khusnan Marzuki saat dikonfirmasi pada Rabu (8/10).

Kepala Bidang DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Komisaris Besar Wahyu Hidajati mengatakan, pihaknya pada Selasa siang telah mengirimkan 14 sampel DNA ke Laboratorium DNA Pusdokkes di Cipinang, Jakarta Timur. Proses identifikasi dengan DNA tiga hingga lima hari. "Kami berharap dengan identifikasi dengan DNA, proses identifikasi dan pengumuman hasilnya semakin cepat," katanya.

Tanggung jawab pidana

Nama-nama yang diumumkan oleh Polda Jatim itu bukan sekadar angka. Mereka seharusnya masih bisa menuntut ilmu di pesantren, berkumpul dengan teman dan keluarga, andai kata bencana itu tidak terjadi. Bencana itu dapat dimitigasi jika saja perhitungan konstruksi bangunan dilakukan dengan baik.

"Keluarga yang berduka, tetapi lega karena jenazah yang telah teridentifikasi, berharap Polda Jatim mengusut tuntas kejadian ini karena harus ada yang bertanggung jawab dan demi keadilan bagi korban serta keluarga," ujar M Fauzi, kerabat korban Azam Alby, Maulidy Hasany, dan Ubaidillah dari Bangkalan.

Fauzi mengatakan, anaknya, Toharul Maulidi (16), juga menjadi santri Al-Khoziny. Namun, saat insiden, anaknya shalat Ashar di tempat lain. "Baru seminggu datang ke pondok dan kesukaannya utak-atik elektronik untuk *sound horeg*," kata Fauzi, yang tinggal di Depok, Jawa Barat.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, Senin (6/10), mengatakan, meninggalnya sejumlah orang di Al-Khoziny harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam Pasal 359 KUHP diatur bahwa kealpaan yang menyebabkan matinya orang bisa dikenai sanksi pidana. "Siapa yang alpa, itu harus diselidiki. Apakah pengurus pondok yang sudah membangun pondok tidak sesuai konstruksi atau mungkin pemborongnya yang membangun tidak sesuai *spec* (spesifikasi) keinginan pengurus pondok," kata Prija.

Penanggung jawab proyek juga bisa dikenai Pasal 360 KUHP, yaitu kelalaian yang menyebabkan orang luka berat. Insiden di Al-Khoziny mengakibatkan puluhan santri luka ringan dan berat, bahkan ada yang harus diamputasi.

Pemborong atau kontraktor juga bisa diselidiki apakah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau Peraturan Pemerintah No 14/2021 tentang Perubahan atas PP No 22/2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No 2/2017.

Dalam tragedi ini, perwakilan Pesantren Al-Khoziny telah meminta maaf. "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalem, manakala kami belum bisa memberikan layanan kepada para santri secara maksimal," ujar Ketua Alumni Santri Ponpes Al-Khoziny Zaenal Abidin.

Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Selain itu, diperlukan asesmen pada bangunan yang masih berdiri di Al-Khoziny. Hal ini untuk mengetahui keamanan bangunan.

Para pihak harus belajar dan mencegah kasus seperti ini terulang. Jangan sampai nyawa banyak orang seolah tidak berarti akibat kecerobohan atau tindakan korupsi atau hal lain sejenis. "Penegakan hukum harus dilakukan untuk memberikan keadilan pada semua pihak," kata Prija.

PEREKONOMIAN DAERAH

Inflasi Sumut Tertinggi Se-Indonesia, Warga Menjerit Dicekik Harga

Nikson Sinaga

Samsir Rianto (45) uring-uringan saat menghaluskan cabai merah di warung makan miliknya di Jalan Pimpinan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (8/10/2025). Sudah sebulan harga cabai tidak turun-turun dari Rp 100.000 per kilogram. Harga beras, daging ayam, minyak goreng, dan lainnya juga meroket. Masyarakat sangat terpukul akibat inflasi yang terjadi di tengah daya beli yang juga menurun.

"Baru kali ini harga cabai merah tinggi terus sampai sebulan. Biasanya enggak sampai seminggu sudah turun. Kami sangat terpukul karena berbarengan juga dengan kenaikan harga beras, bawang, daging ayam, dan bahan pokok lain," kata Samsir.

Apa yang dirasakan Samsir menjadi gambaran kondisi Sumut yang jadi provinsi dengan laju inflasi tertinggi di Indonesia pada September 2025. Inflasi di Sumut mencapai 5,32 persen secara tahunan (*yoy*).

Kelompok masyarakat menengah ke bawah harus bersiasat di tengah kenaikan harga bahan pokok. Samsir biasanya menghabiskan sekitar Rp 700.000 per hari untuk kebutuhan warung makan yang khusus menjual sarapan itu. Namun, dua bulan terakhir, dia harus merogoh kocek lebih dalam, yakni Rp 1 juta per hari. "Harga bahan pokok naik semua, tetapi kami enggak berani menaikkan harga jual makanan karena takut pelanggan malah lari," ujarnya.

Pedagang bersiasat dengan mencampur bahan makanan yang harganya lebih terjangkau. Samsir, misalnya, membeli beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual Perum Bulog dengan harga Rp 13.000 per kilogram. Untuk menjaga kualitas dan rasa, dia mencampur beras SPHP dengan beras medium komersial yang harganya Rp 17.000 per kilogram.

Kenaikan harga bahan pokok juga dirasakan oleh rumah tangga. Wiwin Putri (28), warga Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menyebut, kenaikan harga bahan pokok sangat memukul ekonomi keluarganya. Sebagai pekerja harian lepas di pabrik dengan pendapatan Rp 90.000 per hari, keluarganya sangat sensitif dengan kenaikan harga.

"Sudah hampir sebulan saya hampir tidak beli cabai merah lagi. Hampir semua harga bahan pokok naik, tetapi gaji enggak ikut naik," kata Wiwin yang merupakan ibu dengan dua anak itu.

Laju inflasi yang sangat tinggi di Sumut menjadi perhatian pemerintah pusat. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegur Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama gubernur provinsi lain yang masuk 10 besar dengan inflasi tertinggi di Indonesia.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, beras, daging ayam ras.

"Bapak dan Ibu sekalian, inflasi 5,32 persen dalam suatu provinsi (Sumut) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," kata Tomsi dalam rapat bersama gubernur, sebagaimana ditayangkan di kanal Youtube Kemendagri.

Tomsi meminta Sumut segera mengendalikan inflasi. Dengan jalur distribusi barang dan jasa yang didukung infrastruktur yang baik, menurut dia, Sumut seharusnya bisa mengendalikan inflasi dengan lebih baik. Dia membandingkan Sumut dengan Provinsi Papua Pegunungan yang masih bisa menjaga laju inflasi di angka 3,55 persen. Padahal, jalur distribusi di provinsi itu masih sangat terbatas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra dalam keterangan persnya mengatakan, inflasi di Sumut terjadi karena adanya kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan harga terbesar ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan 11,38 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada September 2025 antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, beras, daging ayam ras, ikan dencis, ikan tongkol, tomat, cabai hijau, dan minyak goreng.

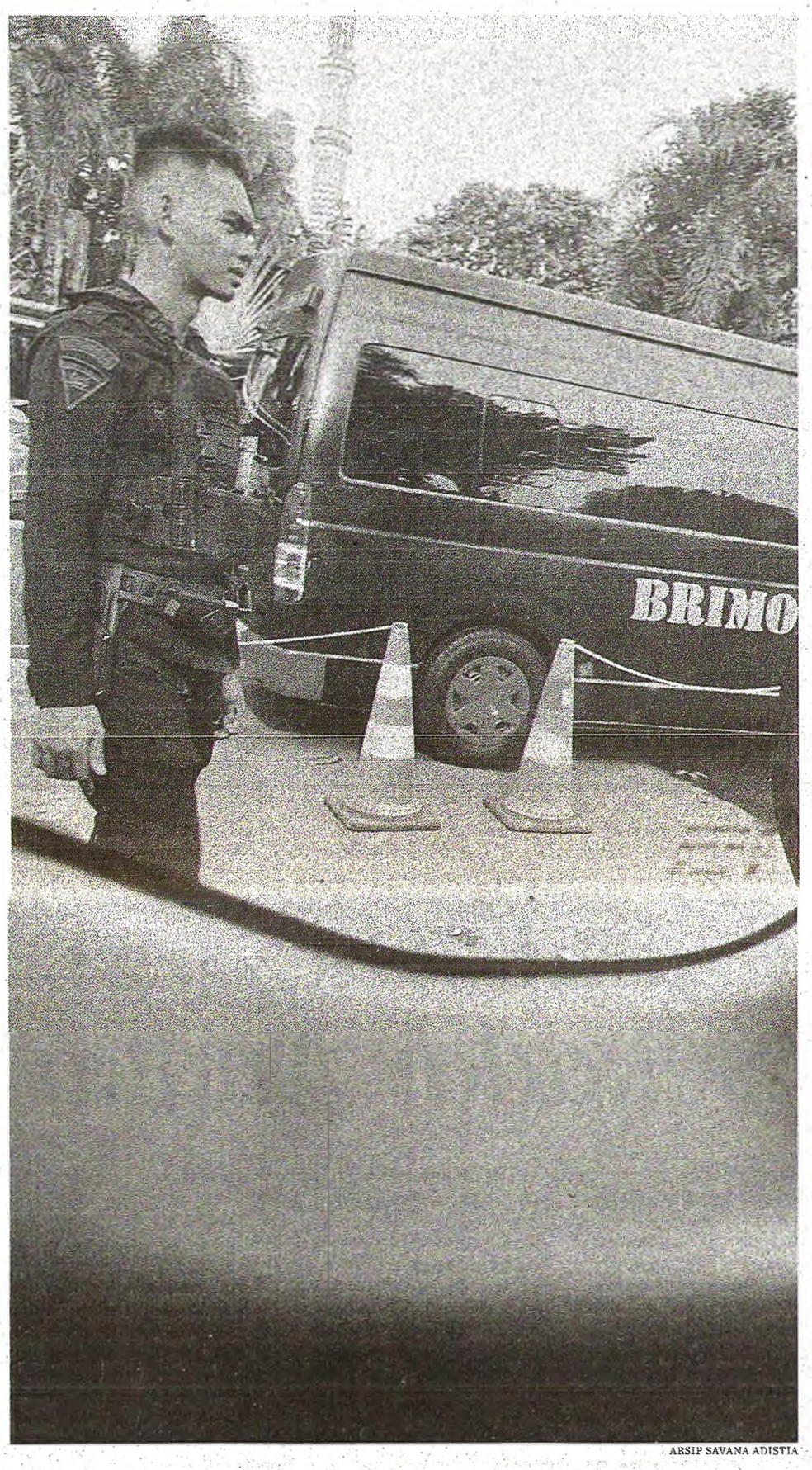
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek. Ada 11 langkah cepat yang disiapkan, yakni operasi pasar, khususnya beras dan cabai merah.

Program lainnya adalah mempercepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, pemonitoran distribusi pangan, memperkuat kerja sama antardaerah, menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis, serta penetapan toko pantau inflasi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut Lambok Turnip mengatakan, cabai merah menjadi salah satu komoditas yang memberi andil besar pada inflasi Sumut.

Harga naik karena produksi cabai merah di sejumlah daerah dataran tinggi di Sumut, seperti Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, terganggu kemarau panjang empat bulan terakhir. Pasokan sempat terbantu dari dataran rendah di Kabupaten Batu Bara. "Tetapi, sekarang pasokan dari Batu Bara juga menipis karena sudah mau selesai masa panen," ucapnya.

Lambok menyebut, produksi cabai merah Sumut sebenarnya cukup untuk memenuhi Sumut. Namun, cabai Sumut juga dikirim ke provinsi tetangga, seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Para tauke dari provinsi tetangga juga membeli cabai merah di Medan. Akibatnya, pasokan cabai di Sumut ikut seret.



ARSIP SAVANA ADISTIA

Anggota Brimob berjaga di depan sekolah Mentari Intercultural School Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, setelah ada ancaman bom di sekolah tersebut, Selasa (7/10/2025). Pada hari yang sama, Jakarta Nanyang School di Tangerang juga mendapatkan ancaman bom. Sehari setelahnya, North Jakarta Intercultural School di Kelapa Gading juga mendapat ancaman bom.

ANCAMAN KEAMANAN

Teror Bom Melanda Tiga Sekolah

JAKARTA, KOMPAS — Sebuah pesan singkat berisi ancaman bom menyasar tiga sekolah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan, Selasa (7/10/2025). Polisi bertindak cepat dan mendapati ketiga ancaman itu kosong dan tidak ditemukan, baik bom maupun bahan berbahaya lainnya, di lokasi tiga sekolah.

Terbaru, polisi menerima laporan adanya teror bom yang dialami oleh pengelola sekolah North Jakarta Intercultural School (NJIS), Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upaya sterilisasi dilakukan oleh kepolisian dan tidak ditemukan bom ataupun bahan berbahaya lainnya.

Ancaman yang diterima NJIS itu sama seperti pesan yang diterima oleh dua sekolah lainnya, yakni Jakarta Nanyang School di Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro di Tangerang Selatan pada Selasa.

Pesan yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp itu berisi pesan ancaman bom. Sang peneror meminta uang tebusan 30.000 dollar AS ke alamat bitcoin. Jika tidak dikirimkan, bom akan diledakkan.

Kepala Polsek Kelapa Gading Komisaris Seto Handoko, Rabu (8/10), menuturkan, pesan ancaman bom diterima sekolah NJIS pada Selasa pagi, sekitar pukul 05.09. Namun, pihak sekolah baru menyampaikannya ke anggota Binmas Polsek Kelapa Gading pada Selasa malam, pukul 22.50.

Setelah laporan diterima, Seto dan jajarannya mengecek lokasi sekolah dan berkoordinasi dengan penjinak bom dari Gegana Brimob Polda Metro Jaya untuk melakukan sterilisasi di seluruh ruangan sekolah. Barulah pada Rabu pagi, tim Gegana menyisir seluruh area sekolah.

Beberapa ruangan yang diperiksa, antara lain, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kepala sekolah, pelataran sekolah, kantin, lobi, dan lapangan bermain. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Rabu pagi, tidak ditemukan bom atau bahan berbahaya sejenis seperti yang disampaikan di dalam pesan tersebut.

> ***Tidak ditemukan peledak di kedua sekolah. Semua sudah aman.***
> Victor DH Inkiriwang

Selama pemeriksaan berlangsung, kata Seto, 229 siswa beserta 59 anggota staf pengajar masih melakukan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa.

Peneror diburu

Setelah dipastikan aman, polisi menyelidiki teror atau ancaman bom itu, antara lain, berkoordinasi dengan Mohammad Naufal Alvira, Wakil Ketua Bidang Aset Kripto dari Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI). Tujuannya ialah memastikan *link* kripto yang dikirimkan oleh peneror.

Setidaknya ada 30 *crypto exchange* atau perusahaan jual beli kripto yang diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada satu perusahaan yang menemukan alamat dompet kripto (*wallet address*) yang dikirim oleh sang peneror. "Itu berarti, *wallet address* itu bukan berasal dari *crypto exchange* lokal (yang ada di Indonesia)," ucap Seto.

Nomor yang mengirimkan pesan teror itu diketahui berasal dari Nigeria. "Namun, asal peneror masih terus diselidiki," ujar Seto.

Sebelumnya, ancaman bom serupa juga diterima pengelola dua sekolah, yaitu Jakarta Nanyang School di Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro di Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di kedua sekolah, tidak ditemukan bahan peledak ataupun bahan berbahaya lainnya. Polisi menyelidiki dan memburu pengirim pesan ancaman.

Seusai memantau sterilisasi di Mentari Intercultural School, Selasa, Kepala Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Victor DH Inkiriwang mengatakan, ancaman bom ini diterima oleh pengelola kedua sekolah dalam waktu hampir bersamaan. Ancaman pertama diterima oleh pengelola Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Tangerang. Ancaman berikutnya ke Mentari Intercultural School Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa siang.

Jajaran Polres Tangerang Selatan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan menghubungi Gegana dari Brimob Polda Metro Jaya. "Segera kami melakukan pengecekan dan sterilisasi di kedua tempat tersebut," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya bom atau bahan peledak sesuai dengan teror yang dilontarkan melalui pesan Whatsapp dan surat elektronik milik manajemen di kedua sekolah. "Tidak ditemukan peledak di kedua sekolah. Semua sudah aman," kata Victor.

Dalam melakukan pemeriksaan ancaman bom ini, polisi berkoordinasi dengan pihak sekolah. "Pihak sekolah sangat kooperatif, kami tetap mengikuti kaidah yang ada di sekolah. Jadi, kegiatan belajar-mengajar pun tidak terganggu," ujarnya.

Setelah dipastikan aman, Victor mengimbau orangtua, siswa, dan guru tidak panik. Kegiatan belajar-mengajar di kedua sekolah pun tetap berjalan normal.

Setelah sterilisasi tuntas, jajaran dari Direktorat Siber dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, jajaran Polsek Pagedangan dan Pondok Aren juga berpatroli untuk memastikan keadaan sekolah tetap aman.

Victor mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi polres dan polsek terdekat jika menerima informasi dan gangguan keamanan lain, termasuk teror. Polisi akan segera turun memeriksa untuk memastikan laporan tersebut. (RAM)

Jangan Korbankan Transportasi Publik

Pemangkasan dana bagi hasil memaksa Pemprov Jakarta harus meninjau lagi berbagai skema pembiayaan, termasuk subsidi transportasi umum.

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat diharapkan tidak berdampak pada kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta diminta tetap memberikan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana memangkas alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta dalam Rancangan APBN 2026, dari target semula Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun. Akibatnya, postur APBD Jakarta tahun depan harus direvisi. Dari rencana awal sebesar Rp 95,35 triliun, menjadi Rp 79,06 triliun.

Pemangkasan DBH memaksa Pemprov Jakarta meninjau ulang skema pembiayaan, termasuk subsidi transportasi umum serta penyesuaian tarif. Hal ini juga dibahas dalam rapat kerja Komisi B DPRD Jakarta bersama pihak eksekutif pada Selasa (7/10/2025). Mereka menyoroti efektivitas skema *public service obligation* (PSO) atau subsidi layanan publik di sektor transportasi.

Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Ade Suherman, mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengganggu kualitas pelayanan transportasi publik. Menurut dia, transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta merupakan kebutuhan vital bagi warga Jakarta yang harus tetap dijaga kenyamanannya.

"Pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, maka efisiensi anggaran jangan sampai menurunkan kenyamanan mereka," ujar Ade, Rabu (8/10).

Terkait pemangkasan DBH dari pemerintah pusat, Ade berharap, kualitas layanan transportasi publik tetap terjaga. Ia menilai, PT Transjakarta dapat menjadi contoh bahwa efisiensi anggaran bisa berjalan tanpa menurunkan standar pelayanan dan kenyamanan penumpang.

Pada 2023, Transjakarta sempat mengalami pemangkasan subsidi Rp 336 miliar dari usulan awal Rp 3,9 triliun. Namun, Transjakarta tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan mempertahankan standar pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ade, efisiensi tersebut bahkan menghasilkan kinerja yang lebih optimal di tahun berikutnya. Pada 2024, Transjakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp 9.831 per penumpang. Sebelumnya, subsidi tiket pada tahun 2022 mencapai Rp 16.800 dan pada 2023 mencapai Rp 11.400 per pelanggan.

Tak hanya itu, peningkatan kapasitas layanan juga terus dilakukan. Jumlah moda bertambah menjadi 4.388 unit, sementara rute layanan meluas hingga 235 koridor yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Hal itu termasuk area permukiman padat dan titik-titik integrasi transportasi, seperti MRT, LRT, dan KRL.

Kinerja keuangan pun menunjukkan hasil positif. Pendapatan nontiket (*non-farebox*), yang mencakup kerja sama komersial, iklan, dan sewa ruang, juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp 218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Adapun berdasarkan laporan Badan Pembinaan BUMD Jakarta (BPBUMD), total aset Transjakarta pada 2024 mencapai Rp 7,66 triliun, dengan liabilitas Rp 2,80 triliun dan ekuitas Rp 4,86 triliun. Sementara itu, total pendapatan usaha di periode yang sama tercatat Rp 4,47 triliun.

Ade menilai, capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

Penyesuaian tarif

Terkait wacana kenaikan tarif transportasi publik, anggota Komisi B DPRD Jakarta lainnya, Andri Santosa, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji hati-hati dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Terlebih, tekanan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini masih cukup tinggi.

Meski demikian, penurunan DBH dari pemerintah pusat tidak bisa dimungkiri akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai layanan publik, termasuk sektor transportasi massal.

Di sisi lain, beban subsidi untuk transportasi umum, khususnya Transjakarta, terus meningkat setiap tahun seiring dengan ekspansi rute dan penambahan moda. "Agar pelayanan tetap optimal, perluasan rute berjalan sesuai target, dan program *zero carbon* pada 2030 tercapai, pemerintah harus mengelola anggaran dengan lebih bijak," ucapnya.

Menurut Andri, pemerintah daerah perlu mencari model pembiayaan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada skema subsidi layanan publik tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang.

Ia mencontohkan, dengan memperkuat kemitraan bersama sektor swasta, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pendapatan nontiket seperti iklan, kerja sama komersial, dan penyewaan aset.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, rapat bersama pihak eksekutif pada Selasa, fokus pada evaluasi efektivitas PSO dengan alokasi sekitar Rp 6 triliun. Hal itu untuk tiga operator utama, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Nova menyoroti pemangkasan DBH dari pemerintah pusat berpotensi menekan kemampuan APBD dalam menanggung beban subsidi PSO. Karena itu, evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan dana subsidi digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan transportasi publik.

Selain mengevaluasi efektivitas subsidi PSO, pihaknya juga tengah menjajaki peluang agar sebagian pembiayaan subsidi transportasi umum dapat turut didukung oleh pemerintah pusat.

Terlebih, Pemprov Jakarta saat ini telah menetapkan 15 golongan masyarakat penerima manfaat PSO yang dapat mengakses transportasi umum secara gratis. Mereka adalah pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga kelompok berpenghasilan rendah.

Ke depan, DPRD akan melakukan kajian komprehensif terhadap efektivitas pemetaan penerima manfaat serta potensi penyesuaian tarif.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa pemangkasan DBH memaksa pemerintah daerah meninjau ulang berbagai skema pembiayaan, termasuk subsidi transportasi massal.

"Subsidi transportasi kita besar sekali. Sekarang ke mana-mana bayarnya Rp 3.500. Tapi, ini belum tentu dinaikkan, ya. Akan dikaji kembali," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10).

Untuk layanan Transjakarta, Pemprov Jakarta menanggung subsidi hampir Rp 10.000 per penumpang pada 2024. Artinya, dari tarif Rp 3.500 yang dibayar masyarakat, sebagian besar biaya operasional tetap ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Pramono menegaskan, belum ada keputusan terkait kenaikan tarif transportasi publik, khususnya Transjakarta. Pihaknya masih dalam tahap evaluasi untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Adapun saat ini, langkah efisiensi ditempuh dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta belanja nonprioritas lainnya.

Menanggapi potensi kenaikan tarif transportasi umum, warga Jakarta Selatan, Nanda (28), berharap, kebijakan tersebut tidak sampai membebani pengguna angkutan umum jika nanti diterapkan. "Kalau memang ada penyesuaian tarif, asal jangan terlalu tinggi dan tetap sebanding dengan pelayanan," ujar Nanda.

Menurut Nanda, transportasi publik kini sudah menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta. Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada kenyamanan dan keterjangkauan layanan. (TIK)

PANCAROBA

Cuaca Ekstrem Mengancam hingga Pekan Depan



KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengendara sepeda motor menembus genangan air akibat hujan deras di Jalan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrem terjadi di beberapa wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam sepekan ke depan. Warga dan pemangku kepentingan terkait diminta waspada dalam mengantisipasi ancaman tersebut.

Pada Selasa (7/10/2025), hujan deras dan angin kencang terjadi di sejumlah wilayah di Tangerang Selatan. Beberapa papan reklame dan pohon pun bertumbangan diterpa angin kencang.

Menanggapi fenomena ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Rabu (8/10), mengatakan, cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan disebabkan masa peralihan musim (pancaroba).

"BMKG memprakirakan potensi hujan lebat dan angin kencang masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek hingga 13 Oktober 2025," katanya.

Cuaca ekstrem ini merupakan dampak dari masa pancaroba, yakni peralihan dari musim kemarau ke musim hujan yang sering membuat fenomena atmosfer tidak stabil. Karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang di wilayah Banten dan Jabodetabek.

Guswanto menuturkan, pada 7 Oktober hingga 14 Oktober 2025, BMKG memprediksi cuaca di wilayah Jabodetabek akan fluktuatif dan berpotensi ekstrem.

Dia pun merinci pada periode 7 Oktober hingga 9 Oktober wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat masuk ke dalam status waspada karena diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. "Pada periode ini, potensi angin kencang juga akan terjadi di Banten dan Jawa Barat," ucap Guswanto.

Potensi bencana

Selanjutnya, pada periode 10-13 Oktober, giliran Jabodetabek yang berada di dalam zona waspada. Terutama karena potensi hujan lebat dan angin kencang yang bisa memicu bencana, seperti banjir lokal, pohon tumbang, dan gangguan lalu lintas.

Oleh karena itu, Guswanto mengimbau warga agar mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem, seperti menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho ketika hujan atau angin kencang. Selain itu, waspadai terjadinya banjir atau pemadaman listrik di lokasi rawan. "Pantau juga informasi resmi terkait cuaca dan potensi bencana," kata Guswanto.

Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan, pada Selasa siang, menyebabkan pohon tumbang dan bangunan roboh.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan Essa Nugraha mengatakan, hujan deras disertai angin kencang terjadi pada pukul 12.30 dan berlangsung sekitar satu jam.

Cuaca ekstrem yang terjadi masuk dalam kategori hujan lebat dan untuk kecepatan angin masuk dalam kategori kecepatan angin yang cukup tinggi. "Kecepatan angin mencapai 26 km per jam hingga 90 km per jam," katanya.

Tiupan angin yang tinggi menjadi pemicu papan reklame dan tiang listrik roboh dan pohon tumbang. Dari hasil pemeriksaan diketahui ada 39 titik pohon tumbang di wilayah Tangerang Selatan.

Sementara itu, untuk papan reklame yang roboh terpantau ada di dua tempat di Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat. Dua papan reklame setinggi hingga 15 meter ini menimpa 13 rumah. "Akibat papan roboh ini, ada tiga orang yang harus dilarikan ke rumah sakit, salah satunya masih anak balita," katanya.

Kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Proses evakuasi dan pembersihan di lokasi terdampak juga telah dilakukan. Risiko bencana susulan pun terus dipantau. Karena itu, Essa mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. "Segera cari tempat aman dan hindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho," ujarnya.

Kapolsek Ciputat Timur Komisaris Bambang Askar Sodiq menambahkan, akibat cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras pada Selasa siang, beberapa bangunan, seperti papan reklame dan *tower* di wilayah Ciputat Tangerang roboh.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 13.05. Besi penyangga papan reklame menimpa atap rumah warga. Tidak hanya itu, angin kencang juga menyebabkan tembok roboh di Kelurahan Jombang Ciputat Timur. "Ada sekitar 20 motor yang tertimpa," katanya. (RAM)

Menabur Harapan dari Benih Kopi di Jawa Barat

Benih kopi unggul menjadi harapan petani kopi di Jawa Barat. Selain meremajakan pohon kopi yang menua, benih kopi juga dapat menyelamatkan penghasilan petani akibat harga sayuran yang anjlok sekaligus turut menjaga hutan. Petani tak hanya menanam kopi, tetapi juga menabur harapan.

Abdullah Fikri Ashri dan Maria Susy Berindra





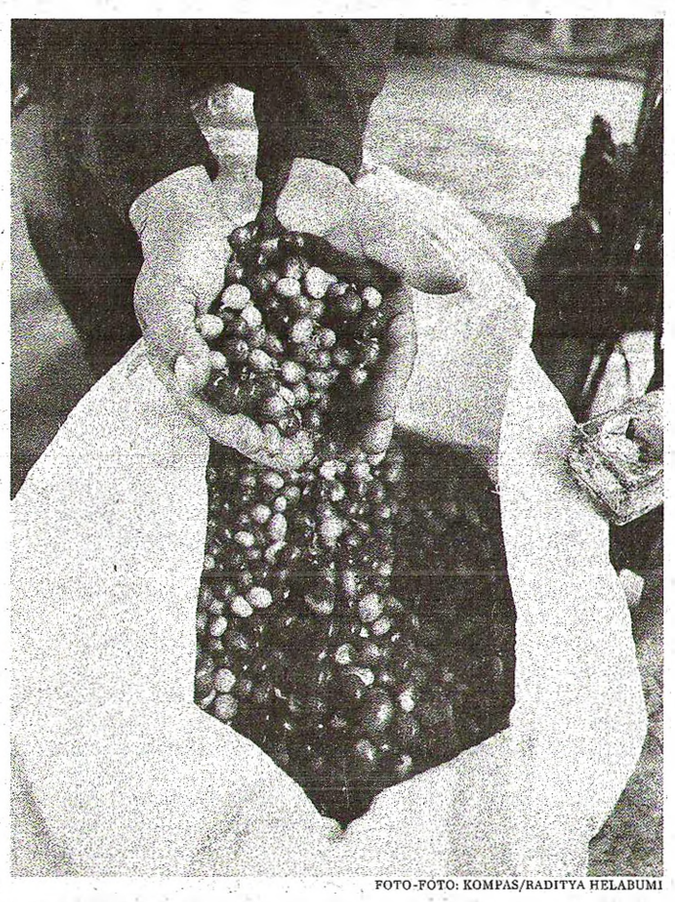


FOTO-FOTO: KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengolahan kopi oleh Kelompok Lingga Sari Kopi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025) (searah jarum jam). Ceri kopi yang telah diipanen dikemas dalam karung di Kampung Stamplat Girang, Desa Indragiri, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jabar, Senin (11/8). Petani menyiapkan benih kopi di lokasi pembibitan kopi yang dikelola Kelompok Lingga Sari Kopi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jabar, Rabu (13/8).

Yusup Supriatna (47) baru saja pulang dari kebun kopinya di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025) malam. Hampir seharian ia berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut di area Gunung Manglayang.

Di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi itu, Ketua Kelompok Lingga Sari Kopi ini membersihkan kebun kopinya dari tumbuhan liar. Alih-alih lelah, ia malah berbahagia. Benih kopi yang ia tanam hampir setahun lalu, tepatnya 17 Oktober 2024, mulai membuahkan hasil.

"Sudah tiga minggu ini kami bersih-bersih kebun kopi. Benih yang kami tanam itu sudah mulai belajar, belajar berbunga," ucap Yusup saat dihubungi akhir pekan lalu. Bunga berwarna putih itu menjadi cikal bakal buah kopi yang dapat dipanen dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.

Saat *Kompas* mengunjungi kebun Yusup pertengahan Agustus lalu, tinggi pohon kopi lebih dari 1 meter. Daun kopi yang hijau tumbuh subur. Kuncup-kuncup tunas bermunculan. Sekam dan kotoran hewan menggemburkan tanahnya. Pohon kopi serupa berdiri di sisinya.

Di sekitarnya terdapat empat *nursery* (tempat pembibitan) kopi yang berukuran masing-masing sekitar 60 meter persegi. Setiap *nursery* dibangun dari bambu dengan paranet sebagai atap dan dindingnya. Paranet untuk melindungi benih dari sengatan matahari, deras hujan, dan terpaan angin.

Setiap benih kopi itu ditanam dalam *polybag* hitam dengan tanah bercampur kotoran hewan. Setelah delapan bulan, benih akan menjadi bibit dan siap dibagikan kepada petani untuk ditanam di kebun. Hingga kini, total terdapat sekitar 40.000 benih kopi yang disemaikan di *nursery*.

Benih kopi varietas Gayo 2, jenis arabika dari dataran tinggi Aceh, itu merupakan program donasi 48.000 benih dari Starbucks kepada petani di daerah Manglayang tahun lalu. Ribuan benih yang menjadi bibit telah ditebar di kebun petani, termasuk lahan milik Yusup.

Kehadiran benih kopi seperti bayi yang memberikan harapan. Bagaimana tidak, pohon kopi petani umumnya sudah menua atau berusia di atas 10 tahun. Kondisi itu tecermin dari daun-daun yang berguguran dan batang pohon kopi lama yang dipotong, lalu disulam dengan pohon baru.

Pohon kopi yang ditanam pada 2013 tersebut juga mulai rentan ambruk, terutama saat cuaca buruk. Apalagi, pada bulan Februari dan Maret, angin kencang kerap melanda daerah Manglayang Timur. Saking kencangnya, Yusup menyebut, angin itu seolah menjerit-jerit.

Ranting-ranting yang menua juga sudah kering dan tidak lagi berbuah. Kondisi ini otomatis mengurangi produksi kopi petani. "Seharusnya, produksi buah kopi per (batang) pohon itu 5-6 kilogram. Tapi, kalau pohonnya tua paling hanya 2 kilogram kopi (per batang)," ujar Yusup.

Menurut dia, petani sebenarnya ingin meremajakan pohon kopi yang telah senja. Namun, upaya itu membutuhkan keterampilan dan pendanaan. Harga satu bibit kopi siap tanam saja, misalnya, sekitar Rp 7.000 per pohon. Dalam 1 hektar setidaknya dibutuhkan 1.000 pohon.

Itu sebabnya, ketika menerima program donasi benih dari Starbucks, Yusup menyambut baik. Puluhan ribu benih itu bakal diberikan kepada sekitar 200 anggota Kelompok Lingga Sari Kopi. Mereka tersebar di tiga kecamatan di Sumedang, yakni Sukasari, Jatinangor, dan Rancakalong.

Mereka mengelola sekitar 200 hektar kebun kopi dengan produksi biji kopi basah bisa mencapai 750 ton per tahun. Akan tetapi, produksi tahun ini diperkirakan turun menjadi 100 ton karena persoalan cuaca yang ditandai dengan hujan terus-menerus. Usia tanaman juga telah menua.

Penyelamat dari kerugian

Yusup pun berharap banyak pada benih kopi yang baru. Apalagi, PT Sucafina Indonesia Coffee (SIC), perusahaan perdagangan kopi di Kabupaten Bandung, Jabar, bekerja sama dengan Starbucks Indonesia untuk mendampingi petani dalam perawatan benih tersebut.

"Ini bibit (kopinya) tersertifikasi. Mudah-mudahan, harapan petani, produksi (kopinya) lebih bagus," kata Yusup, yang mengolah 8 hektar lahan kopi. Harapan serupa disampaikan oleh petani yang mengandalkan kopi sebagai penghasilan utama di tengah anjloknya harga sayuran.

Tuti Mulyati (43), perempuan petani kopi di Sukasari, misalnya, optimistis 500 bibit kopi baru menyelamatkannya di tengah kerugian akibat jatuhnya harga sejumlah komoditas *hortikultura*. Saat panen tomat beberapa waktu lalu, ia hanya meraup Rp 3,5 juta dari menjual 6 ton tomat.

Artinya, 1 kilogram tomat hanya dihargai sekitar Rp 500. Padahal, biasanya harga tomat bisa Rp 3.000 per kilogram, bahkan lebih. Alih-alih balik modal, ibu dua anak ini justru mengaku merugi jutaan rupiah. Beruntung, ia masih punya sekitar 1.500 pohon kopi di lahan seluas 1 hektar.

Jika panen bagus, ia bisa mendapatkan sekitar 5 ton ceri kopi. Dengan harga minimal Rp 15.000 per kilogram, potensi pendapatannya Rp 75 juta. "Tahun ini, panennya mungkin berkurang karena cuaca. Tapi, kalau panen kopi itu enggak rugi-rugi amat kayak sayuran," ungkap Tuti.

Tuti yang menanam kopi sejak 2013 menjadikan komoditas itu sebagai penghasilan utama. "Alhamdulillah, dari hasil panen kopi, Ibu sudah bisa menyekolahkan anak sampai SMA dan membeli motor untuk anak. Kebutuhan sehari-hari juga terpenuhi," ujar Tuti, yang tamatan SD ini.

Oleh karena itu, ia sangat senang ketika mendapatkan 500 benih baru untuk meremajakan kebun kopinya. Benih baru itu, antara lain, ia gunakan untuk menyulam batang kopi yang menua.

Selain di Manglayang, donasi benih kopi juga diberikan kepada petani di Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jabar, tahun lalu. "Kami mendapat 5.000 benih kopi. Sebagian besar masih di persemaian," ucap Dede Komarudin, Kepala Dusun IV Indragiri.

Menurut Dede, pohon kopi milik petani sudah berusia belasan tahun karena ditanam antara 2007-2010. Tanaman itu pun perlu diremajakan. Terlebih lagi, kopi menjadi andalan warga. Setiap tahun, dusunnya bisa memproduksi 150 ton buah ceri kopi dari 208 hektar lahan.

Sebanyak 282 petani, hampir separuh dari 700 warga, menanam kopi. Selain memasok kopi ke Sucafina, dusun ini juga menjadikan kopi yang berjenama Djamuju sebagai daya tarik wisata. Pengunjung bisa menyeruput kopi sembari menikmati hijau perkebunan teh dan sejuknya udara.

Menjaga hutan

Kehadiran benih kopi baru turut menjaga hutan setempat. Seperti di Manglayang, pohon kopi petani di Indragiri juga berada di kawasan Perhutani. Pohon pinus hingga pohon jamuju (*Dacrycarpus imbricatus*) menjadi naungan bagi tanaman kopi di dataran 1.400 mdpl.

"Sebelum ada tanaman kopi, dulu di sini banyak penebangan (pohon) liar. Setelah ada kopi, warga di sini enggak mau ada penebangan lagi. Kan, kopi butuh naungan," tutur Dede. Dengan bantuan benih kopi, katanya, petani lebih semangat merawat tanaman dan hutannya.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, budidaya kopi jadi salah satu upaya konservasi hutan. "Bandung ini termasuk daerah yang lahannya banyak rusak karena kebanyakan ditanami sayuran," ujarnya.

Kondisi itu, lanjutnya, membuat sedimentasi di Bandung yang masuk ke Sungai Citarum mencapai 5.000 ton per tahun. Banjir pun rentan terjadi. Itu sebabnya, pihaknya mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi kopi. Pemda juga telah menyalurkan 560.000 bibit kopi kepada petani.

Dengan luas lahan kopi mencapai 15.000 hektar dan hampir seluruhnya berada di kawasan hutan, komoditas itu turut menjaga alam di Kabupaten Bandung. Daerah ini sekaligus menjadi area kopi terluas di Jabar. Tahun lalu, petani di daerah ini memproduksi 9.156 ton kopi arabika.

"Kopi jadi andalan di Bandung karena kopi kami cukup dikenal di dunia," ucap Marlan. Pada 2016, misalnya, kopi yang ditanam Ayi Sutedja, warga Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, menjuarai ajang Specialty Coffee Association of America (SCAA).

Beras biji kopinya menjadi yang terbaik dalam uji cita rasa dan harga lelang. Nilainya 86,25 dengan harga lelang 55 dollar AS per kg. Kopi itu ditanam di kaki Gunung Puntang (*Kompas*, 8/6/2016).

Daniel Shewmaker, Managing Director PT Sucafina untuk Indonesia dan Timor Leste, mengatakan, kopi di daerah Priangan punya keunikan dibandingkan di Sumatera atau Flores. Salah satunya, lokasi kebun yang berada di area Perhutani dengan banyak naungan, seperti pohon pinus.

"Pinus memang bikin tanah agak asam. Struktur tanah memengaruhi rasa kopinya. Keasaman di Jawa Barat memang sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah lain," ujar Daniel. Meski belum sebesar skala industri, seperti di Sumatera, budidaya kopi di Jabar tergolong cukup bagus.

Petani, misalnya, lebih rajin memetik buah merah sehingga kopi lebih bersih. "Proses pascapanen yang terpusat juga menjadi keunggulan sendiri. Rasa kopi jadi lebih seragam dan bersih. Ini berbeda dengan daerah lainnya yang gabahnya diproses di tingkat rumah tangga," katanya.

Pihaknya pun akan terus mendampingi petani dalam perawatan benih unggul yang dibagikan Starbucks, mulai dari pengolahan pascapanen hingga pengiriman ke luar negeri. Sucafina telah mengekspor kopi Jabar ke Amerika Serikat, Australia, Korea, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa.

Bersertifikasi

Agronomis Starbucks Farmer Support Center Indonesia, Ucu Sumirat, mengatakan, setiap benih kopi yang disalurkan kepada petani telah tersertifikasi dan teruji di lokasi penanaman. Benih itu diharapkan dapat mengatasi masalah minimnya produktivitas pohon kopi.

Sebenarnya pohon kopi produktif selama 20 tahun. "Tetapi, sekarang, (masa produktif) lebih cepat lagi. Ada dua faktornya, yakni perubahan iklim yang mempercepat kerusakan tanaman. Kedua, cara budidayanya tidak sesuai standar. Ini harus diperhatikan petani," ungkap Ucu.

Public Relations and CSR Division Manager PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks Indonesia) Mochamad Rizki mengatakan, sejak 2017, Starbucks telah menyalurkan 608.000 benih dan bibit kopi. Petani di Sumatera, Jawa, dan Bali mendapatkan benih dan bibit tersebut.

"Starbucks Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan petani kopi. Ini sejalan dengan janji Starbucks terhadap petani kopi, yaitu memastikan masa depan kopi untuk semua," ujar Kiki.

Dari benih kopi, petani menabur harapan besar untuk keberlanjutan kehidupan.

SEPAK BOLA PUTRI

Timnas Maksimalkan Persiapan SEA Games

TOKYO, RABU — Demi menyiapkan tim terbaik di SEA Games Thailand 2025 sebagai penampilan perdana sejak absen dua edisi terakhir, tim nasional sepak bola putri melanjutkan pemusatan latihan di Jepang. Ini jadi bagian dari rangkaian persiapan sejak September lalu yang dilengkapi uji coba dan laga persahabatan internasional.

Skuad "Garuda Pertiwi" yang berkekuatan 27 pemain melaksanakan pemusatan latihan 2-17 Oktober 2025. Tim merupakan kombinasi dari pemain yang berpengalaman berkali-kali membela tim senior, seperti Vivi Oktavia Riski, Zahra Musdalifah, serta Reva Octaviani, dan pemain yunior, seperti Gadhiza Asnanza, Edelweiz Auradiva, dan Nasywa Zetira Rambe.

Sementara itu, dua pemain yang dipanggil, Viny Silfianus dan Shalika Aurelia, baru akan bergabung bersama tim mulai 12 Oktober 2025. Mereka masih memperkuat klubnya, Kelana United FC, di Liga Malaysia.

Pemusatan latihan yang berlangsung di Tokyo, tepatnya di area Urawa Reds Lands, ini merupakan bagian dari rangkaian program persiapan Garuda Pertiwi yang telah dimulai sejak 11 September 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut tim pelatih, agenda ini dirancang untuk membentuk kerangka tim yang solid serta menguji kemampuan pemain menghadapi lawan berlevel tinggi.

Apalagi, SEA Games Thailand 2025 akan jadi penampilan perdana timnas putri sejak absen dalam dua edisi terakhir. Pada SEA Games Kamboja 2023 dan SEA Games Vietnam 2021, Garuda Pertiwi mundur dari turnamen.

Timnas putri terakhir kali tampil pada SEA Games Filipina 2019. Saat itu, langkah Vivi Oktavia Riski dan kawan-kawan terhenti pada babak grup. Indonesia, yang tergabung di Grup B bersama Thailand dan Vietnam, hanya bisa finis di peringkat ketiga.

SEA Games Thailand 2025 akan jadi penampilan perdana timnas putri sejak absen dalam dua edisi terakhir.

Indonesia menelan dua kekalahan dari dua laga, kebobolan 11 gol, dan hanya bisa mencetak satu gol. Adapun Thailand dan Vietnam melaju ke babak semifinal. Tuan rumah Vietnam keluar sebagai juara.

Sebelumnya, manajer timnas putri Galih Dimuntur Kartasasmita mengatakan, SEA Games menjadi salah satu agenda penting Garuda Pertiwi tahun ini. Untuk itu, mereka akan melakukan persiapan sematang mungkin untuk melakoninya, termasuk menjalani uji coba dengan tim internasional.

Selama di Jepang, timnas putri dijadwalkan menjalani sejumlah pertandingan uji coba melawan klub dan tim universitas ternama. Mereka akan menghadapi Toyo University pada 8 Oktober, dilanjutkan melawan Chifure Saitama pada 11 Oktober, lalu RB Omiya Ardija (12 Oktober), dan terakhir Urawa Reds Ladies (15 Oktober).

Seluruh rangkaian latihan dan uji tanding ini dipimpin oleh Akira Higashiyama yang ditunjuk sebagai pelatih kepala, dibantu oleh Satoru Mochizuki sebagai Technical Advisor Sepak Bola Putri PSSI, serta Takumi Taniguchi, Maulina Novryliani, dan Mukti Ali Raja sebagai staf pelatih.

Menurut agenda, setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Jepang, tim akan bertolak kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pemusatan latihan di Yogyakarta pada 18-30 Oktober 2025.

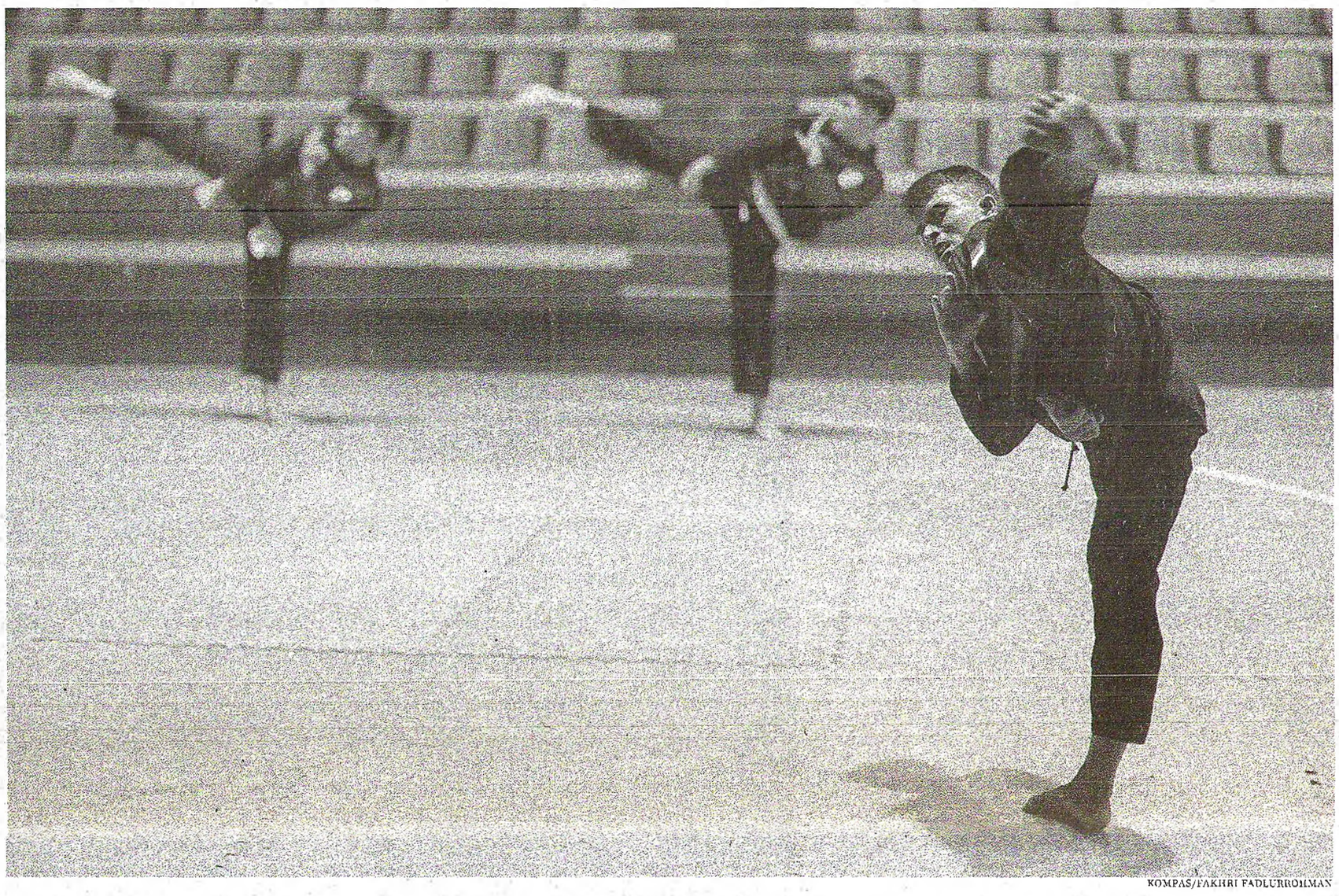
Pada tahap ini, para pemain diaspora akan bergabung untuk memperkuat komposisi skuad utama.

Setelah itu, timnas putri akan mengakhiri persiapan dengan menjalani laga uji coba dalam FIFA Match Day (22 November-1 Desember). Mereka akan menghadapi Nepal dan Taiwan.

Adapun para pemain yang dipanggil sebagai penjaga gawang adalah Laita Roati Masykuroh (Arema FC), Edelweiz Auradiva (PSSI Kalimantan Timur), Shesilia Putri Desrina (Persib Putri), dan Gadhiza Asnanza (Persib Putri). Sementara para pemain belakang akan diisi oleh Vivi Oktavia Riski (PSSI Bangka Belitung), Gea Yumanda (PSSI Jawa Barat), Marcelinda Nurul Khusna (PSSI Jawa Tengah), Allya Putri Afianti (PSSI Bangka Belitung), Remini Rumbewas (PSSI Papua), Nabila Saputri (PSSI Banten), Shalika Aurelia (Kelana United FC), Safira Ika Putri, dan Zahra Musdalifah yang merupakan alumnus Liga Kompas Gramedia (PSSI DKI Jakarta).

Posisi gelandang diisi oleh Helsya Maeisyaroh (PSSI Jawa Barat), Aulia Arifah (PSSI Banten), Nasywa Zetira Rambe (PSSI DKI Jakarta), Armelia Nur Sava Zada (PSSI Jawa Timur), Ina Paulanda Wetipo (PSSI Papua), Reva Octaviani (PSSI Jawa Barat), dan Viny Silfianus (Kelana United FC).

Di posisi penyerang terdapat Sheva Imut Furyzcha (PSSI DKI Jakarta), Ayunda Dwi Anggraini (PSSI Jawa Timur), Rosdillah Siti Nurrohmah (PSSI Jawa Barat), Aulia Al Mabruroh (PSSI Lampung), Kikka Putri Ramadani (PSSI Kalimantan Tengah), Marsela Yuliana Awi (PSSI Papua), dan Ajeng Sri Handayani (Persib Putri). (REB)



KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Atlet pencak silat berlatih di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Menjelang SEA Games Thailand 2025, tim pencak silat Indonesia terus menggencarkan latihan agar dapat memberikan hasil terbaik. Pada SEA Games 2025, tahun ini tim pencak silat Indonesia berkekuatan 15 atlet.

Pencak Silat Jadi Andalan Indonesia di SEA Games

Kendati kehilangan lima potensi medali, pencak silat kembali menjadi tumpuan Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Juara umum jadi target.

Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, mendadak ramai pada Selasa (7/10/2025) sore. Tempat pemusatan latihan nasional tim pencak silat Indonesia itu menjadi tujuan pertama kunjungan Chief de Mission (CdM) atau Ketua Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025 Bayu Priawan Djokosoetono, ke cabang-cabang olahraga. Sebelum Bayu tiba, banyak anggota timnya datang untuk persiapan.

Namun, Puspa Arumsari (32) tak terganggu dengan keramaian yang tiba-tiba itu. Arum fokus melatih jurus-jurus di platform latihan. Secara bergantian, dia melakukan jurus tanpa senjata, jurus dengan golok, dan dengan toya.

Gerakannya penuh energi. Tampak ada kekuatan pada entakan di ujung tangan yang meninju, ujung kaki yang menendang, ujung golok yang digerakkan, dan ujung toya yang digerakkan.

Arum dan 14 pesilat Indonesia lainnya itu tengah menjalani persiapan untuk SEA Games Thailand 2025. Persiapan telah memasuki masa prakompetisi mengingat SEA Games tinggal dua bulan lagi. Arum tak mau berleha-leha.

SEA Games sebenarnya bukan ajang yang asing baginya. Pesilat asal Jakarta ini sudah debut di SEA Games sejak edisi 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. SEA Games Thailand 2025 akan menjadi SEA Games kelima baginya. Namun, Arum enggan menyepelekan persiapan matang.

Arum ingin menyamai prestasinya di level dunia, yakni mengoleksi tiga medali emas. Dia pernah menyabet emas nomor seni tunggal putri di SEA Games Filipina 2019 dan SEA Games Kamboja 2023.

"Itu target pribadi sekaligus yang memotivasi. Kalau itu tercapai, berarti juga membantu target tim, yakni menjadi juara umum," kata Arum yang akan tampil pada nomor seni.

Sementara itu, SEA Games adalah "dunia" baru bagi Antonius Efrem Tuke Eduk (19). SEA Games Thailand 2025 akan menandai debut pesilat asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, ini pada ajang multicabang dua tahunan tersebut.

Kendati baru akan tampil untuk pertama kali di SEA Games, Tuke sebenarnya bukan tanpa pengalaman di level internasional. Tuke sudah tampil pada Kejuaraan Asia Vietnam 2024 dan Kejuaraan Asia Uzbekistan 2025 serta beraksi pada level dunia di Kejuaraan Dunia Abu Dhabi 2024. Pada tiga ajang itu, Tuke selalu membawa pulang emas untuk kelas A (45-50 kg).

Menurut Tuke, prestasi di tiga kejuaraan itu jadi bekalnya menatap SEA Games. Meski levelnya lebih rendah, SEA Games tetap memberi gengsi tersendiri baginya. "Jadi tetap ada gugup karena SEA Games ini berbeda, mungkin karena multicabang. Target medali emas bukan cuma buat diri sendiri, tetapi juga buat membantu tim dan kontingen Indonesia," ucapnya.

Di SEA Games Thailand 2025, tim pencak silat berkekuatan 15 atlet dan turun di 13 nomor. Jika dibandingkan edisi sebelumnya di Kamboja, kekuatan Indonesia lebih minim. Dua tahun lalu, Indonesia mengirimkan 20 pesilat.

Mereka bertarung untuk 17 nomor. Sebenarnya ada 22 nomor, tetapi hanya tuan rumah Kamboja yang bisa mengikutinya. Negara lain dibatasi hanya bisa berpartisipasi maksimal 17 nomor.

Meski nomor yang diikuti terbatas, Indonesia menjadi juara umum pencak silat dengan meraih 9 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Pencak silat juga menyumbang medali terbanyak bagi Indonesia.

Target juara

Di Thailand, tim pencak silat diberikan target juara umum lagi. Pelatih tim pencak silat Indonesia, Indro Catur, mengatakan, tim pencak silat Indonesia harus bisa meraih 6-7 medali emas untuk memenuhi target tersebut.

Namun, tantangan akan dihadapi tim pencak silat Indonesia. Mereka kehilangan lima nomor yang berpotensi mempersembahkan medali di Thailand mendatang.

Empat nomor yang menghasilkan medali bagi Indonesia di Kamboja tidak dipertandingkan di Thailand. Empat, antara lain, nomor tanding kelas B (50-55 kg) putra dan kelas D (60-65 kg) putri yang menghasilkan emas, serta kelas E (65-70 kg) putri, U45 putri, dan seni ganda putri yang mempersembahkan perak. Di Thailand, Indonesia menurunkan atlet di kelas G (75-80 kg) putra, yang tidak diikuti di Kamboja.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Indonesia kehilangan 41 potensi medali lantaran tuan rumah menghapus 41 nomor pertandingan dari cabang olahraga yang sebelumnya menyumbang banyak emas di Kamboja. Dampaknya, posisi Indonesia pada daftar klasemen medali bisa jadi turun ke peringkat 5 atau 6.

Meski demikian, Indro optimistis anak-anak asuhannya tetap bisa mencapai target dan menyumbang medali emas bagi Indonesia. Untuk itu, timnya akan memaksimalkan 13 nomor yang tersedia tersebut.

Apalagi, kata Indro, sebagian besar pesilat merupakan anggota tim di Kamboja lalu. Mereka juga berpengalaman meraih emas, seperti Arum.

"Lima atau enam medali emas sudah bisa jadi juara umum. Kita akan berusaha untuk seoptimal mungkin karena sebelumnya juara umum di Kamboja," ujar Indro.

"Kami pun tidak ada kendala karena tim merupakan kombinasi atlet peraih emas di Kamboja dan atlet-atlet muda yang berprestasi di Kejuaraan Dunia. Jadi, atlet yang berada di tim merupakan yang terbaik," ucapnya.

Ketua Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025 Bayu Priawan Djokosoetono juga optimistis pencak silat bisa kembali meraih juara umum. Menurut Bayu, target yang diberikan kepada pencak silat adalah tujuh medali emas.

"Pencak silat bukan sekadar olahraga, melainkan juga identitas bangsa. Dengan pencapaian di level dunia, saya percaya kalian bisa meraih target di Asia Tenggara," kata Bayu kepada para atlet.

Pencak silat bisa kembali menjadi "jurus" andalan Indonesia untuk mendulang banyak medali di SEA Games. Dengan skuad berpengalaman, prestasi di Kamboja bisa diulangi di Thailand.

(REBIYYAH SALASAH)

PIALA DUNIA 2026

Pendukung Indonesia Tak Gentar dengan Harga Tiket Termahal

JAKARTA, KOMPAS — Piala Dunia 2026, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tercatat sebagai turnamen FIFA dengan nilai tiket termahal dalam sejarah. Namun, warga Indonesia berencana mendukung langsung tim nasional sepak bola Indonesia jika lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali.

Dihimpun dari laman FIFA Tickets dan sejumlah sumber, tiket Piala Dunia 2026 yang mulai dijual pada 1 Oktober lalu lebih mahal 74 persen hingga 1.057 persen dibandingkan tiket Piala Dunia 2022 di Qatar. Tiket itu untuk kategori satu hingga empat, belum termasuk tribune naratama.

Harga tiket paling murah mulai dari 100 dollar AS atau Rp 1,6 juta untuk kategori keempat laga babak penyisihan. Tiket termahal adalah tiket tunggal kategori satu partai final sebesar 6.370 dollar AS atau Rp 105,7 juta. Nominal itu belum termasuk tambahan pajak dan administrasi.

Adapun pada Piala Dunia Qatar 2022, harga tiket termurah untuk babak penyisihan hanya 11 dollar AS. Adapun tiket kategori 1 untuk final memiliki harga normal sekitar 1.607 dollar AS atau kisaran Rp 25 juta.

Dari empat kategori tiket tunggal biasa itu, kenaikan paling besar terjadi pada kategori empat laga babak 16 besar. Harga tiket paling murah alias kategori empat dibanderol 220 dollar AS (Rp 3,6 juta). Di Piala dunia 2022, kelas itu dibuka dengan harga 19 dollar AS atau sekitar Rp 296.400 dengan kurs kala itu.

"Model penentuan harga itu mengadopsi praktik pasar negara tuan rumah untuk acara hiburan dan agenda olahraga besar, termasuk sepak bola. Kami fokus memastikan akses adil ke pertandingan bagi para penggemar dengan harga kompetitif," ungkap FIFA dalam pernyataan resmi tentang penetapan harga tiket laga Piala Dunia 2026.

Kompas menemukan, lonjakan harga semakin besar jika melihat harga tiket naratama dan paket premium. Di Piala Dunia 2022, paket *hospitality* termurah untuk satu laga babak penyisihan adalah 950 dollar AS atau Rp 14,8 juta.

Sementara itu, pada Piala Dunia 2026, paket *hospitality* tunggal harga terendah adalah 2.500 dollar AS atau nyaris Rp 42 juta. Bahkan, Piala Dunia 2026 juga menyediakan paket superpremium untuk sejumlah laga—belum ditemukan jumlah pasti laga dan arenanya—yang mencapai 73.200 dollar AS.

Untuk pertama kali, harga paket Piala Dunia menembus lebih dari Rp 1 miliar, tepatnya Rp 1,2 miliar. Untuk paket serupa di Qatar dibanderol 22.450 dollar AS atau Rp 350 juta.

Lebih dari Rp 100 juta

Dengan harga itu, setiap pendukung Indonesia harus mengeluarkan lebih dari 100 juta. Angka itu dengan catatan menyaksikan laga tiga babak penyisihan di kategori empat.

Pengeluaran itu mencakup tiket tiga laga, pembuatan visa, akomodasi, dan makan selama 15 hari babak penyisihan grup. Angka itu bisa membesar karena harga akomodasi bakal membengkak saat Piala Dunia.



AP PHOTO/JACQUELYN MARTIN

Presiden AS Donald Trump memegang trofi juara Piala Dunia saat berbincang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, di Gedung Putih, Washington DC, 22 Agustus 2025. AS menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko.

Perkiraan pengeluaran itu ternyata tak menggetarkan semangat pendukung skuad "Garuda". Sejumlah warga negara Indonesia juga para diaspora di beberapa negara sudah merencanakan datang langsung ke stadion tempat timnas Indonesia berlaga jika lolos ke Piala Dunia 2026.

Taufiq Budiarto, pengusaha asal Jakarta, akan menyisihkan waktu pada Juni 2026 untuk datang ke Amerika Serikat seandainya Indonesia lolos ke pentas dunia. Taufiq rutin datang ke semua laga tandang Indonesia di pra-Piala Dunia 2026, terutama pada putaran ketiga dan keempat.

Ia pun menyempatkan diri melaksanakan umrah di Mekkah sebelum mengunjungi timnas di Jeddah. Tiket duel Indonesia kontra Arab Saudi dan Irak sudah dimilikinya.

"Saya yakin akan banyak pendukung timnas yang datang ke AS nanti karena saya mendengar langsung dari beberapa anggota jemaah umrah yang datang ke Saudi juga. FIFA juga pasti senang banyak limpahan suporter Indonesia," kata Taufiq, Rabu (8/10/2025).

Jika jalan Indonesia mulus di Saudi dan merebut satu tiket ke Piala Dunia 2026, Taufiq akan berupaya mendapatkan tiket laga. "Semoga permohonan visa AS dipermudahkan untuk Piala Dunia 2026," ucapnya.

Hal serupa juga direncanakan Ari Santoso, diaspora Indonesia di Qatar. Ari bahkan sudah mendaftar *lottery* (undian) agar bisa mendapatkan akses membeli tiket.

FIFA selalu menggunakan sistem *lottery* untuk mengundi calon penonton yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan membeli tiket.

"Kalau dapat *lottery*, saya berencana beli tiket di Atlanta (AS) dan Vancouver (Kanada). Di dua kota itu anak saya sedang kuliah. Saya juga sudah mendapat jalur beli tiket laga (nomor) 23 di Houston dan laga 70 di Houston," ujar Ari.

"Saya akan berusaha mendapatkan tiket timnas jika lolos nanti. Memang agak *challenging* karena belum ada jadwal tempat pertandingan dan bakal sulit juga mendapat tiketnya," kata Ari.

Seperti halnya para pemain timnas yang ingin menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026, pendukung Garuda juga berlomba-lomba ingin menjadi saksi momen monumental timnas Indonesia. Semoga hal itu terwujud tahun depan. (SAN)

Kehadiran Ayah Kurangi

(Sambungan dari halaman 1)

menyiksaku," kata Faizah, Rabu (27/8).

Selain menjadi korban kekerasan, hasil survei kualitatif pada 16 psikolog klinis di 16 kota di Indonesia menyebut dampak lain *fatherless* adalah rasa minder dan emosi/mental yang labil. Ini disebut masing-masing oleh sembilan psikolog. Adapun tujuh psikolog menjawab kenakalan remaja. Lima psikolog menyebut sulit berinteraksi sosial sebagai dampak berikutnya. Dalam survei ini, setiap psikolog diminta menjawab lima dampak yang biasa muncul pada konseli yang mereka hadapi.

Irna (29), warga Depok, Jawa Barat, merasa tidak percaya diri sejak kecil. Hubungannya dengan ayahnya renggang meski tinggal satu rumah. "Makin gede makin sadar kalau kurang percaya diri. Seperti ketika berteman, jadi kayak kurang aktif. Pemalu untuk mulai dulu," ungkapnya, Rabu (27/8).

Tidak hadirnya sosok ayah dirasakan Irna sejak usia 4 tahun. Ia tak suka dengan perilaku ayahnya yang gemar berutang, tetapi tak bertanggung jawab melunasinya. Akibatnya, ibu Irna harus banting tulang menanggung pembayaran utang ayahnya.

Memicu kenakalan anak

Dalam kondisi ekstrem, gangguan perilaku akibat *fatherless* bahkan membawa anak menjadi pelaku kriminalitas. Hal ini juga terlihat dari korelasi regresi antara jumlah anak berpotensi *fatherless* dan jumlah anak bermasalah dengan hukum tahun 2022, yakni 0,72 poin.

Jumlah anak bermasalah dengan hukum, dari Kementerian PPPA, terbanyak ada di Jawa Timur, 560 anak. Disusul Sumatera Utara (487 anak), Jawa Barat (393 anak), Sumatera Selatan (366 anak), dan Jawa Tengah (364 anak). Provinsi-provinsi ini sebagian besar termasuk dalam wilayah dengan jumlah anak *fatherless* tinggi.

Sudah 10 bulan, Madi (18), warga Kota Tangerang, Banten, menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kelas 1 Tangerang, Banten. Bersama dua kakaknya, Madi tertangkap mencuri sepeda motor. Tindak kriminal itu dimulai Madi sejak 2022 untuk memenuhi kebutuhannya dan istri.

Sebelum merantau ke Jawa beberapa tahun lalu, Madi tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan ayahnya di Lampung. "Kalau ada masalah, sering mengobrol ke ibu. Tak pernah ke bapak. Sebenarnya ingin mengobrol dengan ayah. Tapi, kalau saya *ngomong* sedikit, ayah marah," ungkap Madi sambil tertunduk, Senin (29/9).

Kenakalan anak akibat minimnya kehadiran sosok ayah ini terlihat dari data Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera di Bandung, Jawa Barat. Dari total 126 anak binaan pelaku kriminalitas tahun 2024 hingga September 2025 di lembaga itu, sebanyak 43 persen atau 54 anak tanpa kehadiran ayah karena perceraian atau ayah meninggal. Ada juga 54 persen atau 69 anak yang berasal dari keluarga utuh.

Tinggal kelas

Kompas menemukan pola yang menunjukkan bahwa lengkap tidaknya kehadiran orangtua di rumah memengaruhi prestasi akademik anak yang diindikasikan dengan data anak tinggal kelas. Semakin tinggi jumlah anak yang tidak tinggal dengan orangtua, peluang anak untuk tinggal kelas atau tidak naik kelas semakin besar.

Persentase anak tinggal kelas terbesar terjadi pada anak yang tinggal dengan kakek/nenek. Dari total 654.128 anak yang tinggal bersama kakek/nenek, sebesar 20,4 persen atau 133.437 anak tidak naik kelas.

Setelah itu disusul anak yang tinggal dengan ibu tunggal, yakni 17,3 persen anak, kemudian 13,6 persen anak yang hidup dengan ayah saja. Adapun anak dengan orangtua utuh hanya 10,3 persen yang tidak naik kelas.

Attila (15), pelajar SMP di Jakarta, putus sekolah enam tahun lalu karena perceraian orangtuanya. Perceraian itu membuat kehidupan ekonomi keluarga Attila, ibu, dan tiga saudaranya mendadak terhenti. Attila yang saat itu kelas II sekolah dasar terpaksa tidak melanjutkan sekolah selama dua tahun.

Psikolog di Samarinda, Yulia Wahyu, mengatakan, jika keberadaan ayah secara fisik tidak ada karena meninggal atau perceraian, ibu yang akan bekerja mencari sumber penghasilan. "Keberadaan bapak sudah tidak ada, ditambah dengan ibu yang sibuk bekerja. Anak tidak ada yang menemani belajar," ujarnya.

Hal ini, menurut Yulia, bisa menurunkan prestasi belajar anak karena anak merasa tidak ada yang memberi motivasi.

Hilangnya sosok ayah selain memengaruhi prestasi akademik, juga memengaruhi kualitas generasi Indonesia berikutnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji mengatakan, sekarang 20,9 persen anak Indonesia yang *fatherless*, kemudian ditambah 11,7 persen warga lansia, ke depan Indonesia akan kehilangan bonus demografi 32,6 persen.

"Anak *fatherless* kalau digabungkan dengan lansia yang sudah tidak produktif, jika tidak hati-hati, kondisinya akan berpengaruh pada ketahanan keluarga di tahapan berikutnya. Hari ini belum, tapi nanti 5-10 tahun ke depan akan terlihat," kata Wihaji kepada *Kompas*, Jumat (15/8).

(XNA/PUT/FDR/JUD)

Kabinet Kembali Dirombak, Sejumlah Risiko

(Sambungan dari halaman 1)

2003 tentang BUMN. Perubahan itu telah disepakati pemerintah dan DPR, awal Oktober.

Presiden mengangkat Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN. Sementara Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata dilantik sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Dony dan Aminuddin sebelumnya merupakan Wamen BUMN.

Presiden juga melantik ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Velix Wanggai menjadi ketua komite, dengan anggota John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale.

Asisten khusus Presiden

Presiden membuat dua posisi baru dan melantik pejabat terkait. Kedua posisi dimaksud adalah Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan yang dijabat Dirgayuza Setiawan dan Asisten Khusus Bidang Analisa Data Strategis yang dijabat oleh Agung Gumilar Saputra.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, penambahan wamendagri dibutuhkan untuk mengurus Indonesia yang luas, terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. "Dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berjalan dengan baik dan lancar, Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kemendagri dengan mengangkat satu wamen," katanya.

Di Kementerian Kesehatan, lanjut Prasetyo, tambahan wamen diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program prioritas Makan Bergizi Gratis.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, penambahan anggota kabinet akan menimbulkan risiko bagi jalannya pemerintahan dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya dapat membuat Presiden kehilangan kendali atas pemerintahan. "Bukan karena Presiden tidak punya kendali, melainkan banyaknya kementerian dan anggota kabinet membuat prioritas evaluasi hanya pada kementerian utama atau kementerian yang mengurusi bidang strategis," katanya.

Banyaknya anggota kabinet dengan latar belakang dari partai politik, menurut Arya, juga bakal mempersulit Presiden untuk merombak kabinet. Dari empat *reshuffle* yang dilakukan, Presiden harus bernegosiasi dengan banyak partai untuk mengambil keputusan penggeseran menteri atau wamen.

Khususnya terkait penunjukan Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan. Alasannya, Dony masih menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara sekaligus Direktur Utama Danantara Asset Management.

"Secara etika dan aturan, Kepala BP BUMN tidak bisa merangkap posisi di Danantara karena kedudukannya sebagai pengawas lembaga tersebut," ujar Herry. (NIA/SYA/INA/DIM)

Keyakinan Konsumen Turun

(Sambungan dari halaman 1)

Adapun responden dari survei itu terdiri dari masyarakat dari berbagai kelompok usia, pengeluaran, serta jenjang pendidikan. Mayoritas berasal dari jenjang lulusan SMA, berusia 20-50 tahun, serta memiliki pengeluaran rata-rata sebesar Rp 1 juta-Rp 4 juta per bulan.

Meski masih berada di atas zona optimis, IKK pada September 2025 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 117,2. Merosotnya IKK itu tak lepas dari penurunan IKE dan IEK, masing-masing turun 2,4 poin menjadi 102,7 dan 2 poin menjadi 127,2 pada September 2025. Bahkan, IKE mendekati ambang batas zona optimis yang ditetapkan BI, yakni pada level 100. Kondisi ini terutama disebabkan indeks ketersediaan lapangan kerja yang lima bulan berturut-turut atau sejak Mei 2025 berada di zona pesimis.

Keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian saat ini berada di titik terendah dalam tiga tahun terakhir, saat pandemi Covid-19. Jika dirinci, titik terendah IKK dan IKE pada April 2022 masing-masing 113 dan 98,8, sedangkan IEK titik terendah pada September 2022 sebesar 126,1.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Deni Friawan, berpendapat, penurunan keyakinan masyarakat itu bisa jadi berada di titik nadir atau bahkan bisa lebih rendah lagi ke depannya. "Penurunan itu adalah refleksi dari keresahan yang selama ini ada di masyarakat. Jadi itu memang benar adanya dan sekali lagi mengonfirmasi kondisi ekonomi kita hari ini memang tidak baik-baik saja," katanya.

Selain itu, penurunan IKK turut merefleksikan suara-suara masyarakat saat unjuk rasa besar di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Artinya, masyarakat benar-benar merasakan kondisi ekonomi yang tidak mudah, terutama sulitnya mencari pekerjaan.

Stimulus

Ironisnya, turunnya tingkat keyakinan masyarakat itu terjadi di tengah realisasi program prioritas pembangunan pemerintah yang diklaim mampu membawa pada pertumbuhan 8 persen, antara lain Makan Bergizi Gratis, Perumahan Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Deni, dampak dari program-program prioritas pemerintah sejauh ini masih belum dirasakan signifikan oleh masyarakat. Di sisi lain, sebagian anggaran belanja pemerintah sudah dialokasikan untuk berbagai program itu. "Masyarakat masih belum yakin pada kebijakan yang pemerintah lakukan hari-hari ini meski sudah berjalan hampir setahun," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang getol menggelontorkan berbagai paket stimulus ekonomi, antara lain Paket Kebijakan Ekonomi pada akhir 2024, Paket Stimulus Ekonomi pada Juni 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim libur sekolah, dan Program 8+4+5 yang bertujuan mendongkrak ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memaparkan, ada beberapa faktor yang memengaruhi pelemahan tingkat keyakinan masyarakat ketika pemerintah banyak menggelontorkan stimulus ekonomi. Pertama, stimulus ekonomi (Program 8+4+5) baru mulai digulirkan di tengah momentum konsumsi yang melambat. Kedua, masih rapuhnya sentimen pasar tenaga kerja yang tampak dari indeks ketersediaan lapangan kerja. Kondisi indeks yang berada dalam zona pesimis menjelaskan konsumsi rumah tangga yang menahan pembelian barang tahan lama di tengah prospek kerja belum meyakinkan.

Ketiga, kenaikan proporsi konsumsi ke 75,1 persen dengan tabungan yang stabil menandakan porsi belanja rutin masyarakat terhadap kebutuhan pokok membengkak. Dengan kata lain, ruang bagi masyarakat untuk membeli barang tahan lama kian mengecil, terutama pada kelompok pengeluaran di atas Rp 4,1 juta per bulan.

Di sisi lain, menurut Josua, konsumsi rumah tangga berpeluang menguat moderat secara triwulanan. Kondisi tersebut antara lain didorong musim liburan Natal dan Tahun Baru, percepatan eksekusi stimulus, serta kondisi likuiditas yang lebih longgar.

Josua memperkirakan, konsumsi rumah tangga pada paruh pertama 2026 akan ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja, kecepatan realisasi stimulus dan keberlanjutan transfer atau penyerapan kerja, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.

(AGP)

Mengubah Ketiadaan Ayah Jadi Kekuatan

(Sambungan dari halaman 1)

perempuannya yang rela berkorban demi membiayai kuliahnya. Figur-figur ini telah membentuk karakternya.

Hari-hari tanpa ayah dilalui Danardono dan keluarganya dengan tinggal di rumah budenya di Semarang. Menyadari dirinya "menumpang", Danardono mengerjakan segala pekerjaan rumah sendiri sejak kecil. Ini membuatnya mandiri dalam banyak hal. Karakter ini membuat Dono, panggilan akrabnya, saat dewasa bisa mencapai kesuksesan dalam pendidikan ataupun karier.

Sebagai seorang ayah dari dua anak perempuan, Danardono bertekad memutus rantai *fatherless* di keluarganya. Ia berkomitmen selalu ada untuk anak-anaknya, tidak peduli seberapa lelahnya ia bekerja.

"Aku ingin anak-anak tahu, ayah mereka adalah pekerja keras, tapi selalu punya waktu untuk keluarga," ujarnya.

Ia juga mengajarkan prinsip-prinsip yang didapatkannya dari masa kecilnya, seperti pentingnya bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Ia bahkan melarang anak-anaknya menangis hanya karena keinginan tidak terpenuhi. "Lebih baik waktumu dipakai untuk berpikir, bagaimana cara meyakinkan ayah, daripada menangis," pesannya.

Mencurahkan ke buku

Tumbuh sebagai anak *fatherless*, Rachmat Reza (48) mencari teladan sosok ayah dari banyak buku dan sosok lelaki yang dikenalnya. Ia juga sudah membaca hampir semua buku tentang *fatherless* yang ada di dunia.

Reza merasa kekurangan referensi buku yang membahas tentang *fatherless* di Indonesia. Setelah mengumpulkan semua pengetahuan tentang *fatherless, motherless, fatherhood,* dan *parenting,* Reza menuliskannya ke dalam 14 buku sampai hari ini.

Salah satu buku yang menjadi inspirasi Reza dalam membagikan pengalaman hidup *fatherless* adalah buku Barat terbitan tahun 2010 yang berjudul *Fatherless Generation: Redeeming the Story* karya John A Sowers. Berkat buku itu, Reza akhirnya merasa bahwa dirinya bukan orang paling malang sedunia. Sebab, ternyata ada banyak orang lain yang juga *fatherless* selain dirinya di dunia ini.

"Hampir semua buku yang ada *fatherless*-nya sudah saya baca. Saya sarikan, sajikan, dan dibahasakan di dalam buku secara sederhana agar lebih mudah dimengerti dan bisa membantu semua orang yang mengalami *fatherless* seperti saya," kata Reza yang menerbitkan buku pertamanya berjudul *My Father(less) Story* tahun 2018.

Sejak kecil, ia tinggal di rumah kakek-neneknya. Kala itu, sosok ayah diperoleh dari kasih sayang kakek serta empat pamannya yang belum menikah dan tinggal di rumah yang sama.

Sementara ibu Reza, walau tidak tinggal serumah, selalu merayakan hari ulang tahunnya setiap tahun. Ibunya juga mengirimkan kado ulang tahun yang diinginkan Reza sesuai dengan surat yang ia kirimkan ke ibu sebulan sebelumnya.

"Itu adalah salah satu memori paling indah di masa kanak-kanak saya," ingat Reza.

Meskipun tumbuh besar dengan ayah sambung setelah SD, relasi Reza dengan ayah sambungnya tak terlalu dekat. Ia merasa seperti ada jarak yang memisahkan. Walaupun demikian, ia bersyukur karena ayah sambungnya berjasa membiayai kuliah Reza di jenjang S-1 dan S-2. Meski sudah ada ayah sambung, tak serta-merta kerinduan Reza pada ayah kandungnya mereda.

Sekelumit realitas hidup *fatherless* yang dijalani Reza membuatnya bersyukur. Ada cerita sedih dan ada cerita bahagianya. Saat ini, Reza bersama istri dan anak perempuan semata wayangnya telah menjalani hidup keluarga sendiri dan menjadi seorang ayah. Sebagai seorang ayah, ia mengakui dirinya bukan ayah yang sempurna.

"Saya sebagai orangtua juga merasa kurang berhasil dan penuh perjuangan," terang Reza yang menyelesaikan jenjang S-1 dan empat jenjang S-2 dengan jurusan yang berbeda-beda.

Dalam buku-bukunya, ia berpesan tentang pentingnya setiap ayah untuk terus berusaha menjadi seorang ayah ideal. Ayah yang hadir dalam kehidupan anaknya dan berpengaruh positif dalam tumbuh kembang mereka. Inilah tanggung jawab utama seorang ayah dan merupakan kunci agar anak-anak tidak mengalami *fatherless* seperti dirinya.

Demokrasi dan Literasi

ANALISIS POLITIK



ULIL ABSHAR-ABDALLA
Cendekiawan Nahdlatul Ulama

Ketika mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15, sebuah perubahan besar pelan-pelan terjadi. Perubahan ini menandai sebuah revolusi besar. Ini bukan revolusi politik yang biasanya melibatkan peralihan kekuasaan yang berdarah-darah. Ini adalah revolusi sosial budaya yang berlangsung secara gradual.

Lahirnya mesin cetak oleh Gutenberg itu memungkinkan pencetakan buku dan bahan-bahan terbitan lain dalam jumlah yang massal dan cepat. Tradisi membaca yang semula kegiatan "elitis" di kalangan bangsawan dan cendekia, berkat mesin cetak bisa menyebar menjadi kegiatan rakyat pada umumnya.

Pada waktu yang kurang lebih bersamaan, berlangsung revolusi lain yang beroperasi di lingkungan masyarakat agama (baca: Kristen), yaitu Revolusi Lutheran. Revolusi itu dipicu oleh gagasan-gagasan reformasi Martin Luther (1483-1546), seorang teologi dan pendeta dari Jerman. Salah satu gagasan penting Luther ialah vernakularisasi Kitab Suci, yaitu penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa non-Latin.

Hingga era Luther, Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin, bahasa "suci" yang dipakai sebagai bahasa liturgi dalam gereja Katolik pada zaman itu, atau disebut dengan Vulgata. Hanya kalangan klerikal atau kependetaan yang menguasai dan memahami bahasa ini. Akses umat awam terhadap Alkitab menjadi terbatas.

Keadaan berubah drastis ketika Luther menggagas penerjemahan Injil ke dalam bahasa Jerman. Langkah Luther ini sangat revolusioner. Dengan dukungan mesin Gutenberg, inisiatif Luther ini memungkinkan terjadi revolusi sosial yang dampaknya jauh hingga ke beberapa abad setelahnya, yaitu revolusi literasi. Tradisi membaca tersebar luas. Kegiatan membaca pelan-pelan berubah menjadi "demam" yang menjangkiti semua kalangan.

Pada awal abad ke-18, misalnya, hanya ada sekitar 6.000 judul buku yang terbit di Inggris. Pada akhir abad itu jumlahnya meledak menjadi 56.000. Keadaan serupa juga terjadi di kawasan-kawasan lain, seperti Perancis dan Jerman. Literasi menjadi salah satu ciri penting dunia Eropa pada abad ke-18. Demam literasi ini, dengan satu dan lain cara, juga pelan-pelan menyebar ke luar Eropa. Dan ini semua menjadi latar penting bagi lahirnya demokrasi modern.

Kita tidak bisa membayangkan demokrasi modern tanpa adanya revolusi literasi ini. Fondasi penting literasi, kita tahu, adalah buku. Dengan demikian, kita tidak bisa memisahkan lahirnya demokrasi modern dari buku dan tradisi membaca buku.

Salah satu akibat penting dari mesin cetak Gutenberg yang memudahkan pencetakan buku secara massal, ialah munculnya fenomena "ruang publik". Di ruang publik inilah berlangsung percakapan (diskursus) mengenai urusan-urusan yang menyangkut kemaslahatan umum.

Segala argumen dan *hujjah* dikemukakan dan dipertandingkan di antara pelbagai pihak mengenai apa aja. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dipersoalkan di ruang ini. Sementara itu, aspirasi publik mengalami peningkatan kualitas, dan sekaligus pencanggihan, karena adanya tradisi literasi dan budaya baca yang kian menguat akibat massalisasi bahan-bahan bacaan.

Ada kualitas berpikir yang berubah karena adanya massalisasi bahan bacaan, dan ini sekaligus melatari munculnya demokrasi modern. *"To engage with the written word means to follow a line of thought which requires considerable powers of classifying, inference-making and reasoning,"* kata Neil Postman, penulis buku *Amusing Ourselves to Death*, sebagaimana dikutip oleh James Marriott, wartawan *The Times*, dalam tulisannya baru-baru ini. Membaca buku memaksa seseorang berpikir runut, melakukan analisis secara sistematis, dan tidak gampang tergoda oleh sensasionalisme para demagog di ruang publik.

Nasib demokrasi

Pertanyaannya ialah: bagaimana nasib demokrasi dan politik di era pasca-literasi? Ini kegelisahan yang mengganggu banyak pihak akhir-akhir ini. Apa yang disebut dengan era pasca-literasi ialah perkembangan baru di zaman digital di mana tradisi membaca buku merosot drastis karena masuknya "budaya mata" dan membanjirnya informasi yang dikemas dalam paket-paket pendek dan sederhana melalui gawai.

Kini kita sedang menyaksikan fenomena "tiktokisasi": kecenderungan seseorang untuk lebih menyukai informasi yang sederhana, spontan, dan ringkas. Ada yang hilang dalam tren ini; yaitu, meminjam istilah Postman, "kemampuan yang luar biasa untuk menalar".

Kekosongan ini mengundang para demagog dan tokoh populis masuk dan menawarkan narasi-narasi sederhana yang dikemas ala konten Tiktok: ringkas, cepat, renyah, dan kerap sensasional. Narasi-narasi para demagog populis ini umumnya tidak mendorong seseorang menalar, tetapi menghasut emosi. Disinformasi menjadi gampang disebarkan.

Dan persis di sinilah kita patut bertanya: bukankah demokrasi dalam ruang publik yang mengalami tiktokisasi seperti ini tidak malah memfasilitasi tersebarnya disinformasi? Tidakkah demokrasi menghadapi situasi "penghancuran diri"?

Jawabannya tidak mudah, tetapi patut menjadi bahan renungan. Ada dinamika sosial dalam masyarakat digital yang memaksa kita mesti memikirkan ulang tentang demokrasi dalam bentuknya yang sudah kita kenal selama ini.

KOMPAS

STAF REDAKSI: Subur Tjahjono, Evy Rachmawati, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Neli Triana, B. Josie Susilo Hardianto, Andy Riza Hidayat, Demitrius Wisnu Widiantoro, Fx. Laksana Agung Saputra, Antonius Ponco Anggoro, M. Hilmi Faiq, Mukhamad Kurniawan, Agnes Rita Sulistyawati, Nasrullah Nara, Nasru Alam Aziz, Yovita Arika, Iwan Setiyawan, Dahono Fitrianto, Johanes Waskita Utama, Nur Hidayati, C. Wahyu Haryo P, M. Yuniadhi Agung, Budi Suwarna, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Rini Kustiasih, Madina Nusrat, Harry Susilo, Sri Rejeki, Emilius Caesar Alexey, Maria Susy Berindra A, Wisnu Aji Dewabrata, Yulvianus Harjono, Ichwan Susanto, Aloysius Budi Kurniawan, Fransisca Romana Ninik, Aris Prasetyo, Anita Yossihara, Adhitya Ramadhan, Gregorius Magnus Finesso, Andreas Benoe Angger Putranto, Yohanes Krisnawan, Cyprianus Anto Saptowalyono, Dwi As Setianingsih, Kris Razianto Mada, Heru Sri Kumoro, Siwi Yunita Cahyaningrum, Irene Sarwindaningrum, Agnes Theodora Wolkh Wagunu, Johanes Galuh Bimantara, M Puteri Rosalina, Andri Setianto, Agus Susanto, Ilham Khoiri, Agung Setyahadi, Susana Rita, Albertus Hendriyo Widi Ismanto, Sonya Hellen Sinombor, Danu Kusworo, Nawa Tunggal, Iwan Santosa, Luki Aulia, Yulia Sapthiani, Wisnu Dewabrata, Wisnu Nugroho, Amir Sodikin, Ester Lince Napitupulu, Affan Adenensi Riza Fathoni, Ahmad Arif, Brigita Maria Lukita, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Dwi Bayu Radius, Priyombodo, Totok Wijayanto, Nina Susilo, Rony Ariyanto Nugroho, Hendra Agus Setyawan, Mawar Kusuma Wulan Kuncoro Manik, Herlambang Jaluardi, Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Mediana, Laraswati Ariadne Anwar, Dian Dewi Purnamasari, Denty Piawai Nastitie, Muhammad Ikhsan Mahar, Dimas Waraditya Nugraha, Iqbal Basyari, Elsa Emiria Leba, Maria Paschalia Judith Justiari, Satrio Pangarso Wisanggeni, Deonisia Arlinta Graceca Dewi, Pradipta Pandu Mustika, I Gusti Agung Bagus Angga Putra, Nikolaus Harbowo, Prayogi Dwi Sulistyo, Kurnia Yunita Rahayu, Machradin Wahyudi Ritonga, Kelvin Hianusa, Tatang Mulyana Sinaga, Aditya Putra Perdana, Pandu Wiyoga, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany, Melati Mewangi, Aguido Adri, Insan Alfajri, Stefanus Ato, Erika Kurnia, Fajar Ramadhan, Sekar Gandhawangi, Aditya Diveranta, Rhama Purna Jati, Abdullah Fikri Ashri, Nino Citra Anugrahanto, Emanuel Edi Saputra, Dionisius Reynaldo Triwibowo, Albertus Krisna, Marina Ekatari, Frenky Tanni Wijaya, Rian Septiandi, Hendricus Arga Yudhantara, Alberdi Ditto Permadi, **MEDAN:** Nikson Sinaga, **PADANG:** Yola Sastra, **JAMBI:** Irma Tambunan, **PALEMBANG:** Adrian Fajriansyah, **BANDAR LAMPUNG:** Vina Oktavia, **BANDUNG:** Cornelius Helmy Herlambang, Fabio Maria Lopes Costa, **SEMARANG:** P. Raditya Mahendra Y, Kristi Dwi Utami, **YOGYAKARTA:** Haris Firdaus, Ferganata Indra Riatmoko, Mohamad Final Daeng, **SURABAYA:** Agnes Swetta Pandia, Bahana Patria Gupta, Ambrosius Harto, **MALANG:** Dahlia Irawati, Defri Werdiono, **SIDOARJO:** Runik Sri Astuti, **KUPANG:** Fransiskus Pati Herin, **MAKASSAR:** Reny Sri Ayu, **KENDARI:** Saiful Rijal Yunus, **MANADO:** Kristian Oka Prasetyadi, **BALIKPAPAN:** Sucipto
GM LITBANG: Ignatius Kristanto, **GM SUMBERDAYA MANUSIA/OPERASIONAL:** Gesit Ariyanto

KANTOR REDAKSI: Menara Kompas Lantai 5, Jl. Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 **TELEPON:** 534 7710/20/30, 530 2200 **ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN):** P.O. BOX 4612 JAKARTA 12046 **PENERBIT:** PT Kompas Media Nusantara **SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS:** SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkamtibda No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 **ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR:** No. 37/1965/11/A/2002 **PERCETAKAN:** PT Gramedia ISSN 0215 - 207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

DIREKTUR BISNIS: Lukminto Wibowo, Moris Rusmanto (Wakil), **GM IKLAN:** Dorothea Devita R.M., Diana Eka P. (Wakil), **GM SIRKULASI/DISTRIBUSI:** Titus Kitot K.S., Eriyanto (Wakil), Adiyan Randal S., (Wakil), **GM MARKETING:** Juanda Eka Setiawan (Wakil), **GM EVENT:** Budhi Sarwiadi, **GM PENGEMBANGAN PRODUK:** Eberhard Ojong, Yulius Malik (Wakil), Omar Abdillah (Wakil), **TARIF IKLAN:** Reguler (umum/display) BW Rp 165.000/mmk FC Rp 215.000/mmk, 1 kolom BW Rp 65.000/mmk, baris (min 3 brs, maks 12 brs) Rp 58.000/baris, duka cita (untuk personal/keluarga) BW min 200 mmk Rp. 75.000/mmk, FC min 1080 mmk Rp. 115.000/mmk, belum termasuk PPN 11%, pembayaran di muka. Iklan dukacita untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 16.00 WIB **BAGIAN IKLAN:** Menara Kompas Lantai 2, Jl. Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 **TELEPON: (021) 8062 6688, 8062 6699 PUSAT LAYANAN IKLAN: (021) 2567 6076 - SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.00** BAGIAN LAYANAN PELANGGAN: GD KOMPAS GRAMEDIA, LT 3 UNIT 2 PALMERAH SELATAN 26-28, JAKARTA 10270 TELEPON: (021) 2567 6000 WA: 0812 90050800 E-mail: hotline@kompas.id **HARGA LANGGANAN:** RP 250.000 + ONGKOS KIRIM/BULAN (JAWA), RP 265.000 + ONGKOS KIRIM/BULAN (LUAR JAWA) **REKENING:** BCA No. 012.302.7164 ◆ BNI 1946 Jakarta Kota No. 14132806 ◆ BRI Jakarta Kota No. 0019.01000168308 **KHUSUS BAGIAN IKLAN: BCA 012.300.4679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE:** http://www.kompas.id ◆ **YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS:** Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nomor A/C 012.302143.3 ◆ **E-MAIL REDAKSI:** sekred@kompas.id

◆ **Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya maksimal 5.000 karakter, dengan disertai identitas, foto, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor rekening. Artikel dikirim dalam format digital ke alamat opini@kompas.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apapun yang dikirim ke harian "KOMPAS" dapat diterbitkan dalam format cetak maupun digital yang tetap merupakan bagian dari harian "KOMPAS". Setiap artikel yang dimuat akan mendapatkan honor. Pajak atas honor ditanggung oleh Harian Kompas (Kompas.id).**

WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.

Sosok

e-mail: desk.budaya@kompas.id

Baca artikel lainnya seputar Sosok di Kompas.id dengan memindai QR Code.
klik.kompas.id/sosok

John Clarke, Michel Devoret, dan John Martinis

Semangat Kolegialitas Peneliti Kuantum

Sejumlah negara adidaya sampai sekarang masih terus berlomba untuk menguasai teknologi kuantum yang memiliki peran penting di berbagai sektor, mulai dari otomotif, komputasi, hingga teknologi keseharian lainnya. Jalan pengembangan teknologi kuantum ini dibuka oleh John Clarke, Michel Devoret, dan John Martinis yang meraih Nobel Fisika 2025.

Pradipta Pandu Mustika



AP PHOTO/MARK J TERRILL, HAROLD SHAPIRO VIA AP, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY VIA AP

John M Martinis

Lahir: Amerika Serikat, 1958
Pendidikan: PhD di University of California, AS (1987)
Afiliasi saat ini: University of California, AS

Michel H Devoret

Lahir: Paris, Perancis, 1953
Pendidikan: PhD di Paris-Sud University, Perancis (1982)
Afiliasi saat ini: University of California dan Yale University, AS

John Clarke

Lahir: Cambridge, Inggris, 1942
Pendidikan: PhD di University of Cambridge, Inggris (1968)
Afiliasi saat ini: University of California, AS

Ucapan selamat dan permintaan wawancara tak henti menghampiri John Clarke setelah ia diumumkan sebagai salah satu penerima Nobel Fisika tahun ini oleh Royal Swedish Academy of Sciences (KVA), Selasa (7/10/2025). Clarke mafhum Nobel Fisika adalah penghargaan bergengsi sehingga setiap penerima akan mendapat sorotan media.

Clarke bersama John Martinis dan Michel Devoret mendapatkan Nobel Fisika atas kontribusinya dalam memperlihatkan fenomena kuantum pada skala makroskopis. Tiga ilmuwan tersebut merupakan kolega dan saling mengenal satu sama lain.

"Saya sangat senang bahwa John Martinis dan Michel Devoret berbagi penghargaan ini dengan saya. Saya tidak bisa membayangkan menerima penghargaan itu tanpa mereka berdua karena terasa tidak lengkap. Komite Nobel benar-benar mengakui pentingnya kolaborasi ini," ujarnya saat diwawancarai oleh Komite Nobel melalui sambungan telepon.

Ucapan itu bukan sekadar formalitas. Bagi Clarke, penghargaan Nobel Fisika bukan hasil kecemerlangan individu, melainkan buah dari perjalanan kolaboratif yang dimulai lebih dari empat dekade lalu di sebuah laboratorium di University of California, Berkeley.

Pada 1980-an, Devoret baru saja menyelesaikan studi doktoralnya. Sementara Martinis masih menjadi mahasiswa doktoral yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap mekanika kuantum. Ketiga fisikawan ini pun kerap berdiskusi panjang hingga berhari-hari untuk membahas berbagai teori ataupun eksperimen terkait fenomena kuantum.

Clarke memandang ketekunan dan keberhasilan mereka hingga meraih Nobel Fisika tidak hanya didorong oleh kecerdasan, tetapi juga hasil konstelasi orang-orang yang bergerak dan bekerja bersama pada waktu yang tepat.

Dalam sesi konferensi pers, Clarke menyebut semangat kolaborasi para ilmuwan ini sebagai "kolegialitas". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan rasa ingin tahu, saling percaya, memperkuat motivasi, dan memperkaya ide-ide baru dalam kerja ilmiah.

Clarke merasa semangat kolegialitas ini turut terbangun dengan seniornya saat menempuh kuliah pascasarjana yang juga peraih Nobel Fisika tahun 1973, Brian Josephson.

Josephson dikenal sebagai sosok ilmuwan yang kerap menantang cara berpikir konvensional. Sosok Josephson inilah yang memengaruhi cara berpikir Clarke terhadap dunia ilmiah.

Setelah masa itu, Clarke juga mendapat bimbingan dari Sir Alfred Brian Pippard, fisikawan asal Inggris yang dianugerahi gelar kebangsawanan pada 1975. "Saya mengenal Brian Pippard dengan sangat baik dan pengaruhnya terhadap karier saya sangat besar," katanya.

Saling berkontribusi

Semangat kolegialitas dalam dunia sains juga dirasakan oleh John Martinis. Menurut Martinis, semua ilmuwan, baik dirinya, Devoret, maupun Clarke, berkontribusi dengan ide yang berbeda-beda. Setiap ide yang diutarakan sangat penting karena saat itu fisika kuantum masih tergolong bidang baru dan banyak orang belum memahami potensi eksperimennya.

Mereka melakukan beberapa eksperimen yang benar-benar mendorong batas pengetahuan tentang fisika kuantum. Mereka juga harus menemukan pendekatan yang tepat dan membangun alat yang sesuai untuk menguji fenomena kuantum.

"John Clarke adalah pemimpin yang hebat dan saya bekerja dengan Michel Devoret setiap hari. Ini merupakan pengalaman yang sangat membentuk saya di awal karier. Saya beruntung bisa bekerja dengan Devoret dan Clarke, dua ilmuwan luar biasa yang banyak menginspirasi saya. Pengalaman itu sangat berharga," ujarnya.

Sama seperti penerima Nobel Fisika lainnya, Martinis juga tidak berharap untuk meraih salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia sains ini. Namun, ia bersyukur bahwa pekerjaannya bersama Clarke dan Devoret yang mengkaji fenomena kuantum pada skala makroskopis sejak puluhan tahun lalu diakui oleh dunia akademik.

"Hal yang paling menarik bagi saya adalah ada ribuan ilmuwan lain yang bekerja di bidang komputasi kuantum dan superkonduktivitas. Semua orang berusaha memahami fisika yang indah ini. Bagi saya, itu bagian yang paling menginspirasi," katanya.

Kecintaan dan kesetiaan terhadap bidang fisika kuantum mendorong Martinis untuk mendirikan Qolab, perusahaan dengan fokus pengembangan komputer kuantum yang benar-benar fungsional. Martinis pun tetap terlibat dalam penelitian karena membangun komputer kuantum jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan secara teoretis.

Menurut Martinis, tantangan utama mengembangkan komputer kuantum terletak pada aspek rekayasa sistem. Sebab, membangun komputer dengan kemampuan pemrosesan yang kuat dan stabil sangat rumit. Oleh karena itu, mereka kini berfokus pada peningkatan kualitas *qubit* atau bit kuantum agar bisa melampaui capaian yang ada saat ini.

"Saya menikmati prosesnya karena kami harus berpikir sangat praktis. Kolaborasi lintas bidang sangat penting. Orang dengan keahlian berbeda harus bekerja bersama untuk mewujudkan komputer kuantum yang benar-benar bisa digunakan," katanya.

Awal mula kolaborasi

Kolaborasi fisikawan dalam bidang kuantum ini juga melibatkan Michel Devoret. Hubungan Devoret dan Clarke bermula saat ia bekerja di University of California setelah menamatkan pendidikan doktoral di Paris-Sud University pada 1982. Di sini, Devoret juga bertemu dan berkolaborasi dengan Martinis yang saat itu masih menjadi mahasiswa doktoral.

Dua tahun berselang atau pada 1984, Devoret kembali ke Perancis untuk memulai kelompok risetnya sendiri di Commissariat à l'Energie Atomique di Saclay (CEA-Saclay). Ia menjalankan riset di tanah kelahirannya selama 18 tahun sebelum akhirnya melanjutkan karier akademisnya ke AS di Yale University pada 2002.

Bersama fisikawan lain, Devoret berperan penting dalam mengembangkan studi teknologi kuantum di Yale University. Selain jabatan profesornya, ia juga merupakan kepala ilmuwan di Google Quantum AI. Ini adalah tahun kedua berturut-turut sebuah penghargaan Nobel dimenangi oleh ilmuwan yang terkait dengan Google.

Koleganya di Yale University memandang Devoret sebagai sosok yang memiliki pandangan luas di bidangnya dan pandai menjelaskan sesuatu yang rumit kepada orang lain. Hal ini membuat banyak mahasiswa antusias untuk bekerja di bawah pimpinan Devoret.

Atas karya dan kerja kerasnya selama beberapa dekade, ketiga fisikawan tersebut telah membuka jalan terhadap lahirnya revolusi dalam bidang mekanika kuantum. Nama mereka pun kini telah sejajar dengan fisikawan ternama lainnya karena menjadi seorang pelopor teknologi yang sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan banyak orang.

NAMA & PERISTIWA

HENRY MOODIE

Melodi Jiwa Menuju Panggung Dunia

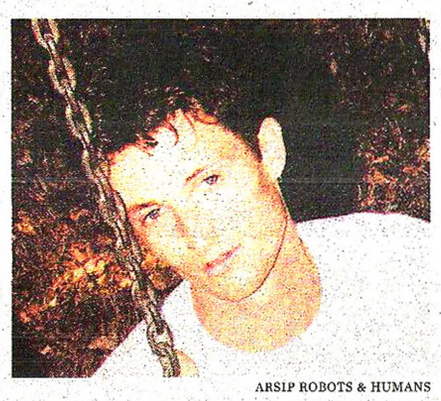
Pada Jumat (3/10/2025), Henry Moodie (21) merilis singel terbarunya, "Mood Swings". Lagu ini menjadi potret jujur dari gejolak batin seorang pemuda, dihidupkan lewat vokal memukau dan produksi yang penuh kepekaan.

Dirilis lewat Robots & Humans (UK) dan Columbia Records (AS), "Mood Swings" menjadi pembuka dari album Henry yang akan hadir pada Jumat (24/10). Album itu juga bertajuk *Mood Swings*.

Dengan lirik yang tajam, tetapi personal, Henry menggambarkan lagu ini sebagai percakapan dalam sesi terapi pertama. Atmosfernya intim, terbuka, dan tanpa topeng.

"Bayangkan kamu adalah terapisku dan kita sedang berada di sesi pertama kita, lalu aku duduk dan mencurahkan semua kegelisahanku padamu. Itulah yang ingin aku rasakan saat mengalami perubahan *mood*. Sebelum kita membahas detail album ini, aku ingin terlebih dahulu menjelaskan siapa diriku," kata Moodie sebagaimana media rilis yang dikirim ke *Kompas*.

Lagu itu menyusul jejak karya-karya sebelumnya yang juga akan hadir dalam album tersebut, seperti "Drunk Text", "Sunday Morning", dan "Indigo".



ARSIP ROBOTS & HUMANS

Henry Moodie merupakan sosok muda yang tengah menapak takdir sebagai bintang pop dunia. Ia mencapai hampir 1 miliar *stream* di seluruh dunia untuk seluruh katalog musiknya. Dia juga masuk dalam 10 besar artis Inggris paling banyak disaksikan di Tiktok pada 2022 dan dinobatkan dalam daftar Future of Music Rolling Stone UK tahun 2025.

Tahun depan, Moodie akan membawa kisah dan lagunya ke berbagai panggung Eropa dan Inggris dalam tur besar bertajuk *Mood Swings Tour* pada Maret-April 2026. Ini akan menjadi pembuktian bahwa Moodie adalah suara generasi yang mencoba menyanyi dengan suara hati.

(MHF/*)

